



UNIVERSITAS DIPONEGORO

**EKSISTENSI SISTEM HUKUM ADAT PIDANA
MINANGKABAU DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT, PRAKTEK PENEGAKAN
HUKUM, DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

Oleh

DIANA ARMA
NIM: B.002.93.0008

UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM STUDI S-2 (MAGISTER) ILMU HUKUM
2001

340.5795981

ARM

E C I



UNIVERSITAS DIPONEGORO

**EKSISTENSI SISTEM HUKUM ADAT PIDANA
MINANGKABAU DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT, PRAKTEK PENEGAKAN
HUKUM, DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

Tesis Diajukan sebagai Suatu Syarat untuk Memperoleh Ijazah
Magister
Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Oleh

DIANA ARMA
NIM: B.002.93.0008

**UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM STUDI S-2 (MAGISTER) ILMU HUKUM
2001**

UPT-PUSTAK-UNDIP



UNIVERSITAS DIPONEGORO

**EKSISTENSI SISTEM HUKUM ADAT PIDANA
MINANGKABAU DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT, PRAKTEK PENEGAKAN
HUKUM, DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh

DIANA ARMA

NIM: B.002.93.0008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 3 September 2001

Tesis ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan untuk
Memperoleh Derajat Magister Bidang Ilmu Hukum

Semarang, 3 September 2001

UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM STUDI S-2 (MAGISTER)
ILMU HUKUM

Pembimbing Tesis,

Prof. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, SH



Ketua,

Prof. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, SH

UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM STUDI S-2 (MAGISTER) ILMU HUKUM
2001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, atas rahmat dan kuasa-Nya jugalah akhirnya penulis dapat merampungkan penelitian dan penyusunan tesis ini. Adapun tesis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir penulis pada Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Tesis ini berjudul “Eksistensi Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat, Praktek Penegakan Hukum, dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, adalah suatu karya tulis yang bertujuan: (1) mengetahui dan mengungkapkan Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau; (2) mengetahui dan mengungkapkan eksistensi Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam kehidupan masyarakat, dan dalam praktek penegakan hukumnya; dan (3) mengetahui eksistensi dan relevansi Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak dapat berjalan lancar tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada lembaran diawal tesis ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku pembimbing tesis ini maupun selaku Ketua Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, ditengah kesibukan beliau masih berkenan meluangkan waktu untuk

membimbing, memberi semangat, mengoreksi, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sangat teliti dan penuh kesabaran kepada penulis. Disamping itu sebagai dosen pengasuh beberapa mata kuliah, juga telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Muladi, SH., selaku dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., selaku dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dengan penuh kesabaran dan keterbukaan yang sangat berguna bagi penulis untuk bekal pengembangan ilmu pengetahuan dimasa mendatang.
4. Bapak Prof. Ronny Hanitijo, SH., selaku dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, khususnya mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang sangat membantu penulis dalam penelitian ini.
5. Bapak Prof. Dr. IS. Susanto, SH., selaku dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada lembar ini yaitu dosen-dosen pengasuh mata kuliah serta karyawan-karyawati pada Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmunya, sehingga memperkaya dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis ataupun yang telah membantu kelancaran studi penulis.

7. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang beserta rekan-rekan sesama staf pengajar yang telah memberikan dukungan dan motivasi secara terus-menerus kepada penulis, terutama pada saat-saat kritis bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau serta semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan baik dalam bentuk bahan-bahan/data maupun waktu untuk wawancara guna penulisan tesis ini.

Akhirnya kepada Ibunda Hj. Nadiar yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang, dan Kakanda Ir. Dian Fakri, MSP., suami tercinta yang selalu mendorong penulis untuk maju, serta Adabina Cindina anakku sayang yang ikut mendorong penyelesaian tesis ini, penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, Agustus 2001.

Penulis,

Diana Arma

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL LUAR	i
LEMBARAN JUDUL DALAM	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Kerangka Teori	18
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penyajian	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat Pidana	26
B. Relevansi Hukum Adat dalam Upaya Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia	37
C. Eksistensi Hukum Adat Pidana di Indonesia	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Daerah dan Adat Alam Minangkabau	63
B. Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau	85
C. Eksistensi Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat dan Praktek Penegakan Hukum	128
D. Eksistensi dan Relevansi Hukum Adat Pidana Minangkabau Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	151

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum	160
B. Kesimpulan Khusus	162
C. Saran	166

DAFTAR PUSTAKA	167
----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Berlandaskan amanat UUD 1945 tersebut, pada dasarnya sejak setelah kemerdekaan sampai berakhirnya Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) telah diupayakan pembangunan hukum secara bertahap, yang dalam pelaksanaannya sebagian telah berhasil, di samping masih banyak bidang-bidang yang memerlukan penataan lebih lanjut. Pembangunan hukum tersebut sedang dan akan terus diupayakan dalam rangka menuju terbentuknya sistem hukum nasional.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 telah menempatkan hukum menjadi bidang tersendiri sebagai salah satu sarana pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang serius dari para wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR untuk lebih memantapkan pembangunan nasional. Penempatan hukum menjadi bidang tersendiri juga memberi arti yang amat luas bagi pembangunan di Indonesia. Sebab hukum tidak saja menjadi pelengkap akan tetapi mempunyai posisi sentral dan strategis sebagai pengatur dan pengarah interaksi sosial. Dengan kata lain hukum hendak diwujudkan sebagai salah satu alat untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

GBHN 1993 juga mengamanatkan bahwa dalam pembangunan bidang hukum tercakup antara lain, merumuskan materi hukum yang meliputi aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berlaku dalam menyelenggarakan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya diamanatkan bahwa dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum akan diadakan usaha-usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam bentuk pembaharuan hukum, antara lain dengan mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan kerja keras dari kalangan masyarakat hukum, terutama dari kalangan pembentuk undang-undang/legislator, teoritis, maupun kalangan praktisi hukum.

Pada akhir PJP II keadaan yang diinginkan di bidang pembangunan hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum juga mengacu kepada Wawasan Nusantara yang mengandung pengertian bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Mantan Menteri Kehakiman RI Ismail Saleh pernah mengemukakan bahwa ada tiga dimensi atau tahap pembangunan hukum nasional, yaitu dimensi pemeliharaan hukum, dimensi pembaharuan hukum, dan dimensi penciptaan hukum¹⁾.

1) Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Halaman 327.

Pembaharuan hukum yang sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia menurut Muladi, didasarkan beberapa alasan, yaitu:

Dari sudut politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Dari sudut sosiologis bahwa nilai-nilai sosial budaya dari suatu bangsa mendapat tempat dalam pengaturan di hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari pandangan kolektif dalam masyarakat. Dari sudut praktis bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum yang menjajahnya dalam bentuk bahasa aslinya dan kemudian banyak tidak dimengerti oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan karena biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan, sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan²⁾.

Selanjutnya Muladi di dalam Kata Sambutan Buku I Made Widnyana (1993) **Kapita Selekta Hukum Pidana Adat**, menegaskan bahwa hukum nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya bangsa dan diintegrasikan dengan ideologi nasional, serta diadaptasikan dengan perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab, akan merupakan hukum yang kokoh baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Dalam melakukan pembangunan hukum nasional beberapa pakar mengemukakan saran dan pendapatnya, antara lain Ismail Saleh mengemukakan bahwa ada tiga komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Komponen norma hukum dan perundang-undangan; (2) Komponen aparat penegak hukum; dan (3) Komponen kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief ada lagi komponen yang sangat

2) Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Bandung: Alumni, 1985, Halaman 1.

penting dan patut mendapat perhatian yang merupakan komponen keempat, yaitu komponen pendidikan hukum, khususnya pendidikan tinggi hukum³⁾.

Seterusnya dijelaskan bahwa pendidikan tinggi hukum di samping menyelenggarakan pendidikan hukum profesional juga dituntut mengemban tugas keilmuan dan tugas nasional yaitu melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum nasional. Dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum nasional, kajian terhadap ilmu hukum pidana positif saja belum cukup karena hukum pidana positif di Indonesia belum mapan dan belum mantap, maka perlu dikembangkan kajian kritis dan kajian alternatif (politik hukum pidana, perbandingan hukum pidana, kajian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, antara lain hukum pidana tidak tertulis atau hukum adat pidana) sejak dini mulai di tingkat S1⁴⁾.

Pembangunan hukum pidana tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, tetapi mencakup pula pembangunan substansial; yang berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni berupa sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya suatu sistem hukum⁵⁾.

3) Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FHUK UNDIP, Semarang, 1994, Halaman 2.

4) Ibid, Halaman 10.

5) Muladi, Op. cit, Halaman 4.

Dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana dan upaya pembaharuan hukum nasional perlu adanya usaha penggalian dan pengkajian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (hukum tidak tertulis/hukum adat) khususnya hukum adat pidana, yang akan membentuk dan membangun serta mewujudkan suatu sistem hukum nasional, termasuk sistem hukum pidana nasional.

Upaya penggalian dan pengkajian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat seharusnya dijadikan suatu kebutuhan yang mendesak, jika memperhatikan sinyalemen Kongres-kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang menyatakan bahwa sistem hukum pidana yang ada selama ini di beberapa negara, yang sering berasal (diimpor) dari hukum asing semasa zaman kolonial, pada umumnya telah usang dan tidak adil (*obsolete and unjust*) serta sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada *diskrepansi* dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian menurut Kongres PBB V merupakan faktor kontribusi terhadap meningkatnya kejahatan (dalam Laporan Kongres disebutkan: *it was a contributing factor to the increase of crime*)⁶⁾. Bahkan dinyatakan bahwa kebijakan pembangunan (termasuk kebijakan di bidang pembangunan hukum) yang mengabaikan nilai-

6) *Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (New York, Departement of International Economic and Social Affairs, United Nations, 1976) dalam Barda Nawawi Arief, Op. cit., Halaman 8.

nilai moral dan kultural, antara lain dengan masih diambilnya/diberlakukannya hukum asing warisan zaman kolonial, dapat menjadi faktor kriminogen. Pernyataan demikian terungkap dari Laporan Kongres PBB VI Halaman 42. Bertolak dari keadaan demikian, Kongres menghimbau agar dilakukan "pemikiran kembali terhadap keseluruhan kebijakan kriminal" ("*to rethink the whole of criminal policy*"), termasuk di bidang kebijakan hukum pidana. "Pemikiran atau peninjauan kembali" berarti menuntut dilakukannya "*reevaluasi, review, reorientasi, reformasi atau reformulasi*". Ini berarti diperlukan upaya-upaya untuk melakukan penggalan hukum. Hal yang menarik dari kecenderungan internasional di dalam melakukan upaya "pemikiran kembali" dan "penggalan hukum" dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah himbauan untuk melakukan "pendekatan yang berorientasi pada nilai" ("*value-oriented approach*"), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan. Jadi terlihat himbauan untuk melakukan "pendekatan humanis", "pendekatan kultural", dan "pendekatan religius" yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan ("*policy-oriented approach*"). Himbauan untuk melakukan pendekatan kultural dan religius, menyebabkan pula adanya perhatian untuk "menoleh", "mengkaji", dan "menggali" sistem hukum atau keluarga hukum ("*law family*") yang bersumber pada nilai-nilai hukum tradisional dan hukum agama⁷⁾.

7) Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. cit. Halaman 327-329.

Jadi sekali lagi dapat dikatakan bahwa upaya penggalian dan pengkajian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat merupakan kebutuhan mendesak dan sekaligus merupakan konsekuensi logis untuk dapat melakukan pembaharuan dan penciptaan hukum nasional. Seperti dikemukakan Barda Nawawi Arief, salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini ialah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dikatakan demikian karena sering dinyatakan, bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama⁸⁾.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan "beban dan amanat nasional", bahkan merupakan "kewajiban dan tantangan nasional". Di samping itu, juga telah merupakan "kesepakatan dan kecenderungan internasional" seperti terlihat antara lain dari Laporan Kongres-kongres PBB (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) yang sebagian telah dikutip di atas. Oleh karena itu sewajarnya pendidikan tinggi hukum juga ikut mengembangkan kajian mengenai nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu⁹⁾.

8) Barda Nawawi Arief, Op. cit. Halaman 21.

9) Ibid, Halaman 23.

Di samping itu, Sunarjati Hartono pernah mengusulkan agar pengadilan-pengadilan negeri juga aktif mengadakan penelitian dan monitoring mengenai hukum adat setempat. Tujuannya bukanlah untuk dalam penerapannya mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional dan memberlakukan peraturan hukum adat setempat, akan tetapi penelitian itu diperlukan untuk mencari unsur-unsur mana yang penting dan dapat kita gunakan untuk “dipilin” atau “dianyam” ke dalam hukum nasional kita. Dengan demikian hukum adat kita tidak hilang, akan tetapi lahir kembali dalam bentuk yang lebih modern, untuk hidup terus sebagai hukum nasional kita. Kiranya harmonisasi hukum adat seperti ini ke dalam hukum Indonesia modern adalah sesuai dengan petatah-petitih Minangkabau yang berbunyi : *“sakali aia gadang sakali tapian baranjak; sakali aia dalam sakali kasiak barubah; adat dipakai baru baju dipakai usang; usang-usang dipahami lapuak-lapuak dikajangi; nan elok dipakai nan buruak dibuang; kok singkek diuleh panjang bakarek nan umpang disisik; alam takambang jadi guru”*¹⁰⁾.

Pada umumnya penelitian-penelitian hukum adat yang selama ini dilakukan lebih banyak terfokus pada aspek keperdataannya. Berdasarkan hal tersebut Barda menghimbau agar aspek-aspek kepidanaan dari hukum adat/ hukum yang hidup di dalam masyarakat juga perlu digalakkan dan mendapat perhatian yang sewajarnya. Patut pula dicatat, bahwa perlunya penelitian terhadap aspek-aspek kepidanaan dari hukum yang hidup tidak

10) Sunarjati Hartono, **Pengembangan Hukum Kebiasaan**, Seminar Hukum Nasional Buku I, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1994, Halaman 246.

hanya untuk kepentingan pembaharuan hukum pidana nasional, tetapi juga untuk kepentingan pendidikan tinggi hukum dan praktek penegakan hukum pidana di Indonesia ¹¹⁾.

Menurut Muladi, hukum pidana Indonesia harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia¹²⁾. Sedangkan jika diperhatikan dengan seksama hukum pidana (KUHP) yang selama ini diberlakukan dan diajarkan bukanlah hukum pidana yang berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grundnorm*) dan kenyataan (socio-politik, socio-ekonomi, dan socio-budaya) yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Dikatakan demikian karena KUHP (*WvS/Wetboek van Strafrecht*) adalah warisan zaman kolonial Belanda yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Walaupun UU Nomor 1 Tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan-peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial, yang ketentuan-ketentuannya dirumuskan berdasarkan pada keadaan dan nilai-nilai kehidupan serta asas-asas hukum yang ada di Belanda.

11) Barda Nawawi Arief, **Permasalahan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia**, Bahan Ceramah pada Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum, FHUK UNDIP, 5-9 Desember 1994 di Hotel Kencana Bandung, Hal. 7, 10, dan 11.

12) Muladi, **Proyeksi Hukum Pidana Materiel di Indonesia Dimasa Datang**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, FHUK UNDIP, Semarang, 1990, Halaman 15.

Sedangkan bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai kehidupan masyarakat, keadaan serta asas-asas hukum sendiri, sehingga jika dicermati masih terdapat ketentuan dalam KUHP yang kurang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan asas-asas hukum bangsa Indonesia tersebut.

Hukum adat merupakan sistem hukum yang menunjukkan perbedaan dengan sistem hukum lainnya di dunia. Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan jiwa, kepribadian masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu aspek harta budaya bangsa dalam bidang hukum.

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis di dalam UUD 1945 menempati posisi yang sangat strategis, hal mana tersirat dalam Penjelasan UUD 1945 yang berbunyi; Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Menurut I Gusti Ketut Sutha, kalau dilihat lebih mendalam lagi tampak nilai-nilai hukum adat yang bersifat mendasar tercermin juga dalam UUD 1945, sebagaimana terlihat dalam pokok-pokok pikiran dari Pembukaan UUD 1945 itu sendiri, pokok-pokok pikiran mana merupakan cerminan dari Pancasila ¹³⁾.

Hukum adat pidana adalah hukum yang hidup (*the living law*) diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang

13) I Gusti Ketut Sutha, **Peranan Hukum Adat sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Pembangunan Masyarakat**, dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung: Eresco, 1995, Halaman 234.

dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberi reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya ¹⁴⁾.

Keinginan dan usaha untuk melakukan penggalian dan pengkajian terhadap hukum tidak tertulis (hukum adat/hukum adat pidana) sudah cukup banyak dikemukakan di Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat/hukum adat pidana dalam pengembangan hukum Nasional, seperti jelas terungkap di dalam berbagai pertemuan ilmiah, forum pendapat umum/wakil-wakil rakyat, dan juga tertuang di dalam berbagai perumusan kebijakan dan perundang-undangan, antara lain:

1. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke-I Tahun 1963

a. Resolusi Butir IV:

“Yang dipandang sebagai perbuatan jahat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam KUHP Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan”.

b. Resolusi Butir VIII:

“Unsur-unsur hukum agama dan hukum adat dijalinkan dalam KUHP”.

14) I Made Widnyana, **Kapita Selektta Hukum Pidana Adat**, Bandung: Eresco, 1993, Halaman 3.

2. Laporan Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979

Dalam Laporan Sub B II mengenai "Sistem Hukum Nasional", dinyatakan:

- a. Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.

- e. Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari Hukum Nasional.

- f. Hukum Nasional dibina ke arah unifikasi dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat

3. Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980

Dalam laporan angka II antara lain dinyatakan:

- 1.5. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal yang mencerminkan aspirasi Nasional

Dalam hubungan ini maka proses pembaharuan tersebut haruslah melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam tentang:

- 1.5.1.

- 1.5.2. Hukum pidana adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia, serta

- 1.5.3.

4. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14/1970)

- Pasal 23 (1):

“Segala putusan pengadilan haruslah memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis”.

- Pasal 27 (1):

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup”.

5. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 Pasal 5 ayat (3) Sub b yang berbunyi:

Hukum materiel sipil dan untuk sementara waktu pun hukum pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula orang itu, dengan pengertian: bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam kitab hukum pidana sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu hukuman pengganti yaitu bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum, dan bilamana hukuman adat yang dijatuhkan menurut pikiran hakim melampaui padanannya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi-tingginya 10 tahun penjara dengan pengertian bahwa hukum adat menurut paham hakim tidak selaras lagi seperti tersebut di atas dan suatu perbuatan menurut hukum yang ada bandingannya dalam kitab hukum pidana sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

6. Seminar Hukum Nasional VI Tahun 1994

Dalam laporan sub B.3 tentang hukum kebiasaan antara lain dinyatakan:

3.1. Hukum kebiasaan mengandung dua pemahaman.

3.1.1. Dalam arti: identik dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat.

3.2. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting dalam kehidupan hukum nasional.

3.3. Belum adanya kriteria yang jelas tentang hukum kebiasaan khususnya dalam penegakan hukum mendorong terbentuknya sikap dan budaya hukum yang sangat legistis dalam PJP I yang cenderung mengidentifikasikan hukum dengan undang-undang.

3.4. masyarakat hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menghormati hukum kebiasaan sebagai sumber hukum di samping undang-undang dan yurisprudensi tetap.

3.6. Dilakukan penelitian hukum adat yang diarahkan untuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional.

Bertitik tolak dari hal-hal di atas, maka konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1999/2000 berupaya memberi tempat kepada eksistensi hukum adat/adat pidana. Hal ini terlihat pada Pasal 1 yang menegaskan, bahwa:

- (1) Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap perbuatan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku ketentuan pidana dalam Pasal 93.

Pasal 1 tersebut di atas selain merupakan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat pidana, juga merupakan perluasan asas legalitas dari yang bersifat formal (seperti dalam Pasal 1:1 KUHP) ke asas legalitas yang bersifat materiel yang memberi kemungkinan kepada hukum yang hidup (hukum yang tidak tertulis) sebagai sumber hukum pidana.

Perluasan asas legalitas di dalam konsep memberikan rangsangan dan motivasi untuk mengungkap berbagai hukum adat pidana yang ada di Indonesia seperti Hukum Adat Pidana Bali, Lampung, Palembang, Jawa, Bugis, Minangkabau, dan lain-lain.

Dalam kenyataan masyarakat Indonesia, keberadaan ketentuan adat delik masih dirasakan sebagai suatu kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Berbagai macam ketentuan adat delik yang diakui oleh masyarakat, sebagai suatu perbuatan yang akan mendapat reaksi masyarakat bila dilakukan/tidak dilakukan, namun yang perlu digali dan diketahui adalah kesamaan kaidah-kaidah/norma-norma serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Dari berbagai kesamaan asas dan norma itulah, setelah dikaji dan diuji oleh nilai-nilai nasional yaitu nilai-nilai Pancasila, dapat kiranya diangkat menjadi asas-asas dan norma hukum positif nasional.

Masyarakat Indonesia, diakui secara sosiologis memiliki kemajemukan baik dari segi bangsa/suku bangsa maupun bahasa, dimana setiap suku bangsa mempunyai hukum adat (hukum adat pidana) dan budaya sendiri-sendiri. Minangkabau merupakan salah satu dari mata rantai kemajemukan bangsa Indonesia tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, hukum adat pidana di tiap-tiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap perlu diteliti dan digali, dimana pada kesempatan ini secara spesifik penulis akan meneliti dan menggali “Eksistensi Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat, Praktek Penegakan Hukum, dan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, sebagai bahan penulisan thesis.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian pada Pendahuluan di atas, maka permasalahan yang akan dijadikan sebagai pokok kajian dalam penelitian ini untuk diungkapkan, dibahas dan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau?
2. Seberapajauh eksistensi Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam kehidupan masyarakat dan dalam praktek penegakan hukum saat ini?
3. Seberapajauh Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dapat memberikan masukan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

Pokok permasalahan di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: Permasalahan Pertama, berdasarkan permasalahan ini akan dikaji antara lain: (1) Apa saja kaidah-kaidah pidana yang diatur dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau? (2) Bagaimana bentuk sanksi pada Hukum Adat Pidana Minangkabau? (3) Bagaimanakah asas-asas yang terkandung dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau tersebut? (4) Bagaimanakah penyelesaian kasus-kasus Hukum Adat Pidana di Daerah Sumatera Barat? dan (5) Mengkaji/meneliti perbandingan Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dengan sistem hukum pidana menurut WvS/KUHP. Permasalahan Kedua,

berdasarkan permasalahan ini peneliti bermaksud mengkaji implementasi/aplikasi Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam realitanya. Sistem hukum adat pidana “yang dikaji, dapat meliputi aspek substansinya, aspek strukturnya (antara lain lembaga kerapatan adat), atau aspek budaya hukumnya”. Permasalahan Ketiga, berdasarkan permasalahan ini peneliti mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang dapat disumbangkan dalam upaya penyusunan KUHP yang baru.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada Pendahuluan yang kemudian dirumuskan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat ditetapkan adalah untuk:

1. Mengetahui dan mengungkapkan Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau;
2. Mengetahui dan mengungkapkan eksistensi Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam kehidupan masyarakat, dan dalam praktek penegakan hukumnya;
3. Mengetahui eksistensi dan relevansi Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis menjadi pengetahuan atau wawasan para praktisi hukum pidana dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya yang terkait dengan orang Minang yang berada di wilayah Sumatera Barat. Kemudian diharapkan juga dapat berguna sebagai bahan masukan bagi para penyempurna KUHP di masa-masa yang akan datang.

Disamping itu secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan para akademisi hukum, serta menambah khazanah bacaan di bidang Ilmu Hukum Pidana.

E. Kerangka Teori

Hukum atau norma hukum sebagai pedoman bagi manusia untuk berbuat atau tidak berbuat, mempunyai akibat hukum apabila normanya tidak ditaati atau dilanggar. Setiap bangsa mempunyai hukum sendiri dan sebagaimana halnya dengan bahasa, maka hukum pun hidup dan diciptakan masyarakat, karena hukum merupakan kehidupan dari bangsa itu sendiri ¹⁵⁾.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, bahwa tiap hukum merupakan sistem, artinya kompleks norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud pengejawantahan dari pada kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat. Dan untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia ¹⁶⁾.

Nilai-nilai yang ada dan diakui masyarakat harus melekat dalam aturan-aturan hukum pidana yang akan diberlakukan dalam masyarakat.

15) Hermin Hadiati Koeswadi, **Aspek Budaya dalam Pemidanaan Delik Adat**, Makalah dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana, Denpasar, 17-19 Maret 1975, Halaman 6.

16) Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, Jakarta: Haji Masagung, 1990, Halaman 68.

Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat akan berlaku efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai itu dapat diukur dan dilihat dari asas-asas hukum adat pidana dalam masyarakat.

Asas-asas hukum dapat berfungsi di dalam maupun di luar hukum positif, oleh karena asas hukum itu berisi ukuran nilai-nilai, sebagai ukuran nilai-nilai asas hukum mempunyai aturan tertinggi dari sistem hukum positif¹⁷⁾.

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri¹⁸⁾. Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengemukakan pula, bahwa hukum adat merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat, sehingga ia merupakan faktor yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan maupun penerapan hukum di Indonesia¹⁹⁾.

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya akan percuma juga, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana

17) Roeslan Saleh, **Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana**, Diktat, tanpa tahun, Halaman 3.

18) Soepomo, **Bab-bab Tentang Hukum Adat**, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1989, Halaman 3

19) Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Bandung: Alumni, 1979, Halaman 102.

adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan²⁰⁾.

Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Dan reaksi-reaksi adat itu merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat²¹⁾.

Pembaharuan hukum pidana dimaksudkan untuk membentuk hukum pidana nasional yang berdasarkan pada nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Sunarjati Hartono, bahwa:

Hukum nasional yang akan kita bentuk bersama ini merupakan suatu cara untuk mengatur tindak-tanduk manusia Indonesia, melalui saluran-saluran atau lembaga-lembaga hukum yang telah tersedia dan/atau dapat diadakan, sesuai dengan falsafah hidup kita itu, yaitu Pancasila. Karena Pancasila itu antara lain juga digali dari hukum adat yang sesungguhnya tidak lain dari pada hukum nasional kita yang bersama-sama kita bentuk itu harus berakar pada hukum adat itulah²²⁾.

Usaha pembaharuan itu tidak saja timbul, melainkan didorong oleh perubahan dalam masyarakat yang terjadi sesudah perang dunia, dan untuk negara-negara yang baru timbul juga karena ada perubahan di bidang ketatanegaraan. Bukankah hukum pidana itu seharusnya merupakan

20) Hilman Hadikusumo, **Hukum Pidana Adat**, Bandung: Alumni, 1979, Halaman 19.

21) Soerojo Wignjodipoero, *Op. cit.*, Halaman 228-229.

22) Sunarjati Hartono, **Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat**, Bandung: Alumni, 1979, Halaman 16

pencerminan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan? Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberikan sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat itu. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan. Tidak salah kiranya kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu ²³⁾.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini dapat digolongkan sebagai pendekatan yuridis normatif yang ditunjang data empiris. Penggunaan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menemukan, mengetahui dan mengungkapkan Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat serta relevansinya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan sebagai permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena titik tolak pertama penelitian ini adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif yang terdapat pada Hukum Adat Pidana Minangkabau, baik dari sumber yang telah didokumentasikan pada

23) Sudarto, **Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia**, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FHUK UNDIP, Semarang, Cet. II, 1976, Halaman 2.

Tambo Adat Alam Minangkabau atau dokumen-dokumen lainnya, maupun informasi lisan dari narasumber yang menguasai Adat Minangkabau.

Disamping itu, melalui pendekatan ini dapat digali asas-asas, latar belakang pemikiran penetapan sanksi dan nilai-nilai universal yang terkandung di dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau, melalui perbandingan dengan asas-asas hukum ataupun nilai-nilai universal hukum adat pidana lainnya dan teori-teori hukum yang relevan.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penyusunan hasil penelitian nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan dan menganalisa Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau, eksistensi Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam praktek penegakan hukum, serta eksistensi dan relevansi Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Jenis-jenis penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

a. Penelitian Inventarisasi Hukum

Inventarisasi hukum merupakan kegiatan pendahuluan dan bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum adat pidana dan menemukan kaedah-kaedah Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, ada tiga kegiatan pokok dalam melakukan penelitian yaitu: Pertama, penetapan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai norma

hukum positif dan norma sosial bukan hukum, selanjutnya melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi, dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komprehensif (menyeluruh)²⁴⁾.

b. Penelitian Terhadap Asas-asas Hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaedah-kaedah yang telah diinventarisasi pada penelitian sebelumnya. Dalam hal ini Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian terhadap asas-asas hukum dapat pula dilakukan dalam bidang hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Tetapi karena penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan, maka yang dianalisis adalah hukum adat yang tercatat atau yang didokumentasikan. Hukum adat yang tercatat lazim dicatat ialah tingkah laku teratur dalam bidang-bidang hukum tertentu. Peneliti lebih dahulu harus mengabstraksikan tingkah laku-tingkah laku teratur itu, sehingga menjadi norma-norma hukum dan dari norma hukum itu dicari asas-asas hukumnya²⁵⁾.

3. Sumber Data

- a. Data sekunder berupa buku Tambo Adat Alam Minangkabau dan buku/dokumen adat Minangkabau lainnya serta literatur-literatur tentang hukum adat pidana khususnya dan ilmu hukum pada umumnya.
- b. Data primer berupa hasil penelitian di lapangan untuk melengkapi data sekunder, terutama dalam bentuk wawancara dengan tokoh-tokoh adat

24) Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, Halaman 13.

25) Ibid, Halaman 20.

Minangkabau, seperti: Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Ketua-ketua LKAAM beberapa Daerah Tingkat II, dan beberapa orang Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta penghulu kaum di wilayah Sumatera Barat.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif, guna mengungkap informasi-informasi yang diperoleh dari *key informan* yaitu: Tetua-tetua adat (di Sumatera Barat: Ketua-ketua Kerapatan Adat Nagari dan Penghulu-penghulu Kaum), tokoh-tokoh masyarakat adat dan para pihak yang terlibat dalam adat delik di lokasi penelitian.

Hasil pengolahan data tersebut selanjutnya dikaji dengan mengacu pada penilaian-penilaian normatif yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

G. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian hasil penelitian ini disusun dalam empat bab, yang diawali dengan Bab I (Pendahuluan) ini.

Setelah Bab Pendahuluan, dikemukakan landasan teoritis yang merupakan sumber dan landasan untuk menganalisa masalah yang akan dibahas, untuk itu dalam Bab II Tinjauan Pustaka diungkapkan tentang Pengertian Hukum Adat Pidana, Relevansi Hukum Adat dalam Upaya Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia dan Eksistensi Hukum Adat Pidana di Indonesia.

Kemudian Bab III Hasil Penelitian dan analisis atau pembahasan tentang Gambaran Umum Adat Alam Minangkabau, Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau, Eksistensi Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat dan Praktek Penegakan Hukum, Eksistensi dan Relevansi Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Terakhir thesis hasil penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran, yang merupakan sari dari keseluruhan hasil penelitian ini, yang ditampilkan dalam Bab IV Penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat Pidana

Berbicara mengenai hukum adat pidana, tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang hukum adat secara keseluruhan. Dikatakan demikian karena sifat dari hukum adat itu sendiri tidak memisah-misahkan ataupun memberikan penggolongan secara tegas terhadap hukum sebagaimana halnya hukum barat.

Kalau kita perhatikan, hukum adat itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam arti tidak terpisah-pisah. Diperhatikan lebih jauh lagi, sebenarnya masyarakat adat tidak mengenal pembagian hukum adat ke dalam beberapa bidang seperti hukum adat pidana, hukum adat perdata, hukum adat perkawinan, hukum adat waris dan lain-lain sebagainya itu. Namun pembagian tersebut dilakukan oleh ahli-ahli hukum untuk memudahkan di dalam mempelajarinya dan juga disebabkan oleh perkembangan ilmu hukum yang membagi hukum ke dalam beberapa bidang diantaranya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum lingkungan, hukum administrasi negara dan lain-lainnya.

Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro, bahwa sistem hukum adat sesungguhnya tidak mengenal pembagian hukum dalam dua golongan: hukum privat/sipil dan hukum publik. Pembagian yang demikian ini adalah karena diintrodusir oleh para sarjana hukum barat (Belanda) yang memiliki sistematik hukum yang

melandaskan pada penggolongan yang demikian itu ¹⁾.

Sejalan dengan pernyataan di atas Iman Sudiyat juga mengemukakan bahwa hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di lapangan pidana (di muka Hakim Pidana) dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan perdata (di muka Hakim Perdata). Berhubung dengan itu, di dalam sistem Hukum Adat tidak ada perbedaan antara (*procedure*) dalam hal penuntutan secara perdata (sipil) dan penuntutan secara kriminal ²⁾.

Istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab *huk'm* dan *adah*. Hukum (jamaknya *Ahkam*) artinya suruhan atau ketentuan. *Adah* artinya kebiasaan yaitu prilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah hukum kebiasaan ³⁾.

Di Indonesia istilah hukum adat pertama kali digunakan oleh Snouck Hurgronje dengan istilah Belanda "*adat recht*" dalam bukunya "*De Atjehers*", kemudian dipopulerkan oleh Van Vollenhoven sehingga menjadi ilmu pengetahuan hukum adat.

Selanjutnya istilah hukum adat dijumpai antara lain: dalam Pasal 134 IS (*Indische Staatsregeling*) Pasal 146 UUD RIS, Pasal 104 UUD Sementara. Namun dalam Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 1964 jo Pasal 23 ayat UU

-
- 1). Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat**, Jakarta: Haji Masagung, 1990. Halaman 18.
 - 2). Iman Sudiyat, **Hukum Adat**, Yogyakarta: Liberty, 1978. Halaman 201.
 - 3). Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Bandung: Mandar Maju, 1992. Halaman 8.

Nomor 14 Tahun 1970 (UU Pokok Kekuasaan Kehakiman) memakai istilah hukum tidak tertulis yang meliputi hukum adat dan hukum kebiasaan. Sebenarnya hukum adat itu ada juga yang tertulis tetapi hanyalah sebahagian kecil saja.

Di Eropa (Belanda) hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yang disebut "*gewoonte recht*" yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wetten recht*). Tetapi di dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah "adat" dan "kebiasaan" itu dibedakan sehingga "hukum adat" tidak sama dengan "hukum kebiasaan".

Kebiasaan yang dibenarkan atau diakui didalam perundangan merupakan hukum kebiasaan, sedangkan "Hukum Adat" adalah hukum kebiasaan di luar perundangan ⁴⁾.

Pada umumnya di kalangan masyarakat daerah (masyarakat awam), tidak membedakan antara hukum adat dan adat. Antara kedua istilah itu diartikan sama saja dan istilah yang banyak digunakan adalah istilah "adat" bukan kata "hukum adat". Jadi dengan mengatakan adat berarti meliputi "hukum adat", baik adat tanpa sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi ⁵⁾.

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang bersifat tradisional dan dianggap sakral karena merupakan kehendak dan warisan nilai budaya dari nenek moyang dan para leluhur yang dihormati masyarakat dan karena itu ditaati dan dipertahankan oleh para penguasa dan pemuka-pemuka

4) Ibid, hal. 9.

5) Ibid, hal. 10.

masyarakatnya. Namun hukum adat itu tidak bersifat statis karena sebagai hukum yang hidup (*the living law*) di dalam masyarakat dia tumbuh dan berkembang seiring dengan adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat dan karena itu bersifat luwes (*flexibel*). Sedangkan hukum kebiasaan adalah kebiasaan yang diakui masyarakat dan pengambil keputusan (*decision maker*) sehingga lambat laun menjadi hukum (*gewoonte recht, customary law*).

Perbedaannya dengan hukum adat terletak pada sifatnya yang tidak bercorak khas pribumi tetapi timbul akibat terjadinya hubungan dengan dunia luar dengan bertemunya kebudayaan timur dan barat ⁶⁾.

Sampai saat ini tampaknya belum ada kesepakatan mengenai pengertian istilah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hal ini antara lain masih terlihat di dalam Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta bulan Juli 1994. Ada pendapat bahwa kedua istilah itu identik, tetapi ada pula yang berpendapat tidak identik, karena hukum adat itu lebih menunjukkan pada hukum yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat (sebelum proklamasi kemerdekaan) sedangkan hukum kebiasaan lebih merupakan hukum yang berkembang setelah proklamasi kemerdekaan. Walaupun mungkin ada perbedaan pengertian kedua istilah tersebut di atas, namun menurut Barda secara substansial ada keterjalinan erat antara berbagai istilah itu ⁷⁾.

-
- 6) Purwoto S. Ganda Subrata, Simposium tentang Integrasi Hukum Adat ke dalam Hukum Nasional selama 50 Tahun Terakhir, Jakarta: BPHN Dep. Kehakiman, 9-10 Januari 1995, Halaman 4-5.
 - 7) Barda Nawawi Arief, Permasalahan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. Bahan Ceramah pada Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum, FHUK UNDIP, 5-9 Desember 1994 di Hotel Kencana Bandung, Halaman 6.

Semenjak hukum adat menjadi ilmu pengetahuan muncullah beberapa pengertian mengenai hukum adat baik oleh sarjana barat maupun oleh sarjana Indonesia ⁸⁾, antara lain:

- a. Prof. Dr. C. Van Vollenhoven: Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).
- b. Prof. Dr. B. Ter Haar Bzn: Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.
- c. Prof. Mr. F.D. Holleman sependapat dengan Van Vollenhoven, bahwa norma-norma hukum adalah norma-norma hidup yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah terhadap norma itu telah pernah ada atau tidak adanya keputusan petugas hukum.
- d. Prof. Dr. J.H.A. Logeman cenderung setuju pada pendapat Van Vollenhoven dan tidak sepenuhnya setuju pada pendapat Ter-Haar. Hukum adat tidak mutlak sebagai hukum keputusan. Norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama, yang

8). Lihat: Hilman Hadikusuma, *Opcit*, Hal 12-22.

merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata bahwa ada suatu norma yang berlaku maka norma itu tentu mempunyai sanksi ialah berupa sanksi apapun dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Orang dapat menganggap bahwa semua norma yang ada sanksi itu ke semuanya adalah norma hukum. Ia tidak sependapat bahwa adat itu baru merupakan hukum adat apabila sudah dimasukkan ke dalam keputusan hakim. Walaupun keputusan hakim itu merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan mana yang merupakan hukum adat dan mana yang adat saja.

- e. E. Adamson Habel seorang ahli anthropologi hukum Amerika Serikat mengemukakan: "Tidak semua kebiasaan itu bersifat hukum, diantara ciri apakah kebiasaan (adat) itu bersifat hukum ialah adanya "sanksi sosial" baik yang bersifat positif (pengukuhan) maupun yang negatif (ancaman). Sanksi yang bersifat penguat atau pengukuhan ialah misalnya berupa pujian kehormatan, tanda jasa, medali, piagam, sedangkan yang bersifat ancaman seperti alis naik, bibir keriting, ejek cela, ditertawakan, telinga dijiwir, tidak diundang makan, disisihkan dari pergaulan, diboikot sumber pencarian, siksaan tubuh, dikurung atau dibuang. Dengan adanya sanksi-sanksi itu maka norma sosial menjadi norma hukum."
- f. Prof. Dr. R. Soepomo: Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil

hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Selanjutnya Soepomo mengemukakan, "Dalam tata hukum baru Indonesia, baik kiranya guna menghindarkan kebingungan pengertian istilah "hukum adat" ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*). Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi dan lain-lain), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judgemade law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota maupun di desa-desa (*customary law*) semua ini merupakan "hukum adat" atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh Pasal 32 UUD Sementara tersebut."

- g. Prof. Dr. Soekanto mengemukakan, "Dilihat dari mata seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang (*wetboekjurist*) memang hukum keseluruhannya di Indonesia tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas, akan tetapi apabila mereka sungguh memperdalam pengetahuannya mengenai hukum adat tidak hanya

dengan pikiran (*rechtsbegrip, rechtsvertand*) tetapi dengan penuh perasaan (*rechtsgevoel*) pula, mereka melihat suatu sumber yang mengagumkan, adat istiadat dahulu dan sekarang, adat istiadat yang hidup, adat istiadat yang dapat berkembang adat istiadat yang berirama (*poezie van het recht*). Jika kita menyelidiki adat istiadat ini terdapat peraturan-peraturan yang bersanksi, kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum. Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodificeerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*) mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*)."

- h. Prof. Dr. Mr. Hazairin: Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
- i. Prof. Mr. M.M. Djojodigono: Sesungguhnya hukum itu bukanlah suatu phenomenon yang tegar (*statis*) seperti halnya rangkaian ugeran, melainkan karya manusia, suatu hal yang hidup dalam arti berangkap dua, ia dapat berkembang (*berevolusi*) dan dapat bervariasi (*plastis*) tegasnya dapat menyelesaikan hal yang berbeda diantara hak dan kewajiban dalam peristiwa yang serupa, itulah yang saya maksud hukum yang hidup (*living law*). Hukum adat jika dilawan dengan hukum perundangan (*hukum kodifikasi*) maka hukum adat itu adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan.

- j. Prof. Mr. Soedirman Kartohadiprodjo: Hukum adat berbeda dengan hukum tidak tertulis. Memang hukum adat itu berbentuk tidak tertulis tetapi tidak dapat dilupakan bahwa dunia pemikiran (*denkstructuur*) yang menjadi dasar hukum adat adalah jauh berlainan dari hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 AB. Istilah hukum adat tidak tertulis lebih luas artinya dari hukum adat, oleh karena hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang mempunyai dasar pemikiran yang khas, yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari pikiran hukum barat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa para ahli hukum adat membagi hukum adat dalam beberapa bidang dengan tujuan agar mudah mempelajarinya dan juga sebagai pengaruh dari perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Dalam bidang hukum adat pidana di kalangan para ahli muncul berbagai istilah ada yang menyebut hukum adat pidana, hukum pidana adat, hukum adat delict, hukum delict adat. Kesemuanya itu kalau diperhatikan mengandung pengertian yang sama, namun demikian ditinjau dari segi pemakaian bahasa Indonesia yang baku penggunaan istilah "hukum adat pidana" sesuai dengan kaidah (pola) "diterangkan dan menerangkan" yang

dikenal dengan pola “DM”. Penulis setuju dengan istilah tersebut dan untuk keseragaman dalam tulisan ini penulis memakai istilah hukum adat pidana.

Hukum adat pidana adalah hukum yang hidup (*the living law*) diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberi reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya⁹⁾.

Menurut Wignjodipoero, hukum adat pidana adalah:

“Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Dan reaksi-reaksi adat itu merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat¹⁰⁾.

Selama perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan terhadap keseimbangan dalam masyarakat, baik peristiwa atau perbuatan itu “legal” atau “illegal”, maka peristiwa atau perbuatan itu adalah melanggar hukum.

9) I Made Widnyana, **Kapita Selektia Hukum Pidana Adat**, Bandung: Eresco, 1993, Halaman 3.

10) Soerojo Wignjodipoero, *Opcit.* Halaman 228-229.

Begitu pula tidak dibedakan apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum adat atau hukum agama atautkah ia bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan¹¹⁾.

Selanjutnya Hilman mengemukakan:

“Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya akan percuma juga, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan.”¹²⁾

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat pidana tersebut mengandung beberapa pengertian:

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri.
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma adat.
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan, karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

11) Hilman Hadikusumo, **Hukum Pidana Adat**, Bandung: Alumni, 1989. Halaman 9.

12) Ibid, Halaman 10

Di dalam hukum adat sanksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelakunya, tapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya/keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya saja dengan jalan upacara selamatan desa dan lain-lain ¹³⁾.

B. Relevansi Hukum Adat dalam Upaya Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia

GBHN tahun 1993 mengamanatkan bahwa dalam rangka memantapkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional. Penyusunan dan Perencanaan Hukum Nasional harus dilakukan secara terpadu dalam sistem hukum nasional.

Pelita VI menggariskan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Pada akhir PJP II keadaan yang diinginkan di bidang pembangunan hukum adalah terbentuk dan berfungsinya hukum nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan mantapnya wibawa hukum. Pembangunan hukum juga mengacu kepada Wawasan Nusantara, yang mengandung pengertian bahwa seluruh kepulauan Nusantara

13) Ibid, Halaman 14.

merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Upaya pembangunan hukum nasional haruslah diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk memperkembangkan hukum ke arah terbentuknya suatu tata hukum nasional. Hal demikian adalah didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang publik maupun perdata yang mencerminkan kepribadian jiwa maupun pandangan hidup bangsa tersebut ¹⁴⁾.

Menurut Hidjazie Kertawidjaja, hukum nasional ialah suatu bentuk hukum yang berlaku di negara kita yang memiliki ciri dan syarat antara lain:

1. Memiliki kepribadian sendiri, yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Mengutamakan kesatuan dan persatuan hukum.
3. Isinya atau jiwanya harus sesuai dan seirama dengan kesadaran serta hajat kehidupan hukum bangsa Indonesia.
4. Harus berlandaskan pada dan tidak boleh bertentangan dengan dasar filsafat negara kita Pancasila serta Undang Undang Dasarnya ¹⁵⁾.

Menurut Muladi, hukum Nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial budaya bangsa dan diintegrasikan dengan ideologi nasional serta diadaptasikan dengan perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab akan

14) Subekti, **Bunga Rampai Ilmu Hukum**, Bandung: Alumni, 1977. Halaman 57.

15) Mohammad Hidjazie Kertawidjaja, **Pembentukan Hukum Nasional, Suatu Sumbangan Pikiran atas permintaan LIPI**, 1973 dalam Abdurrahman, **Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional**, Bandung: Alumni, 1978. Halaman 31.

merupakan hukum yang kokoh baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis¹⁶⁾.

Dalam upaya pembangunan sistem hukum nasional tersebut menurut Ismael Saleh ada 3 dimensi atau tahap yaitu: dimensi pemeliharaan hukum, dimensi pembaharuan hukum dan dimensi penciptaan hukum¹⁷⁾. Dan pada kesempatan lain, Ismael mengemukakan ada 3 komponen utama yang harus diperhatikan: (1) komponen norma hukum dan perundang-undangan, (2) komponen aparat penegak hukum, (3) komponen kesadaran hukum masyarakat¹⁸⁾.

Pembangunan dan pengembangan sistem hukum Nasional dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Dikatakan demikian karena hukum tidak hanya diartikan sebagai seperangkat “norma/substansi-substansi hukum perundang-undangan” akan tetapi hukum dilihat sebagai suatu “sistem hukum”. Hal ini berarti pembangunan/pengembangan Sistem Hukum Nasional (SHN) meliputi berbagai sektor/subsektor hukum yaitu aspek/sektor “substansi” materi hukum, aspek “struktur hukum” dan aspek budaya hukum¹⁹⁾.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Muladi juga pernah mengemukakan bahwa pembangunan dalam bidang hukum pidana tidak hanya mencakup

-
- 16) I Made Widnyana, **Kapita Selekta Hukum Pidana Adat**, Bandung: Eresco, 1993, Halaman v.
 - 17) Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Halaman 327.
 - 18) Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)**. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FHUK UNDIP, Semarang 1994, Halaman 2.
 - 19) Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Halaman 78.

pembangunan yang bersifat struktural yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam satu mekanisme, tetapi mencakup pula pembangunan substansial, berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni berupa sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya suatu sistem hukum ²⁰⁾.

Dikatakan bahwa Sistem Hukum Nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum, maka semua subsistem hukum harus bersumber atau berinduk pada satu payung filosofis dan konsep/ide dasar yang sama. Dalam hal ini berarti upaya pembangunan/pengembangan, pembaharuan suatu sub sistem hukum tidak dapat dilakukan secara fragmentair terlepas dari perkembangan/pembaharuan subsistem lainnya. Oleh sebab itu harus ada suatu jalinan mata rantai antara prinsip-prinsip, asas-asas yang tertuang di dalam berbagai sub sistem hukum lainnya ²¹⁾.

Kebijakan pembangunan (termasuk kebijakan di bidang pembangunan hukum) yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural dapat menjadi faktor kriminogen ²²⁾. Oleh karena itu sistem hukum nasional hendaknya dibangun dari karakteristik nilai-nilai yang bersumber dan berakar pada aspirasi yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain didasarkan pada keinginan untuk memberikan "identitas Nasional" pada sistem hukum yang berlaku di

20) Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Bandung: Alumni, 1985. Halaman 1.

21) Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* Halaman 85.

22) *Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (New York, Departement of International Economic and Social Affairs, United Nations, 1976) dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 1994, Halaman 8.

Indonesia. Jadi lebih ditekankan pada upaya untuk menggali identitas sistem nilai-nilai hukum dan asas-asas hukum yang hidup di dalam masyarakat. Untuk kemudian dikaji menjadi "identitas (sistem hukum) nasional". Dengan demikian sasarannya lebih ditujukan pada sistem nilai dan asas-asas dari hukum adat/hukum kebiasaan/hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi tidak semata-mata ditujukan pada aspek normatifnya²³⁾.

Hukum nasional yang akan kita bentuk bersama itu merupakan suatu cara untuk mengatur tindak-tanduk manusia Indonesia, melalui saluran-saluran atau lembaga-lembaga hukum yang telah tersedia dan/atau dapat diadakan, sesuai dengan filsafat hidup kita itu, yaitu Pancasila. Karena Pancasila itu antara lain juga digali dari Hukum Adat, yang sesungguhnya tidak lain daripada hukum asli bangsa kita, maka dengan sendirinya hukum nasional kita yang bersama-sama kita bentuk itu harus berakar pada Hukum Adat itulah. Akan tetapi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia abad ke-20 ini hukum Nasional kita harus pula disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang ber-Pancasila dalam abad ke-20 ini, dan selanjutnya harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kita di masa datang²⁴⁾.

Selanjutnya Sunarjati Hartono mengemukakan:

"Kalau tadi dikemukakan, bahwa hukum nasional yang harus kita bentuk bersama itu harus berakar pada Hukum Adat, maka Hukum Adat yang kita kenal sekarang ini dapat diumpamakan sebagai bidang tanah, yang di atasnya harus kita bangun "gedung" Hukum Nasional itu. "Gedung" hukum nasional itu hendaknya merupakan bangunan

23) Barda Nawawi Arief, Op.cit. 1996, Halaman 88.

24) Sunarjati Hartono, **Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat**, Bandung: Alumni, 1979, Halaman 16.

yang kokoh kuat, yang terbuat dari pada bahan "batu", "beton", dan sebagainya; bukan merupakan gubug, yang mudah musnah dimakan api atau gubug yang mudah saja dipindahkan tempatnya ke tempat (yaitu "tanah") yang lain.

Bangunan yang kita namakan Hukum Nasional itu harus merupakan gedung, yang sangat erat hubungannya dengan "tanah" Hukum Adat – tempat ia didirikan, sehingga "tanah" dan "gedung" itu tidak terpisahkan satu sama lain dan menjadi satu, sebagaimana bangunan-bangunan modern yang kokoh-kokoh tidak mudah terpisahkan dari tempat atau tanah tempat bangunan itu didirikan, sebagaimana halnya dengan rumah-rumah kita di masa yang lalu ²⁵⁾.

Hukum adat harus diperhitungkan sebagai kenyataan yang hidup didalam masyarakat. Dengan demikian maka hukum adat merupakan faktor yang turut menentukan baik dalam hal pembentukan maupun penerapan hukum di Indonesia. Dalam hal ini Pancasila disamping merupakan ide yang harus diwujudkan dalam kenyataan, juga berperan sebagai "Realien", yaitu norma dasar yang menjadi alat pengukur atau menyaring mengenai apa yang bisa diterima oleh tata hukum Indonesia ²⁶⁾.

Pembangunan sistem hukum nasional tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, hukum yang hidup di dalam masyarakat karena masyarakat memegang teguh nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pedoman untuk berbuat dan tidak berbuat. Sebagaimana dikemukakan oleh Eugene Ehrlich bahwa hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan "*living law*", mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat ²⁷⁾.

25) Ibid, Halaman 19.

26) Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Bandung: Alumni, 1983, Halaman 124.

27) Soleman B. Taneko, **Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang**, Bandung: Eresco, 1987, Halaman 114.

Selanjutnya dikemukakan oleh Ehrlich bahwa hukum positif berbeda dengan hukum yang hidup (*living law*), hukum positif hanya efektif jika ia selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau pola-pola kebudayaan, pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum tapi justru terletak pada kehidupan masyarakat itu sendiri ²⁸⁾.

Satjipto Rahardjo mengemukakan tentang pengertian hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam kaitannya dengan hukum Nasional ²⁹⁾:

1. Bahwa Hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan pikiran-pikiran dan cita-cita hukum Indonesia.
2. Sejak kemerdekaan, maka lahir hukum nasional yang mencerminkan cita-cita hukum Indonesia dan menjadi sarana masyarakat Indonesia baru untuk menanggulangi masalah-masalah aktual yang dihadapinya, mengantarkannya pada dunia yang dicita-citakan.
3. Hukum Adat sebagai hukum yang hidup, tetap akan ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.

28) Ronny Hanitjo Soemitro, **Permasalahan Hukum Didalam Masyarakat**, Bandung: Alumni, 1984, Halaman 20.

29) Satjipto Rahardjo, **Pengertian Hukum Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*living law*) dan Hukum Nasional**, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, 1976, Hal. 15-25.

Disamping itu perlu juga dicermati kesimpulan yang dihasilkan pada Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 15-17 Januari 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan-pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan peranan Pengadilan dan pembinaan hukum.
2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyuluhan Hukum Nasional pada dasarnya seperti:
 - a. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Pembangunan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan jaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesia.
 - c. Memasukkan konsepsi-konsepsi dan asas-asas Hukum Adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan Hukum Nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan Nasional, merupakan intinya.
4. Dengan terbentuknya Hukum Nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional.

Dalam rangka upaya Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Kajian/penelitian terhadap hukum adat merupakan salah satu langkah/upaya untuk mengisi sistem hukum nasional.

Kalau diperhatikan masing-masing hukum adat mempunyai sistem nilai dan asas-asas yang dapat diangkat menjadi nilai-nilai dan asas-asas hukum Nasional, sehingga sistem hukum nasional yang dibangun betul-betul berasal dari karakteristik nilai-nilai yang bersumber dan berakar pada aspirasi yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam rangka pembangunan dan pembaharuan SHN/SPN (Sistim Hukum Nasional/Sistem Perundang-undangan Nasional) harus ditunjang dengan kajian hukum tidak tertulis, hukum adat, hukum kebiasaan atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kajian demikian diperlukan karena dalam berbagai kesepakatan/kebijakan nasional selama ini dinyatakan, bahwa SHN hendaknya bersumber dari nilai-nilai atau aspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jadi jelas merupakan “beban dan amanat nasional”, bahkan merupakan “kewajiban, tantangan dan kebutuhan nasional”.

C. Eksistensi Hukum Adat Pidana di Indonesia

Berbicara mengenai eksistensi hukum adat pidana di Indonesia tidak akan terlepas dari pembicaraan hukum adat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan sebagaimana telah disinggung pada Bab terdahulu bahwa hukum adat tidak membedakan secara tegas antara perdata pidana dan seterusnya seperti halnya hukum barat.

Didalam hal sejauhmana hukum adat/hukum adat pidana itu diakui sebagai hukum dalam artian yang sesungguhnya, maka perlu dilihat kembali perangkat aturan tertulis yang mengakui keberadaan atau eksistensinya didalam hukum Nasional.

Dengan melihat kepada perangkat aturan tertulis tersebut, setidaknya akan memberi kejelasan bahwa hukum adat/hukum adat pidana tersebut ada dan tetap dijadikan pijakan didalam pembangunan hukum Nasional.

Sebelum Indonesia merdeka yaitu zaman penjajahan Belanda dapat ditemukan pada Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) ayat (1), yang intinya berisi: menetapkan suatu asas, bahwa hukum perdata dan hukum pidana materiil dan formil akan ditulis-tetapkan dalam ordonansi-ordonansi, yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal dengan persetujuan "*Volksraad*". Dan ayat (2) sub b menetapkan suatu pedoman bagi pembentuk ordonansi untuk hukum perdata materiil yang harus diatur bagi orang Indonesia, dan orang Timur Asing. Untuk itu berlaku asas; bahwa hukum adat mereka harus dihormati, dengan beberapa penyimpangan dalam hal:

1. Kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, maka mereka akan ditaklukkan pada perundang-undangan yang berlaku bagi orang Eropah, sekedar kalau perlu diubah atau mereka akan sama-sama dengan orang-orang Eropah ditaklukkan pada peristiwa yang sama.
2. Kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaki atau berdasarkan kepentingan umum, maka pembentuk ordonansi dapat mengadakan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia dan orang Timur Asing atau bagian-bagian tersendiri dari golongan-golongan itu yang bukan hukum adat, bukan juga hukum Eropah, melainkan hukum yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang sendiri³⁰⁾.

Selain pasal di atas masih ada Pasal 21 IS ayat (2), dan Pasal 130 IS yang memberi dasar kedudukan pada hukum adat. Adapun inti dari pasal-pasal itu adalah: Pasal 21 IS ayat (2) menegaskan, bahwa dalam wilayah Kerajaan-

30) Soerojo Wignodipoero, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, Jakarta, Haji Masagung, 1990, Hal. 54.

kerajaan yang diberikan hak swapraja, peraturan perundang-undangan umum (*'algemene ver ordeningen'*) hanya dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di daerah-daerah yang bersangkutan. Dan Pasal 130 Is menegaskan, bahwa diberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia; daerah-daerah tertentu untuk menganut hukumnya sendiri.

Sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, semua peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Membaca naskah Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari Pembukaan, Batang Tubuh sampai kepada Penjelasannya, tidak akan dijumpai aturan mengenai hukum adat. Dengan lain perkataan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menetapkan ketentuan khusus bagi hukum adat. Tetapi bila ditelaah dan dianalisis secara dalam dan menyeluruh, sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 menyiratkan dengan jelas dan tegas perihal keberadaan hukum adat atau hukum asli bangsa Indonesia itu. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan yang mendasar daripada adat kebiasaan bangsa Indonesia.

Yang menjadi indikasi utama bahwa eksistensi hukum adat di Indonesia diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemui didalam Pembukaan pada alinea keempat. Alinea ini menggambarkan tentang tujuan dan prinsip-prinsip dasar dari terbentuknya negara Indonesia.

Secara gamblang alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada lima sila yang dikenal dengan Pancasila. Dan itu berarti bahwa Pancasila adalah cerminan dari kepribadian bangsa, dan kepribadian bangsa itulah yang

sesungguhnya terdiri dari kebiasaan-kebiasaan, kaedah-kaedah, norma-norma tidak tertulis yang telah dianut oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kalanya. Artinya, jika dihimpun didalam satu kata maka itulah yang disebut dengan hukum adat dari bangsa Indonesia.

Pancasila yang terdiri dari lima sila tersebut kalau ditelusuri lebih jauh lagi maka akan didapat suatu kepastian bahwa keabsahan dari tata kebiasaan tidak tertulis itu yang menjadi dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Hal ini telah ditegaskan didalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Yang selanjutnya dikukuhkan lagi dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978.

Kemudian, dalam telaahan yang lebih luas lagi, sebenarnya didalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 telah pula mencerminkan tata kebiasaan dasar tidak tertulis dari bangsa Indonesia yang diakui sebagai landasan perekonomian. Bunyi Pasal 33 ayat (1) selengkapnya adalah:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari kata-kata *berdasar atas asas kekeluargaan* maka itu secara langsung atau tidak memberikan penegasan bahwa itulah yang dimaksud dengan hukum adat yang ada di bumi Indonesia. Sebagai suatu hukum yang telah ada jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk Republik itu sendiri dibentuk.

Dengan demikian maka tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya hukum adat atau tata kebiasaan yang telah dianut secara turun temurun oleh bangsa Indonesia tersebut diakui oleh konstitusi kita. Bahkan dalam artian yuridis pun tata kebiasaan tak tertulis itu menjadi dasar bagi terbentuknya negara Republik Indonesia.

Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa: "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini". Berarti Pasal 131 Is yang mendasari berlakunya Hukum Adat Pidana masih tetap berlaku.

Berdasarkan Peraturan Peralihan itu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang isinya:

Untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas Aturan Peralihan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia, Pasal II berhubungan dengan Pasal IV, Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1:

"Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar tersebut".

Selanjutnya di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diundangkan tanggal 6 Pebruari 1950 dengan Keputusan Presiden RIS tanggal 31 Januari 1950 Nomor 48, dengan Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 3, dapat dikatakan bahwa hukum adat mendapat tempat tersendiri di dalam peradilan di seluruh wilayah RIS. Ini terbukti di dalam Pasal 146 ayat (1):

"Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu."

Adanya kata *hukum adat* di dalam pasal tersebut telah menempatkan hukum adat itu sendiri ke dalam tempat tersendiri di dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Selanjutnya, selain dari pencantuman secara eksplisit pada Pasal 146 ayat (1) tersebut, di dalam Pembukaan (dalam Konstitusi RIS disebut dengan Mukaddimah) juga dinyatakan Pancasila sebagai dasar dari Republik Federasi, meskipun dalam rumusan yang berbeda dari apa yang ditemui di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945:

“Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk Republik Federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.”

Dengan juga ditegaskannya bahwa dasar dari Republik Federasi itu adalah Pancasila maka itu artinya hukum kebiasaan atau hukum tak tertulis dan dijadikan sebagai landasan dari segala cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan.

Undang Undang Dasar Sementara 1950, sebagaimana halnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, juga menegaskan keberadaan hukum adat secara eksplisit di dalam pasalnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 104 ayat (1), yang rumusannya sedikit berbeda dengan Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS. Pasal tersebut berbunyi:

“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

Dengan melihat Pasal 104 ayat (1) tersebut maka kembali hukum adat mendapat kedudukan istimewa di dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Mengamati Pembukaan Undang Undang Dasar Sementara 1950 ini kembali terlihat bahwa Pancasila tetap dijadikan dasar dari negara yang berbentuk Republik Kesatuan. Dengan rumusan yang berbeda dengan dua

konstitusi sebelumnya, Mukaddimah Undang Undang Dasar Sementara 1950, pada alinea empat berbunyi:

“Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.”

Jika Mukaddimah ini ditelaah dengan lebih dalam dan kemudian dihubungkan dengan bunyi Pasal 104 ayat (1) Undang Undang Dasar Sementara 1950 ini maka terlihat bahwa hakim wajib mewujudkan serta menguraikan secara konkrit rasa keadilan rakyat yang telah terbentuk sebagai hukum di dalam masyarakat. Artinya hakim wajib dan harus terus secara intens dan sungguh-sungguh mengikuti perkembangan hukum adat yang terdapat di tengah masyarakat guna memenuhi perasaan keadilan dari masyarakat bangsa Indonesia.

Selanjutnya di dalam Undang Undang Dasar Sementara 1950 ini terdapat pula perkataan *hukum golongan rakyat*. Ini dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi:

“Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan.”

Dari pasal ini terlihat bahwa pemerintah di dalam usaha-usaha mengkodifikasi perundang-undangan (yang tercermin di dalam Pasal 102 Undang Undang Dasar Sementara 1950 ini) akan tetap mempertimbangkan keberadaan hukum adat atau yang disebut dengan hukum golongan rakyat tersebut.

Tentang keberadaan hukum adat seperti apa yang telah dilihat pada tiga konstitusi Indonesia yang pernah berlaku itu, masih banyak ketentuan lainnya

yang bila diperhatikan mencantumkan dan atau menyiratkan keberadaan hukum adat tersebut. Berikut akan dilihat beberapa ketentuan yang mencantumkan dan atau menyiratkan keberadaan hukum adat itu.

1. Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Nomor 1 Drt. 1951:

“...bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tidak bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka ... terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang Tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas”.

2. Undang Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Kekuasaan

Kehakiman di dalam Pasal 20 ayat (1) mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dirinya dalam masyarakat. Di sini secara tegas terlihat bahwa hakim diharuskan secara aktif mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat agar lebih mampu mendalami perasaan keadilan rakyat. Dan itu artinya hakim harus memperhatikan hukum rakyat yang telah dianut secara turun temurun tersebut, yang dikenal sebagai hukum adat atau hukum kebiasaan.

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang juga mengatur tentang

Kekuasaan Kehakiman adalah undang-undang yang menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964. Penggantian Undang-undang ini dikarenakan undang-undang lama mengandung

kelemahan yang fundamental dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan itu terlihat pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 yang di sana disebutkan memberi wewenang kepada Presiden untuk dalam beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan. Mengenai keberadaan hukum tidak tertulis di dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 ini dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1).

“Hakim sebagai penegak Hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Penjelasan pasal ini berbunyi sebagai berikut:

“Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

Dari paparan di atas terlihat bahwa Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 memberikan posisi dan peranan yang penting dan vital dalam lingkungan peradilan. Ini sangat tegas dan nyata dengan diwajibkannya hakim untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat guna memenuhi perasaan keadilan yang esensial.

Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, pengakuan terhadap eksistensi hukum adat/hukum pidana adat dapat dilihat dari berbagai pertemuan ilmiah dan forum pendapat yang menghasilkan berbagai rumusan kebijakan antara lain:

1. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke-I Tahun 1963

a. Resolusi Butir IV:

“Yang dipandang sebagai perbuatan jahat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam KUHP

Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan”.

b. Resolusi Butir VIII:

“Unsur-unsur hukum agama dan hukum adat dijalinkan dalam KUHP”.

2. Kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 15-17 Januari 1975, yang berbunyi:

1. Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Hukum Nasional yang menuju kepada unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan-pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan peranan Pengadilan dan pembinaan hukum.
2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyuluhan Hukum Nasional pada dasarnya seperti:
 - (a) Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - (b) Pembangunan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan jaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesia.
 - (c) Memasukkan konsepsi-konsepsi dan asas-asas Hukum Adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan Hukum Nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan Nasional, merupakan intinya.

4. Dengan terbentuknya Hukum Nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional.

3. Laporan Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979

Dalam Laporan Sub B II mengenai "Sistem Hukum Nasional", dinyatakan:

- a. Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.

.....

- e. Hukum Nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari Hukum Nasional.

- f. Hukum Nasional dibina ke arah unifikasi dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat

4. Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980

Dalam laporan angka II antara lain dinyatakan:

- 1.5. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal yang mencerminkan aspirasi Nasional

Dalam hubungan ini maka proses pembaharuan tersebut haruslah melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam tentang:

- 1.5.1.

- 1.5.2. Hukum pidana adat dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia, serta

- 1.5.3.

5. Seminar Hukum Nasional VI Tahun 1994

Dalam laporan sub B.3 tentang hukum kebiasaan antara lain dinyatakan:

3.1. Hukum kebiasaan mengandung dua pemahaman.

3.1.1. Dalam arti: identik dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat.

3.2. Hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting dalam kehidupan hukum nasional.

3.3. Belum adanya kriteria yang jelas tentang hukum kebiasaan khususnya dalam penegakan hukum mendorong terbentuknya sikap dan budaya hukum yang sangat legistis dalam PJP I yang cenderung mengidentifikasikan hukum dengan undang-undang.

3.4. masyarakat hukum di Indonesia harus diarahkan untuk menghormati hukum kebiasaan sebagai sumber hukum di samping undang-undang dan yurisprudensi tetap.

3.6. Dilakukan penelitian hukum adat yang diarahkan untuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional.

Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 1999/2000 juga berupaya memberi tempat kepada eksistensi hukum adat/adat pidana. Hal ini terlihat pada Pasal 1 yang menegaskan bahwa:

(1) Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap perbuatan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku ketentuan pidana dalam Pasal 93.

Pasal 1 tersebut di atas selain merupakan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat pidana, juga merupakan perluasan asas legalitas dari yang bersifat formal (seperti dalam Pasal 1:1 KUHP) ke asas legalitas yang bersifat materiel yang memberi kemungkinan kepada hukum yang hidup (hukum yang tidak tertulis) sebagai sumber hukum pidana.

Berbeda dengan perumusan asas legalitas di dalam KUHP yang sekarang berlaku, Konsep memperluas perumusannya dengan mengakui eksistensi berlakunya hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/hukum adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang. Perluasan perumusan asas legalitas ini pun tidak dapat dilepaskan dari pokok pemikiran untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dan antara kepastian hukum dengan keadilan.

Perluasan perumusan asas Legalitas ini di dalam Konsep 1999/2000 dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

(Catatan: Rumusan di atas dalam Konsep 1987/1988 dituangkan dalam Pasal 1 ayat 4).

Menurut Barda, kehadiran perumusan di atas menunjukkan “karakteristik” asas legalitas menurut pandangan dan pemikiran orang Indonesia yang tidak terlalu formalistik dan terpisah-pisah³¹⁾.

Dengan perluasan perumusan asas legalitas dalam Konsep di atas, maka batas-batas tindak pidana juga diperluas, tidak hanya yang secara tegas dirumuskan dalam Undang-undang tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang menurut “hukum yang hidup” dipandang sebagai suatu delik. Jadi batas-batas tindak pidana tidak hanya didasarkan pada kriteria formal menurut undang-undang, tetapi juga kriteria material menurut hukum yang hidup. Alur pemikiran yang demikian dilanjutkan oleh pembuat konsep dengan menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum yang material. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
- (2) Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ditegaskan, bahwa “dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.

31) Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Halaman 109.

Selain itu tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP tahun 1999/2000, memuat asas Hukum Adat Pidana yaitu menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai, yaitu tercantum dalam Pasal 50:

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dilihat dari pola pengelompokan (klasifikasi) jenis sanksi menurut Konsep di atas, ada kesamaan dengan KUHP (WvS), yang agak berbeda hanya jenisnya. Dalam pidana pokok, Konsep tidak lagi mengenal pidana kurungan, yang menurut pola KUHP biasanya diancamkan untuk tindak pidana “pelanggaran”. Jenis pidana tambahan dan tindakan di dalam konsep mengalami penambahan/perluasan. Yang agak menonjol dari penambahan tersebut ialah dimasukkan atau dirumuskan secara eksplisit jenis pidana tambahan berupa “pemenuhan kewajiban adat”. Dimasukkannya jenis pidana ini untuk menampung jenis sanksi adat atau sanksi menurut hukum tidak tertulis. Dilihat dari sudut ini dapat dikatakan, bahwa pola sanksi menurut Konsep terdiri dari “sanksi formal” (sanksi yang sudah disebutkan secara konkret dan eksplisit menurut undang-undang/hukum tertulis) dan “sanksi informal” (sanksi yang hidup menurut hukum tidak tertulis, yang jenisnya tidak secara tegas disebutkan oleh undang-undang). Disediakkannya jenis sanksi

informal (berupa pemenuhan kewajiban adat) ini, karena di dalam Konsep diakui adanya tindak pidana menurut hukum adat yang tidak ada bandingnya di dalam KUHP (hukum tertulis). Untuk delik (termasuk delik adat) yang secara formal sudah diatur secara tegas di dalam KUHP, tersedia sanksi formal, sedangkan untuk delik menurut hukum adat (dapat disebut “delik informal”) maka tersedia “sanksi informal”.

Pembagian demikian tidak berarti delik menurut undang-undang tidak dapat dikenakan sanksi informal (pemenuhan kewajiban adat). Delik menurut undang-undang tetap dapat dikenakan sanksi berupa “pemenuhan kewajiban adat” tetapi sebagai “pidana tambahan”. Untuk “delik informal” (menurut hukum adat), sanksi berupa “pemenuhan kewajiban adat” justru menjadi pidana pokok. Apabila sanksi informal ini tidak dipenuhi, maka sebagai pidana penggantinya adalah sanksi formal (menurut Konsep, penggantinya adalah pidana denda atau ganti rugi).

Dimasukkannya jenis pidana ini untuk menampung jenis sanksi adat atau sanksi menurut hukum tidak tertulis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pasal 62 dan Pasal 93 Konsep KUHP Tahun 1999/2000.

Pasal 62 berbunyi:

- (1) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. pemenuhan kewajiban adat.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.

- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Pasal 93 Konsep KUHP Tahun 1999/2000 berbunyi:

- (1) Dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban adat setempat yang harus dilakukan oleh terpidana.
- (2) Pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).
- (3) Kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Selanjutnya eksistensi Hukum Adat Pidana secara jelas terlihat dalam Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung tentang Delik Adat Kesusilaan, yaitu Putusan Nomor 1644 K/Pid/1988, tanggal 15 Mei 1991, isinya menegaskan bahwa sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh kepala adat kepada pelanggar delik adat kesusilaan, diakui dan tidak dapat dikenakan lagi pidana (*asas nebis in idem*), apabila sanksi adat telah dilaksanakan.

Secara teoritik; seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang menurut Hukum Adat Pidana di daerah tersebut merupakan perbuatan pelanggaran/delik adat, maka kepala/pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) kepada si pelaku. Bila sanksi adat yang dijatuhkan kepadanya telah dilaksanakan, maka tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya)

sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri dengan dakwaan yang sama.

Putusan Mahkamah Agung di atas menunjukkan bahwa sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung sampai saat ini masih tetap menghormati putusan/penetapan Kepala/Pemuka adat yang memberikan sanksi kepada pelanggar norma Hukum Adat Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa eksistensi Hukum Adat Pidana di Indonesia masih diakui dan dirasakan sebagai suatu kebutuhan masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Daerah dan Adat Alam Minangkabau

Minangkabau adalah suatu lingkungan masyarakat hukum adat yang terletak kira-kira di Propinsi Sumatera Barat sekarang. Dikatakan kira-kira, karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat. Sebabnya adalah karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial-kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis-administratif¹⁾.

Pengertian Minangkabau adalah lebih luas dari batas Propinsi Sumatera Barat, yaitu ke utara sampai ke Singkiling Air Bangis, berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Propinsi Sumatera Utara), ke timur sampai ke Taratak Air Hilir, berbatas dengan Inderagiri, ke Sialang Balantak Basi, berbatas dengan Pelalawan, ke tenggara sampai ke Sipisak Pisau Hanyuik, Durian Ditakuak Rajo, Tanjung Simaludu, berbatas dengan Jambi, ke selatan ke Gunung Patah Sambilan, juga berbatas dengan Jambi, dan ke barat dengan Lauik Nan Sadidieh (Samudera Indonesia). Lebih konkritnya di dalam Tambo dijelaskan batas-batas Alam Minangkabau meliputi wilayah dan bagian-bagian yang disebutkan di atas seperti;

1) Amir Syarifuddin, **Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau**, Jakarta: Gunung Agung, 1984, Halaman 122.

dari riak nan badabua, sahiliran pasia nan panjang, gunuang malintang hilia, lalu ka batu basurek, sialang balantak basi, hinggo sipisak pisau hanyuik, durian ditakuak rajo, gunuang patah sambilan, sampai kalauik nan sadidieh. ²⁾

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Minangkabau terletak dalam daerah geografis-administratif Sumatera Barat dan juga menjangkau keluar daerah Sumatera Barat, yaitu ke sebagian barat daerah geografis-administratif Propinsi Riau, dan sebagian barat daerah geografis-administratif Propinsi Jambi. Dimasukkannya kedua bagian itu ke dalam lingkungan sosial kultural Minangkabau dapat diketahui bahwa mereka secara sosial dan budaya pada umumnya sama dengan yang terdapat dalam masyarakat yang berada di Sumatera Barat. Sedangkan Kabupaten Mentawai yang merupakan bagian daerah Sumatera Barat bukanlah merupakan Alam Minangkabau.

Berbeda dengan orang lain yang umumnya memakai kata-kata "tanah" atau "bumi" untuk menyebut daerah, seperti Tanah Toraja, Bumi Siliwangi dan lain-lain, tambo Minangkabau memakai kata "Alam" dalam menyebut daerah, seperti "Alam Minangkabau". Kata "Alam" disini berarti tanah/ranah, lahan, *nature*, yaitu daerah Minangkabau dengan segala isinya.

Secara ketatanegaraan pada umumnya Alam Minangkabau terdiri dari daerah yang disebut Luhak dan daerah yang disebut Rantau. Luhak terdiri dari tiga daerah yaitu Luhak Agam, Luhak Limapuluh Kota, dan Luhak Tanah Datar. Sedangkan Rantau terdiri dari 9 (sembilan) daerah yaitu ³⁾:

-
- 2) Muhammad Radjab, **Sistem Kekerabatan di Minangkabau**, Padang: *Center for Minangkabau Studies*, 1969, Halaman 201.
 - 3) A.M. Dt. Maruhun Batuah, dan D.H. Bagindo Tanameh, **Hukum Adat dan Adat Minangkabau**, Jakarta: Poestaka Aseli, 1950, Halaman 39.

1. Tiku-Pariaman sama dengan *riak nan badabua* (riak yang berdebur).
2. Rantau 12 Koto, yaitu rantau di Batang Sangir, Negeri Catri Yang Bertiga sama dengan sambungan Rantau Nan 12 Koto di Batang Sangir sepanjang Batang Hari dan Batang Siat sampai ke batas Jambi, yaitu Kerajaan Siguntur (Sungai Dareh), Sitiung dan Kota Besar.
3. Rantau Nan Kurang Aso 20, dua puluh dengan Muaro, sama dengan rantau Kuantan.
4. Rantau Bandaro Nan 44, yaitu 40 Tapung dengan Kampar, 4 didalam Kampar, seorang dibawah Pintu Rajo sama dengan rantau Kampar, Kampar Kanan serta Kampar Kiri dan Batang Tapung yang berbatas dengan Kerajaan Siak.
5. Rantau Juduhan, Koto Ubi, Koto Hilalang, Tanjung Sirih, Batu Terbakar sama dengan Rantau dari yang Dipertuan Maharajo Bungsu, Rajo di Batang Pasimpai (Lubuk Gadang) anak dari Daulat Pagar Ruyung.
6. Bayang Nan Tujuh.
7. Bandar Sepuluh sama dengan rantau dari Raja-raja di Alam Surambi Sungai Pagu.
8. Singkil Tapak Tuan.
9. Adapun Negeri Sembilan di tanah Semenanjung dikatakan orang juga rantau dari Minangkabau, karena disana pemerintahan nagari juga seperti di Minangkabau, berpenghulu, bermanti, berdubalang juga, sedang pusaka turun kepada kemenakan. Hanya suku disana bukan seperti nama suku di Minangkabau, tetapi menurut nama Nagari-nagari

disini, seperti suku Simalanggang, Mahat, Batu Naning, Mungkal, Batu Balang dan sebagainya yaitu nama-nama negeri sebelah Payakumbuh.

Adapun yang menjadi pemimpin di daerah Luhak disebut Penghulu sedangkan di daerah Rantau disebut Raja. "*Luhak dibari bapangulu, rantau dibari barajo*"⁴⁾.

Masyarakat Minangkabau mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan suku lain di Indonesia, yaitu sistem turunan menurut garis ibu yang disebut juga sistem Matrilineal. Sistem ini telah banyak diteliti dan ditulis oleh para ahli. Walaupun menganut sistem Matrilineal tetapi teguh menganut agama Islam yang sistem hukumnya bersifat Patrilineal. Oleh sebab itu masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang dinamis dalam kehidupan beradat dan beragama. Dua doktrin yang berbeda itu dapat dirumuskan dalam satu rumusan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", dengan pengertian, agama Islam menjadi sendi pokok dari bangunan adat Minangkabau. Karena itu orang Minangkabau hanya menganut agama tunggal yaitu agama Islam, kalau agamanya bukan Islam berarti orang tersebut tidak diakui sebagai orang Minangkabau⁵⁾.

Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuak Perpatieh Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Ajaran-ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan, yang didasarkan

4) Dt. B. Nurdin Yakub, **Minangkabau Tanah Pusaka** (Tambo Minangkabau) Buku Kedua, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1989, halaman 44.

5) H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, **Wawancara**, tanggal 12 Juli 1998 di Padang.

kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia sesama manusia dan alam lingkungannya ⁶⁾.

Ajaran-ajaran berbudi baik, maksudnya adalah kesanggupan merasakan perasaan orang lain, senang dan sakit orang, senang dan sakit kita juga. Berbuat baik terhadap orang lain berarti berbuat baik terhadap diri sendiri. Oleh karena itu setiap orang dikehendaki mutu pribadi yang tinggi yaitu budi dan budaya malu.

Budaya malu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sebab menurut alam pikiran masyarakat adat Minangkabau setiap individu itu harus menghindarkan diri dari perbuatan tercela, yang akan menimbulkan malu bagi dirinya maupun anggota kerabatnya.

Selanjutnya Idrus Hakimy mengatakan adat Minangkabau mengandung nilai-nilai antara lain: (1) terasa bagi diri / bisa dirasakan oleh indra keenam (tumbuh di dada); (2) *pariso* (introspeksi), timbul dari kepala; (3) malu (himpunan *raso* dan *pariso*); dan (4) sopan (lahir dalam kenyataan tingkah laku) dalam pergaulan.

Menurut Nasroen bahwa hukum adat Minangkabau mempunyai dasar-dasar falsafah yaitu budi yang halus, tolak ansur (toleransi), tenggang menenggang dan serasa ⁷⁾.

Adat Minangkabau bersumber dari ajaran-ajaran yang mengambil ikhtibar kepada ketentuan-ketentuan alam semesta, "*alam takambang jadi guru, satitiak jadikan lautan, sakapa jadikan gunuang*" (alam terkembang jadi guru, setitik jadikan lautan, sekepal jadikan gunung).

-
- 6) H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, **Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau**, Cet. Keenam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, halaman 13.
 - 7) M. Nasroen, **Dasar Falsafah Adat Minangkabau**, Cet. Kedua, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, halaman 127-128

Aturan-aturan itu biasanya disebutkan dalam bentuk petatah-petitih, mamang, bidal, serta pantun yang disampaikan pemuka-pemuka adat dalam pidato adat, dalam tambo-tambo, maupun dalam kajian-kajian adat di surau-surau. Menurut Chairul, sebenarnya orang Minangkabau tidaklah mempunyai tulisan untuk merumuskan aturan-aturan adat tersebut didalam lembaran-lembaran tertulis, faktor ini merupakan alasan yang kuat, khusus bagi orang Minangkabau, aturan-aturan adat itu bukanlah aturan tertulis ⁸⁾.

Adat Minangkabau sebagai aturan hidup tidaklah bersifat kaku, bahkan sebahagian ketentuan-ketentuan adat itu mempunyai daya lentur yang sangat tinggi, sesuai dengan pepatah, "*adat babuhua sintak, syarak babuhua mati*". *Buhua* artinya simpul atau ikatan sedangkan *sintak* atau sentak artinya mudah dilonggarkan maupun dikencangkan. Jadi *buhua sintak* artinya adat merupakan suatu ikatan yang dapat dibuka untuk menerima perkembangan baru yang sesuai dengan pertimbangan alur dan patut menurut logika orang Minang, sebaliknya dapat pula lebih dikencangkan atau diperketat terhadap suatu aturan adat yang mulai longgar, sesuai bunyi pepatah, "*usang-usang dipabaharu*" atau "*nan buruak dibuang jo etongan, nan elok dipakai jo mufakait*".

Dengan memperhatikan daya lentur ketentuan adat Minangkabau, maka ketentuan adat Minangkabau dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) tingkat, sebagai berikut ⁹⁾:

-
- 8) Dr. Chairul Anwar SH, **Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau**, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, Halaman 3.
 - 9) Amir MS, **Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang**, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997, Halaman 74-75

1. *Adat nan sabana adat*. Yang dimaksud dengan "*adat nan sabana adat*" adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun-temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu, dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat; "*nan indak lakang dek paneh, nan indak lapuak dek hujan, paliang-paliang balumuik dek cindawan*" (yang tidak lekang oleh panas, yang tidak lapuk oleh hujan, paling-paling berlumut oleh cendawan).

Adat nan sabana adat ini merupakan Undang-Undang Dasarnya adat Minang yang tidak boleh dirobah. *Adat nan sabana adat* ini pada dasarnya berlaku umum di seantero Ranah Minang, baik di Luhak Nan Tigo maupun di Rantau.

Yang termasuk dalam *adat nan sabana adat* ini adalah:

- a. Silsilah keturunan menurut garis ibu yang lazim disebut garis keturunan Matrilinial.
- b. Perkawinan dengan pihak luar pesukuan yang lazim dikenal dengan tata perkawinan eksogami, dan suami yang bertempat tinggal dalam lingkungan kerabat istri yang disebut "matri-local".
- c. Harta Pusaka Tinggi yang turun-temurun menurut garis ibu dan menjadi milik bersama "*sajurai*" yang tidak boleh diperjual-belikan, kecuali punah.
- d. Falsafah *alam takambang jadi guru* dijadikan landasan utama pendidikan alamiah dan rasional serta menolak pendidikan mistik dan irrasional (takhyul).

Penulis setuju dengan pendapat Amir MS yang mengatakan bahwa keempat hal tersebut diatas termasuk dalam klasifikasi *adat nan sabana adat* yang daya lenturnya sangat kuat dan sulit digoyahkan. Tapi kalau sampai goyah seluruh adat Minangpun akan runtuh, karena keempat hal tersebut diatas disebut juga sebagai "*Tonggak Tuo* (pilar utama)-nya Adat Minang".

2. *Adat nan diadatkan*. Yang dimaksud dengan *adat nan diadatkan* adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum, dalam suatu nagari. Perobahan atas peraturan setempat ini hanya dapat dilakukan dengan permufakatan pihak-pihak yang tersangkut dengan peraturan itu, sesuai dengan papatah *nan elok dipakai jo mufakat, nan buruak dibuang jo etongan, adait abih dek bakarilahan* (yang baik dipakai dengan mufakat, yang buruk dibuang dengan perhitungan, adat habis karena berkerelaan). *Adat nan diadatkan* ini, dengan sendirinya hanya berlaku dalam satu nagari saja dan karenanya tidak boleh dipaksakan untuk juga berlaku umum di nagari lain. Yang termasuk dalam *adat nan diadatkan* ini, antara lain mengenai tata cara, syarat, serta upacara pengangkatan Penghulu, tatacara, syarat, upacara perkawinan yang berlaku dalam tiap-tiap nagari.
3. *Adat nan teradat*. Yang dimaksud dengan *adat nan teradat* adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berpikir orang Minang yaitu *alue-patuik, raso-pareso, anggo-tanggo* dan musyawarah.

Adat nan teradat ini dengan sendirinya menyangkut pengaturan tingkah laku dan kebiasaan pribadi orang perorangan seperti tata cara berpakaian, makan, minum dan seterusnya.

Dahulu misalnya para pemuda di kampung biasa memakai kain sarung, kini sudah terbiasa memakai celana ala Eropah, malah sudah biasa dengan blue-jean-nya Amerika.

Dulu setiap muslim Minang pulang Haji memakai sorban. Sekarang sudah biasa memakai peci, bahkan sering tanpa tutup kepala.

Dulu orang Minang biasa makan dengan tangan telanjang, kini sudah biasa pula memakai sendok garpu ala Amerika. Perubahan tata cara ini dianggap tidak melanggar adat.

4. *Adat istiadat*. Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti pasang naik dan pasang surut situasi masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut pengejawantahan unjuk rasa seni budaya masyarakat, seperti acara-acara keramaian anak nagari, seperti pertunjukkan randai, saluang, rebab, tari-tarian dan aneka kesenian yang dihubungkan dengan upacara perhelatan perkawinan, *puntiang* penghulu maupun untuk menghormati kedatangan tamu agung.

Kebanyakan adat sopan santun dan basa basi serta tata krama pergaulan termasuk dalam klasifikasi adat istiadat ini.

Adat istiadat semacam ini sangat tergantung pada situasi sosial ekonomi masyarakat. Bila sedang panen baik, biasanya megah meriah, begitu pula bila keadaan sebaliknya. Contoh lain misalnya dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak

maka helat tidak akan menjadi; tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran itu, maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai tadi.

Disamping pembagian empat tingkat adat di atas, masih ada satu pengaturan adat yang bersifat khusus dan merupakan ketentuan yang berlaku umum, baik di ranah maupun di rantau. Pengaturan itu adalah apa yang dikenal dengan "*Limbago nan Sapuluah*" yang menjadi dasar dari Hukum Adat Minang. Yang termasuk dalam *Limbago nan Sapuluah* ini adalah *Cupak nan Duo*, *Undang nan Ampek*, dan *Kato nan Ampek* yang menjadi patokan hukum yang berlaku di seantero Ranah Minang.

Limbago Nan Sapuluah ini terdiri dari:

Cupak nan Duo : 1. *Cupak Usali* (asli)

2. *Cupak* buatan

Undang nan Amppek : 1. Undang Undang Luhak Rantau

2. Undang Undang Pembentukan Nagari

3. Undang Undang Dalam Nagari

4. Undang Undang nan 20 (Pidana Adat)

Kato nan Ampek : 1. *Kato Pusako* (Kata Pusaka)

2. *Kato Daulu* (Kata Dahulu)

3. *Kato Buatan* (*Kato Mufakat*)

4. *Kato Kamudian* (*Kato Bacari*)

Cupak artinya takaran atau timbangan atau Hukum.

Cupak Usali artinya Hukum Asli.

Cupak Buatan artinya Hukum Pelengkap.

Dari *Undang Undang nan Ampek* dan *Kato nan Ampek*, dapat kita kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu UU Pokok (*Cupak Usali*) dan UU Pelengkap (*Cupak Buatan*) menjadi sebagai berikut ¹⁰⁾;

UU Pokok (*Cupak Usali*)

1. UU Luhak Rantau
2. UU Pembentukan Nagari
3. Kato Pusako
4. Kato Daulu

UU Pelengkap (*Cupak Buatan*)

1. UU Dalam Nagari
2. UU Nan 20
3. Kata Buatan (Kato Mufakat)
4. Kato Kemudian (Kato Bacari)

a. Undang Undang Luhak Rantau

Undang Undang Luhak Rantau menetapkan pemangku dan penguasaan adat di Luhak nan Tigo dan di Rantau. Pepatah adat menyatakan:

Luhak ba pangulu (Luhak berpenghulu), *Rantau barajo* (rantau beraja)

Tagak samo indak tasundak (Tegak sama tidak tersundak)

Malenggang samo indak tapepeh (Melenggang sama tidak salah langkah)

Hal ini berarti bahwa di Luhak Nan Tigo yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak 50 Kota, kekuasaan pengelolaan adat berada di tangan para penghulu, sedangkan di daerah Rantau yang berkuasa dalam hal adat adalah Raja.

10) Amir MS, *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997, Halaman 78-84.

Kedudukan antara Penghulu di Luhak dengan raja di Rantau adalah setingkat dan sederajat. Antara kedua penguasa ini tidak akan terjadi tumpang tindih dan persenggolan.

b. Undang Undang Pembentukan Nagari

Undang Undang Pembentukan Nagari menetapkan susunan pesukuan dalam nagari, persyaratan nagari dan perlengkapan nagari. Pepatah Adat menetapkan:

Nagari ba-kaampek suku

Dalam Suku ba-buah paruik

Kampung nan ba-Tuo

Rumah Gadang ba Tungganai

Pepatah diatas menetapkan 4 hal sebagai berikut:

1. Suatu wilayah pemukiman; baru boleh disebut "nagari" bila sekurangnya terdapat 4 (empat) suku yang berbeda.

Semula terdiri dari 2 (dua) suku dari kelurahan Datuk Perpatih Nan Sabatang yaitu suku Bodi dan Suku Caniago dan 2 (dua) suku dari kelurahan Datuk Katumenggungan yaitu Suku Koto dan Suku Piliang.

Ketentuan ini dimaksudkan supaya dalam nagari yang baru itu dimungkinkan perkawinan antar suku yang berbeda sesuai ketentuan perkawinan eksogami.

2. Setiap "suku" minimum terdiri dari orang-orang yang "*saparuik*". *Saparuik* artinya suatu kekerabatan yang terdiri dari 4 (empat) generasi yaitu:

Anak sebagai generasi ke empat (Ego-Aku)

Mande sebagai generasi ketiga (Ibu)

Nenek sebagai generasi ke dua (uo)

Gaek sebagai generasi pertama (gaek).

3. Kampung yang merupakan tempat pemukiman suku atau gabungan beberapa suku mempunyai Tuo-Kampung. Tuo-Kampung biasanya dijabat oleh Penghulu sepayung.
4. *Rumah gadang ba Tunganai*. Yang dimaksud dengan Tunganai adalah "mamak tertua" di rumah gadang atau saudara laki-laki dari nenek kita, kalau masih hidup. Tunganai ini biasa juga disebut dengan "Mamak Kepala Waris".

c. Kato Pusako

Yang dimaksud dengan Kato Pusako ialah Petuah Nenek Moyang yang disampaikan secara turun temurun untuk menjadi pedoman hidup bagi anak cucu dalam bentuk pepatah petitihi seperti:

Hiduik di kanduang adait (hidup di kandung adat)

Mati di kanduang tanah (mati di kandung tanah)

Kato Pusako ini mengingatkan kita bahwa setiap yang hidup akan mati, dan kita sebagai manusia diciptakan dari tanah dan kelak kalau sudah mati akan kembali menjadi tanah. Pepatah ini masih dilengkapi dengan pepatah lain seperti:

Hiduik baraka, mati bariman (Hidup berakal, mati beriman).

Pepatah ini mengajarkan kita bahwa dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini supaya dipergunakan akal pikiran. Suatu pemberian dari Tuhan yang paling berharga bagi manusia. Hewan dan tumbuhan sebagai makhluk Tuhan juga, tidak diberikan akal. Inilah kelebihan manusia. Manusia yang tidak mempergunakan akalanya secara maksimal berarti juga kurang menghargai pemberian Tuhan. Manusia yang sama sekali tidak mau mempergunakan akalanya, maka turunlah derajatnya menjadi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu adalah tepat sekali

“*kato pusako*” yang diwariskan pada kita yang berbunyi “*hiduik baraka – mati bariman*” di atas.

Mati beriman artinya tidak lain sebagai orang Islam, Adat menuntun kita supaya selama hidup kuat beribadat dan beramal saleh, sehingga kalau kelak sudah sampai ajalnya, kita akan mati sebagai orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan salah satu ajaran adat yang berhubungan dengan masalah “*hablum minallah*” atau hubungan manusia dengan Tuhannya.

Kato Pusako ini masih banyak lagi terdapat dalam pepatah seperti:

Adait hiduik tolong manolong (Adat hidup tolong menolong)

Adait mati janguak manjanguak (Adat mati layat melayat)

Adait lai bari mambari (Adat mempunyai beri memberi)

Adait tiado basalang tenggang (Adat tak punya berpinjam tenggang)

Adat sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang rukun – aman dan damai, banyak sekali memberi tuntunan hidup bermasyarakat.

Kata Pusaka *Adait hiduik tolong manolong*, mengisyaratkan bahwa manusia Minang tidak boleh menganut paham individualistis yang hanya memikirkan diri sendiri, atau hanya mengurus kepentingan sendiri. Orang Minang wajib peduli pada lingkungan. Yang lemah harus dibantu, tetangga harus diperhatikan – mereka yang kesulitan harus dibantu. Hidup dan kehidupan kekerabatan dan kekeluargaan lebih diutamakan dari kehidupan diri sendiri. Kebersamaan lebih utama dibandingkan dengan kedirian. Tolong menolong, atau bergotong royong dalam menjalankan hidup dan kehidupan, mempunyai nilai yang tinggi dalam pandangan adat Minang.

Kesedihan tetangga, merupakan kesedihan kita juga. Kalau ada kematian, adat mengajarkan “*Adait mati janguak manjanguak*” yang artinya kalau terjadi

kematian, adalah kewajiban kita untuk menunjukkan rasa simpati kita. Sebagai tetangga – kenalan – karib kerabat – apalagi dunsanak, adalah kewajiban kita untuk meringankan beban batin keluarga yang ditinggalkan.

Dalam kehidupan ekonomi nasib manusia tidak sama. Rezeki berada di tangan Tuhan. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Karena itu adalah wajar ada keluarga yang diberi rezeki yang berkecukupan, tetapi ada juga *dunsanak* (saudara) kita yang diberi rezeki hanya pas-pasan.

Kendatipun dulu nenek moyang kita belum mengenal istilah “kesenjangan – ekonomi”, namun beliau sudah memberikan tuntunan yang tegas untuk mengatasi kesenjangan dalam kehidupan, sesuai kata pusaka yang berbunyi:

Adait lai bari mambari, adait tiado basalang tenggang.

Mereka yang mendapat rezeki berkecukupan, berkewajiban untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Begitulah pula mereka yang dalam kesulitan ekonomi wajar sekali untuk mencari bantuan. Kita tidak perlu malu mencari bantuan. Inilah gunanya dikembangkan prinsip “*dunsanak*”. Sesama bersaudara wajar untuk saling membantu. Kalau tidak kepada *dunsanak*, kepada siapa kita harus minta tolong?. Kita tidak perlu malu-malu, kalau terpaksa.

“*Karajo baiak ba imbauan – karajo buruak ba ambauan*”, begitu kata pepatah. Apa artinya?. Kalau ada pekerjaan baik yang akan dikerjakan misalnya mendirikan sekolah, masjid, rumah sakit dan lain seperti itu, maka kewajiban kita semua untuk saling memberi tahu teman untuk sama-sama membantu pelaksanaan kerja baik itu. Apalagi bila hal itu menyangkut kepentingan bersama atau kepentingan umum. Sebaliknya bila ada pekerjaan buruk yang ditawarkan misalnya untuk korupsi, menipu, kolusi dan lainnya, adat dengan tegas menyuruh kita untuk menolak tugas yang sedemikian itu.

Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk. *Amar makruf – nahi munkar*. Cobalah kita perbandingkan antara ajaran Adat dengan ajaran Islam disini. Dimana bedanya?.

d. *Kato Daulu*

Yang dimaksud dengan *Kato Daulu* atau lengkapnya "*Kato daulu kato ditepati*" artinya setiap ucapan merupakan janji atau ikrar yang harus ditepati oleh setiap individu yang mengucapkannya.

Ucapan merupakan undang-undang bagi diri yang mengucapkannya, sehingga wajib dipenuhinya, demi kemuliaan dan harga dirinya.

Pepatah menyebutkan:

Balaie ka rantau ikie (berlayar ke rantau ikir)

Ka mudiak Padang Sibusuak (ke mudik Padang Sibusuk)

Singgah sabanta di Sikabau (singgah sebentar di Sikabau)

Janji nan biaso mungkie (janji yang biasa mungkir)

Titian nan biaso lapuak (titian yang biasa lapuk)

Pantangan anak Minangkabau

Sering kita mendengar penyelewengan dari pepatah ini dengan merubahnya menjadi berbunyi sebagai berikut: *Janji biaso mungkie, titian biaso lapuak*.

Pepatah ini biasanya dijadikan dalil untuk membenarkan kesalahan kita sendiri, bila tak mampu memenuhi ikrar yang kita ucapkan. Perbuatan yang demikian jelas tidak ksatria, dan tidak mungkin nenek moyang orang Minangkabau mengajarkan yang demikian itu.

Selanjutnya kita akan menguraikan pula serba ringkas mengenai "*Cupak Buatan*" atau Hukum Pelengkap sebagai berikut:

a. Undang Undang Dalam Nagari

Undang Undang Dalam Nagari atau lazim disebut dengan Undang Undang Isi Nagari adalah peraturan tentang hubungan antara sesama anggota masyarakat baik menyangkut tindak perdata, tindak pidana, atau tindak kerjasama.

Pengaturan dalam bidang perdata misalnya:

Adat pinjam melunasi

Utang dibaie – piutang ditarimo (utang dibayar – piutang diterima)

Salah ditimbang – kusut diselesaikan.

Urang Kubang mambao ale (orang Kubang membawa air)

Urang Padang mambao bareh (orang Padang membawa beras)

Nan bautang nan mambaie (yang berutang yang membayar)

Nan mancancang nan mamapeh (yang mencancang yang memancing)

Pelanggaran pidana dalam adat Minang tidak diberi hukuman badan, tapi hukuman moril seperti dikucilkan atau dibuang sepanjang adat. “Dibuang jauh, digantung tinggi”.

Pantun pepatah menyebutkan:

Dek ribuk basahlah padi

Di cupak Datuk Tumenggung

Kok hiduik tak babudi (jika hidup tak berbudi)

Duduak tagak kamari canggung (duduk berdiri ke mari canggung)

Dalam mendorong kerjasama dalam masyarakat, pepatah Minang mengajarkan:

Barek samo dipikue (berat sama dipikul)

Ringan samo dijinjiang (ringan sama dijinjing)

Ado samo dimakan (ada sama dimakan)

Indak samo dicari (tidak sama dicari)

Ka bukik samo mandaki (ke bukik sama mendaki)

Ka lurah samo menurun (ke lurah sama menurun)

Tatalantang samo minum aie (tertelentang sama minum air)

Tatalungkuik samo makan tanah (tertelungkup sama makan tanah)

Kok jauh kana mangana (jika jauh ingat mengingat)

Dakek jalang manjalang (dekat kunjung mengunjung)

b. Undang Undang Nan 20

Undang Undang Nan 20 menguraikan tentang bentuk-bentuk kejahatan. Cara pembuktian dan penentuan tuduhan secara adat.

Undang Undang Nan 20 itu terdiri dari:

Undang undang yang menyangkut bentuk kejahatan 8 buah, Undang undang yang menyangkut pembuktian kesalahan 6 buah, dan Undang undang yang menyangkut pendakwaan atau tuduhan 6 buah.

Undang undang yang menyangkut bentuk kejahatan yaitu:

1. Tikam (penikaman dan pembunuhan)
2. Upas racun (peracunan)
3. Samun sakar (penyamunan)
4. Siar bakar (pembakaran)
5. Maling curi (pencurian)
6. Dago dagi (gugat menggugat)
7. Umbuak umbai (bujuk rayu)
8. Sumbang salah (tuna susila)

Undang undang yang menyangkut pembuktian kesalahan yaitu:

1. *Bajajak bak bakiak* (berjejak seperti jari burung berkek atau *Capella gallinago*)
2. *Bauriah bak sipasin* (berbaris bagai kepompong capung)
3. *Babaun bak ambacang* (berbau seperti Embacang/sejenis Mangga)
4. *Tangiang bak kukuak ayam* (terdengar bagai kokok ayam)
5. *Cancang ranggah bangkak-kaniang* (luka di kepala bengkak kening)
6. *Tadorong jajak manurun-tatukiek jajak mandaki* (terdorong jejak menurun tertukik jejak mendaki)

Undang undang untuk pendakwaan atau tuduhan yaitu:

1. *Taikek takabek* (terikat atau tertambat)
2. *Batando babukti* (bertanda berbukti)
3. *Talalah takaja* (terburu dan tertanggap)
4. *Batunggue panabangan* (bertunggul penebangan)
5. *Basaksi bakatarangan* (bersaksi berketerangan)
6. *Batampuak depek dijinjiang* (bertampuk dapat dijinjing).

c. Kata Buatan

Yang dimaksud dengan “kata buatan” ialah ikrar yang diterapkan berdasarkan persetujuan semua pihak dalam suatu permusyawaratan yang dilakukan menurut “*alue jo patuik*” sepanjang adat.

Bulek aie dek pambuluah (bulat air karena pembuluh)

Bulek kato dek mufakat (bulat kata karena mufakat)

Tuah sakato nan basamo (tuah sekata yang bersama)

d. Kata Kemudian

Yang dimaksud dengan “kata kemudian” atau lazim juga disebut dengan “kato kamudian kato bacari” ialah suatu ikrar yang terpaksa diperbarui karena tak terlaksananya ikrar yang terdahulu. Pepatah Minang menyebut:

“Janji ditepati, ikrar dimuliakan”.

Jadi setiap janji harus ditepati, namun kadang-kadang “manusia merencanakan – Tuhan yang menentukan”. Ada kalanya suatu ikrar yang diucapkan tak dapat terpenuhi, sehingga perlu diadakan perubahan. Perubahan yang semacam ini dianggap lazim pula dalam adat, seperti pepatah berikut:

“*Alang indak sakali inggok* (Elang tidak sekali hinggap), *pikiran tak sekali tumbuh*”.

Masyarakat adat Minangkabau tidak hanya tunduk pada aturan-aturan hukum adat saja, tetapi juga tunduk pada aturan undang-undang / Pemerintah dan kaedah-kaedah agama Islam. Hal ini dikenal dengan sistem tali *tigo sapilin*.

Herman Sihombing menjelaskan pengertian tali tiga sepilin tersebut sebagai berikut ¹¹⁾:

“Tali adalah untuk mengikat satu dan beberapa barang, jadi dikatakan tali tiga sepilin, untuk menunjukkan hukum dan peraturan yang mengikat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tiga menjadi satu ikat, satu tali, satu hukum. Masyarakat Minangkabau tadinya hanya diikat oleh adat saja. Kemudian datanglah undang-undang negara, dan datang pula aturan agama, terutama agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Maka ketiga unsur ini, mau tidak mau harus disatukan, dipilin menjadi satu yang kokoh, untuk menunjang kehidupan masyarakat”.

Selanjutnya Herman menyatakan:

11) Herman Sihombing, dalam A. A. Navis, *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial dan Politik*, Padang: Genta Singgalang Press, 1983, Halaman 48-49.

“Sistem tali tiga sepilin, dalam hukum di sini tidak pernah menyatakan yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan itu tergantung kepada permukaan yang langsung diatur dan dikenakan, karena itulah yang ditonjolkan untuk kepentingan dan untuk menjawab masalah hukum dan hidup yang riil dihadapi; satu ketika pilihan itu di atas, saat yang lain di bawah, begitu seterusnya”.

Dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Herman Sihombing di atas diperoleh kesan bahwa masyarakat adat Minangkabau tidak mungkin hanya tunduk pada satu unsur atau dua unsur saja, tetapi harus ketiga unsur aturan itu. Apabila hanya satu atau dua unsur saja yang dipatuhi berarti akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam pergaulan hidup, konsekuensinya dapat menimbulkan benturan dalam kehidupan.

Ketiga unsur adat-istiadat, undang-undang dan kaedah Agama Islam merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipecah atau dipisah-pisahkan baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Dalam bidang cara memerintah atau Pemerintahan untuk daerah Minangkabau dikenal dua sistem yang untuk daerah ini disebut dengan laras. Laras yang dua tadi adalah sebagai berikut:

1. Laras Koto-Piliang. Laras ini menganut adat berjenjang naik, bertangga turun, artinya antara anak buah dan pemimpin tidak ada hubungan langsung, mesti ada saluran yang dilaluinya ataupun sebaliknya. Promotor dari adat ini adalah Dt. Katumanggungan yaitu anak dari Indo Jati yaitu keturunan raja-raja. Juga disebut orang bahwa adat laras ini adalah hujan datang dari langit, artinya segala inisiatif datang dari pihak atasan dan diperkatakan bersama-sama dan keputusannya dibawa kembali ke atas untuk disahkan dan setelah itu baru dilaksanakan.

2. Laras Bodi-Caniago. Laras ini promotornya adalah Dt. Perpatih Nan Sabatang (anak dari seorang ahli siasat yang bernama Cati Bilang Pandai). Pada laras ini tidak dikenal adat berjenjang naik bertangga turun di atas, akan tetapi tiap masalah dibawa langsung pada kerapatan nagari. Tidak diberi kesempatan membanding, karena kerapatan inilah mahkamah yang terendah dan yang tertinggi. Disini berlaku pepatah *rumah sudah tukang dibunuh, indak buliah dituras lagi*, artinya dalam memutus tadi hendaklah hakim yang pintar dan piawai, karena pemeriksaan hukum tidak diadakan, sedang banding diadakan untuk memperbaiki hukuman hakim yang relatif kurang tepat. Adat Bodi Caniago ini disebut juga air *tabasuit* (terpancar) dari bumi, artinya segala inisiatif datang dari anak buah, lalu diperbincangkan dalam kaum seterusnya dalam suku, dan penghulu memegang kata mufakat serta menjaga pelaksanaannya.

Walaupun *laras* yang dua itu berlainan coraknya dalam pelaksanaan hukum yang satu berjenjang naik bertangga turun sedang yang lain sama datar, tetapi kedua *laras* itu mempunyai dasar yang sama yaitu kata mufakat. Jadi dalam kedua *kelarasan* itu tidak ada sistem absolutisme, sebab semuanya diambil secara kata mufakat yang dalam istilahnya dikenal dengan:

Satampuak lalu, sabondong suruit, bulek sagolek, picak salayang, kok tatanguak diudang samo mauntuangkan, tatanguak disarok samo manuntuangkan (berjalan secara bersama-sama, pendapat sudah sama, sama-sama merasakan keuntungan ataupun kerugian akibat kata mufakat tadi).

Harus juga diperhatikan disini bahwa pada umumnya dalam daerah ini tidak akan ditemui nagari yang menganut salah satu sistem *kelarasan* tersebut secara mutlak, akan tetapi pada waktu sekarang hal itu sudah saling masuk memasuki antara kedua sistem *kelarasan* itu. Akan tetapi sebagai suatu tanda yang dapat dilihat pada waktu sekarang tentang kedua sistem tersebut adalah hanya dalam balai adat yang ada pada masing-masing nagari. Kalau dulunya nagari itu menganut Laras Koto Piliang, maka balainya beranjung dan bertingkat-tingkat sebelah menyebelahnya, sebab kedudukan penghulu disana tidak sama. Sedangkan lantainya di tengah putus (*labuah gajah*). Sedangkan balai Bodi-Caniago adalah datar sebab penghulu itu tegak sama tinggi duduk sama rendah ¹²⁾.

B. Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau

Menurut Soebekti, bahwa sistem adalah susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut pola, hasil pemikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu ¹³⁾.

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, tiap hukum merupakan suatu sistem, artinya kompleks norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud pengejawantahan daripada kesatuan alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum Barat.

12) Tasyrif Aliumar dan Faisal Hamdan, **Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat Daerah Sumatera Barat**, Proyek Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang: 1977-1978, Halaman 35.

13) Soebekti, **Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan datang**, Jakarta : BPHN, Bina Cipta, 1981, Halaman 99.

Dan untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia ¹⁴⁾.

Dari pengertian tersebut di atas jelas bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki bagian-bagian yang membentuk satu tatanan yang utuh. Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti diluar kesatuan itu. Didalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi antar bagiannya. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan didalam sistem itu sendiri, serta tidak dibenarkan berlarut-larut ¹⁵⁾.

Jika mencermati uraian tersebut diatas, tampak bahwa sistem hukum adalah tatanan yang lengkap, demikian lengkapnya, sehingga semua konflik atau kontradiksi dapat diselesaikan didalam sistem itu sendiri, bukan mencari pada sistem yang lain. Apabila dirasakan ada kekurangan (karena proses perkembangan masyarakat) sistem melengkapi dirinya dengan penemuan-penemuan hukum baru melalui berbagai cara menurut sistem itu, seperti dengan penafsiran-penafsiran.

Memperhatikan pernyataan diatas, penulis berpendapat bahwa Hukum Adat Minangkabau / Hukum Adat Pidana Minangkabau merupakan suatu sistem hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan pandangan tersebut.

14) Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat**, Jakarta: Gunung Agung, 1990, halaman 68.

15) Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Edisi 3, Jogjakarta: Liberty, 1991, halaman 102-103.

Dalam menelaah suatu sistem hukum ada tiga unsur sistem hukum yang harus diperhatikan, yaitu: (1) substansi (2) struktur dan (3) budaya hukum ¹⁶⁾.

Bagian-bagian dalam sistem hukum itu senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Unsur pertama dari sistem hukum adalah substansi, yaitu norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur bagaimana masyarakat seharusnya bersikap dan berperilaku. Unsur substansi ini dalam hukum adat pidana Minangkabau diatur di dalam Undang-undang *Nan Duo Puluah* (yang dua puluh).

Unsur kedua dari sistem hukum adalah struktur yaitu merupakan komponen yang mempersatukan unsur-unsur dalam hukum agar segala unsur tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Sunaryati Hartono menyebutkan istilah struktur ini dengan organisasi ¹⁷⁾.

Unsur ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum yaitu nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum ¹⁸⁾.

Sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau jelas mempunyai ketiga unsur tersebut dalam hal ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara global. Khusus budaya hukum akan dibahas pada sub bab berikutnya.

1. Kaidah-kaidah pidana yang diatur dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau

Sebagaimana sudah dikatakan pada sub Bab terdahulu bahwa yang menjadi dasar dari Hukum Adat Minangkabau disebut *Limbago nan Sapuluah*.

16) Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W.W. Norton & Co., 1986, halaman 5.

17) Lihat Sunaryati Hartono Sumarno, **Pembaruan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1 Agustus 1991, halaman 19-20.

18) Kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke VI, 1994, halaman 442.

Limbago nan Sapuluah ini disebut juga kumpulan pokok dari sebuah aturan adat yang ada di Minangkabau. Diantara *Limbago Nan Sapuluah* terdapat Undang-undang nan 20 yang erat kaitannya dengan pokok bahasan dalam tulisan ini.

Undang-undang nan 20 terbagi dua kelompok, yakni Undang-undang *nan Salapan* (Undang-undang nan 8) merupakan undang-undang hukum pidana adat materil yang berisikan tindakan dan perbuatan yang termasuk kedalam pengertian delik, dan Undang-undang *Nan Duo Baleh* (Undang-undang Nan 12) merupakan undang-undang hukum pidana adat formil. Undang-undang Nan 12 ini tidak serinci KUHP. Pada umumnya materi dari Undang-undang Nan Dua Belas ini adalah mengenai masalah pembuktian yang terdiri dari dua tahap pembuktian. (Istilah undang-undang disini bukanlah dalam arti undang-undang tertulis, tetapi hukum yang tidak tertulis).

Tahap pertama disebut dengan "*cemo*" yaitu suatu sangkaan yang didasarkan kepada suatu perkiraan saja, dalam kitab undang-undang hukum pidana dikenal dengan dakwaan atau baru pada taraf tersangka. Taraf *cemo* ini tampak bahwa semuanya adalah berupa dugaan yang masih belum diyakini kebenarannya atau mungkin suatu kebetulan saja ataupun baru berupa suatu isu yang belum dibuktikan dan masih harus dicari kepastiannya.

Tahap kedua, tuduh yaitu apabila suatu perbuatan atau tindakan yang relatif sudah dapat dibuktikan dengan lebih jelas. Tahap tuduh ini dapat disamakan dengan adanya surat tuduhan yang dibuat dan diajukan oleh penuntut umum dalam suatu sidang perkara pidana di pengadilan negeri. Usaha agar dari *cemo* dapat jadi tuduhan diperlukan suatu sudi dan siasat yang seksama sehingga *cemo* dapat ditingkatkan dan diproses menjadi suatu tuduhan yang kongkrit yang

harus dibuktikan oleh pihak yang menuduh atau sesuatu yang harus disangkal oleh tersangka dengan alasan dan bukti yang dimiliki di depan pengadilan adat.

Dalam mengemukakan sistematika dan beberapa pengertian terhadap *undang-undang nan duo puluh* para ahli hukum adat Minangkabau agak sedikit berbeda pendapat, namun demikian mereka mempunyai pendirian yang sama bahwa *undang-undang nan duo puluh* dibagi atas dua bagian, yaitu *undang-undang nan salapan* disebut sebagai hukum adat pidana material dan *undang-undang nan duo baleh* sebagai hukum adat pidana formal.

Berikut ini akan dikemukakan sistematika *undang-undang nan salapan* dan *undang-undang nan duo baleh* yang dibuat oleh: 1. Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo; 2. A. M. Datuk Maruhun Batuah dan D. H. Bagindo Tanameh; 3. M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe; 4. A. A. Navis.

Sistematika Undang-undang Nan Delapan dan Undang-undang Nan Dua Belas yang dibuat oleh Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo adalah sebagai berikut ¹⁹⁾:

Sistematika Undang-undang Nan Delapan:

1. *Dago-dagi*, yaitu melakukan perlawanan kepada yang tidak patut dilawannya.
2. *Sumbang-salah*, ialah melakukan perbuatan yang dilarang aturan delik adat.
3. *Samun-sakal*, ialah perampokan yang dilakukan di tempat yang sunyi.
4. *Maliang-curi*, ialah melakukan pencurian terhadap barang orang lain.
5. *Tikam-bunuhan*, ialah menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan senjata tajam atau benda runcing.
6. *Kicuah-kencong* dan *tipu-tepok*, ialah melakukan perbuatan penipuan terhadap orang lain baik dengan cara halus atau dilakukan dengan kekerasan.

19) Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, **Kitab Peratoeran Hoekoem Adat Minangkabau**. Tjitakan Pertama. Fort de Kock: Pertjitan Drukkerij Gebroeders "Lie", 1924, halaman 30-41

7. *Upeh-racun*, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan racun, mulai dari dosis yang rendah sampai dosis yang tinggi.
8. *Sia-baka*, yaitu melakukan pembakaran, mulai dari menyulut sampai menghanguskan.

Undang-undang Nan Duo Baleh dibagi atas dua bahagian, enam yang pertama tergolong dakwa "*cemo*" (cemar), enam yang kedua termasuk dakwa "*tuduah*" (tuduh). Sistematika Undang-undang Nan Duo Baleh dimaksud adalah:

1. *Talalah-takaja*, yaitu tertangkap basah melakukan kejahatan, dan dikejar bersama-sama oleh orang kampung.
2. *Tacancang-tarageh*, yaitu tubuh pelaku luka kena senjata yang menangkap, dan pakaian pelaku dijadikan barang bukti.
3. *Talacuit-tapukua*, yaitu pelaku karena melawan waktu akan ditangkap, terlecut dan terpukul oleh orang yang menangkapnya.
4. *Putuih tali*, yaitu alibi pelaku tidak dapat dibuktikannya.
5. *Tumbang ciak*, yaitu pelaku diteriaki oleh orang banyak.
6. *Anggang lalu atah jatuh*, yaitu sewaktu terjadi peristiwa kejahatan, ada orang lewat di tempat itu, maka orang mempunyai prasangka terhadapnya.
7. *Bajalan bagageh-gageh*, yaitu pelaku kejahatan berjalan tergesa-gesa, dan tingkah lakunya mencurigakan.
8. *Pulang pai babasah-basah*, yaitu pelaku pakaiannya basah dan kakinya berlumpur pada waktu itu terjadi peristiwa kejahatan. Menurut keadaannya orang tersebut tidak patut memakai pakaian yang demikian.
9. *Manjua bamurah-murah*, yaitu orang menjual murah barang di bawah harga biasa, maka orang mencurigainya sebagai pelaku kejahatan.

10. *Dibao pikek dibao langau*, yaitu berita dari mulut ke mulut bahwa seseorang diduga melakukan kejahatan karena memperhatikan tingkah lakunya sehari-hari.
11. *Tabayang tatabua*, yaitu pecah berita dalam masyarakat tertuduh itu serupa benar seperti yang pernah dilihat orang sebelumnya.
12. *Kacondongan mato urang banyak*, yaitu ada tanda-tanda pada tertuduh menurut penglihatan orang banyak, setelah terjadi peristiwa kejahatan.

A.M. Datuk Maruhun Batuah dan D.H. Bagindo Tanameh membuat sistematika Undang-undang Nan Delapan dan Undang-undang Nan Dua Belas sebagai berikut ²⁰⁾:

Sistematika Undang-undang Nan Delapan yaitu:

"1. Tikam-bunuh; 2. Upas racun; 3. Siar-bakar; 4. Maling-curi; 5. Samun-sakar; 6. Dago-dagi; 7. Umbuk-umbai; 8. Sumbang-salah".

Sedangkan sistematika Undang-undang Nan Dua Belas adalah:

Enam buah jatuh pada "*cemo*", yakni sak wasangka hati yang belum jelas bahwa seseorang telah melakukan kejahatan, yaitu:

1. Berjejak seperti berkik (sebangsa binatang ayam-ayaman di sawah), Bersurih seperti sipasin (sebangsa binatang lipan yang hidup di lumpur).
2. Berbau seperti embacang (sejenis mangga), terngiang-ngiang seperti kokok ayam.
3. Enggang lalu atah jatuh, anak raja mati ditimpanya.
4. Runcing tanduk sama dengan orang yang sudah sering melakukan kejahatan.
5. Cancang ranggah bengkak kening sama dengan suka bersengketa.

20) A. M. Dt. Maruhun Batuah dan D. H. Bagindo Tanameh, **Hukum Adat dan Adat Minangkabau**. Djakarta: Penerbit Poesaka Aseli, tanpa tahun, halaman 60-61.

6. Tersindorong jejak menurun, tertukik jejak mendaki (ditemukan bekas kejahatan).

Enam buah lagi jatuh pada "tuduh", yaitu sangkaan yang mendekati kenyataan, yaitu:

1. Terikat-terkebat.
2. Tertanda-terbukti.
3. Terlalah, terkejar, ia kata orang banyak.
4. Bertali boleh digiring, bertangkai boleh dijinjing.
5. Bertunggul penebangan (ditemukan bekas kejahatan).
6. Bersaksi, berketerangan.

Sistematika Undang-undang Nan Delapan dan Undang-undang Nan Dua Belas menurut M Rasjid Manggis Dt. Radjo Pengoeloe adalah sebagai berikut ²¹⁾:

Sistematika Undang-undang Nan Delapan:

1. Tikam-bunuh.
2. Upeh-racun.
3. Samun-saka
4. Maliang-curi.
5. Sia-baka.
6. Umbuak-umbi.
7. Sumbang-salah.
8. Dago-dagi.

21) M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Pengoeloe, **Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya**. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1982, halaman 172-176.

Undang-undang Nan Duo Baleh dibagi atas:

1. Undang-undang Nan Enam Dahulu, dikatakan "tuduah"
2. Undang-undang Nan Enam Kudian, dikatakan "cemo".

"*Tuduah Nan Anam Dahulu*" itu ialah:

- a. *Tatando-tabeti.*
- b. *Taikek-takungkuang.*
- c. *Talalah-takaja.*
- d. *Tacancang-tarageh.*
- e. *Tatambang-ciak.*
- f. *Tatangkok jo salahnyo.*

"Cemo Nan Enam Kudian" itu ialah:

- a. Bajajak bak bakiak, basurih bak sipasin.
- b. Tabayang-tatabua.
- c. Kacondongan mato nan banyak.
- d. Anggang lalu atah jatuhah.
- e. Tasindorong jajak manurun, tatukiak jajak mandaki.
- f. Bajajak barunuik.

A.A. Navis membuat sistematika Undang-undang Nan Delapan dan Undang-undang Nan Dua Belas, serta memberikan penjelasan yang lebih baik, yaitu ²²⁾:

1. *Tikam-bunuah* (tikam-bunuh). Yang dimaksud dengan tikam ialah perbuatan melukai orang. Bunuh ialah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

22) A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Penerbit Grafitipers, 1984, halaman 110-112.

2. *Upeh-racun* (upas racun). Upas ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan yang berbisa atau beracun. Racun ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang meninggal setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan berbisa atau beracun.
3. *Samun saka* (samun sakar). Samun ialah perbuatan merampok milik orang lain dengan cara melakukan pembunuhan. Sakar ialah perbuatan merampok milik orang dengan cara kekerasan atau aniaya.
4. *Sia baka* (siar bakar). Siar ialah perbuatan membuat api yang mengakibatkan milik orang lain sampai terbakar. Bakar ialah perbuatan membakar barang orang lain.
5. *Maling curi* (maling curi). Maling ialah perbuatan mengambil milik orang lain dengan melakukan perusakan. Curi ialah perbuatan mengambil milik orang lain secara sambil lalu selagi pemiliknya sedang lengah.
6. *Dago dagi* (daga dagi). Daga ialah perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan. Dagi ialah perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan yang bersangkutan.
7. *Kicuah kicang* (kicuh kicang). Kicuh ialah perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain. Kicang ialah perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain.
8. *Sumbang salah* (sumbang salah). Sumbang ialah perbuatan yang menggauli seseorang yang tidak boleh dinikahi. Salah ialah perzinaan dengan isteri orang.

Undang-undang Nan Dua Belas

Undang-undang ini terbagi atas dua bahagian, yang masing-masing mempunyai enam pasal. Enam pasal pertama disebut *tuduah*.

1. *Tatumbang taciak* (tertumbang terciak). Tertumbang tersangka tidak dapat menangkis tuduhan yang didakwakan kepadanya. Terciak ialah tersangka mengakui tuduhan yang didakwakan kepadanya.
2. *Tatando tabukti* (tertanda terbukti). Tertanda ialah ditemukannya milik terdakwa ditempat kejahatan. Terbukti ialah ditemukannya benda-benda yang berasal dari tempat kejahatan pada terdakwa.
3. *Tacancang tarageh* (tercencang teregas). Tercencang ialah ditemukannya bekas, akibat atau milik terdakwa di tempat kejahatan. Teregas ialah ditemukannya pada tubuh terdakwa bekas yang ditimbulkan benda yang berada di tempat kejahatan.
4. *Taikek takabek* (terikat terkebat). Terikat ialah terdakwa terpergok sedang melakukan kejahatan. Terkebat ialah terdakwa terpergok pada tempat kejahatan.
5. *Talalah takaja* (terlalah terkejar). Terlalah ialah terdakwa dapat ditemukan di tempat persembunyiannya. Terkerjar ialah terdakwa dapat ditangkap dalam suatu pengejaran.
6. *Tahambek tapukua* (terhambat terpukul). Terhambat ialah terdakwa dapat ditangkap setelah pengepungan. Terpukul ialah terdakwa dapat ditangkap setelah dipukul atau dikeroyok.

Enam yang lainnya dinamakan "*cemo*" (cemar)

1. *Basuriah bak sipasin, bajajak bak bakiak* (bersurih bagai sipasin, berjejak bagai berkik). Maksudnya, ditemukan jejak seseorang atau tanda-tanda di tanah, jika diikuti ternyata menuju ke arah tersangka.

2. *Enggang lalu, ata jatuah* (enggang lewat, atal jatuh). Maksudnya, di tempat kejahatan terjadi, seseorang terlihat sedang berada di tempat itu.
3. *Kacondongan mato urang banyak* (kecenderungan mata orang banyak). Maksudnya, bahwa seseorang telah menarik perhatian orang banyak karena hidupnya telah berubah tanpa diketahui sebab-musababnya.
4. *Bajua bamurah-murah* (menjual bermurah-murah). Maksudnya, didapati seseorang menjual suatu benda dengan harga yang sangat murah, seolah-olah menjual benda yang bukan miliknya.
5. *Bajalan tagageh-gageh* (berjalan tergesa-gesa). Maksudnya, didapati seseorang berjalan dengan tergesa-gesa pada suatu saat dan tempat yang tidak tepat, seolah-olah ia sedang ketakutan.
6. *Dibao pikek, dibao langau* (dibawa pikat, dibawa lalat). Maksudnya, didapati seseorang hilir mudik pada suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas, sehingga menimbulkan kecurigaan.

Seni menyusun dan mengungkapkan undang-undang hukum pidana adat Minangkabau ini selalu terdiri dari dua kata, dimana kedua kata tersebut hampir bersamaan pengertiannya, tapi kata yang kedua selalu lebih keras dari kata yang pertama.

Kemudian jika dicermati sistematika Undang-undang Nan Delapan dan Undang-undang Nan Dua Belas, diperoleh kesan bahwa ditemukan perbedaan pengertian-pengertian dari masing-masing bagian dari Undang-undang Nan Delapan menurut para pakar atau peneliti. Misalnya terdapat perbedaan pengertian "*dago-dagi* dan *sumbang-salah*" dari Undang-undang Nan Delapan, antara

pendapat A. A. Navis di satu pihak dengan A. M. Dt. Maruhun Batuah, D. H. Bagindo Tanameh dan M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Penghoeloe di lain pihak. Namun dengan memandang hukum adat ini secara lebih luas, maka penulis melihat sekarang ini semua pendapat tersebut benar, dan diakui sebagai norma hukum adat dalam masyarakat.

Kerapatan Ninik Mamak Nan 50 Dikato Kenagarian Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam, dalam suatu musyawarah pada tanggal 31 Juli 1980, yang dihadiri oleh ninik mamak nan 50 dikato, alim ulama, cerdik pandai, membuat pengertian sumbang salah sebagai berikut ²³⁾:

Sumbang dibagi atas: 1. Sumbang menurut pandangan orang lain; 2. Sumbang menurut pelanggaran; 3. Sumbang menurut perbuatan; 4. Sumbang menurut perkataan.

Sumbang menurut pandangan orang lain ialah berpakaian atau bertingkah laku yang menjadi gunjingan orang lain. Sumbang menurut pelanggaran ialah muda-mudi, tua-muda lelaki/perempuan berjalan dengan orang yang tidak patut menurut adat dan disalahkan menurut agama.

Sumbang menurut perbuatan ialah muda-mudi atau tua muda lelaki perempuan yang melakukan perbuatan yang menimbulkan sakit hati orang yang melihatnya dipandang dari segi adat dan agama.

Sumbang menurut perkataan ialah muda-mudi atau tua muda lelaki perempuan yang mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada orang lain, yang menyebabkan tersinggungnya hati orang yang mendengarnya ataupun menimbulkan gunjingan orang banyak sifatnya menghasut atau memfitnah.

Agaknya pengertian sumbang hasil dari kerapatan ninik mamak Nan 50 dikato di atas sejalan dengan pengertian yang dibuat oleh Azmi Djamarin dan Yardi Gond berikut ini ²⁴⁾:

“Sumbang adalah perbuatan yang tidak sesuai atau tidak sopan seperti duduk berdekatan dengan antara laki-laki dengan wanita berhimpit-himpitan paha, bergeser-geseran kulit, bergelut-gelut, mengganggu dengan perkataan tak senonoh terhadap isteri orang atau janda atau gadis yang bukan muhrimnya”.

23) Azmi Djamarin dan Yardi Gond, *Perbuatan dan Sanksi Adat Yang Masih Hidup dalam Hukum Adat Minangkabau Dewasa ini*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1982, halaman 47-48.

24) Ibid, halaman 31.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sumbang belum sampai ke tingkat melakukan perbuatan zina (berhubungan kelamin) di luar nikah. Tidaklah seperti pengertian yang dibuat oleh A. A. Navis di atas, kalau kata “menggauli” ditafsirkan sebagai perbuatan melakukan hubungan kelamin di luar nikah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kaedah-kaedah pidana yang diatur dalam hukum adat pidana Minangkabau adalah seperti yang terungkap dalam Undang-undang Nan XX.

2. Sanksi adat dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau

Sebagaimana layaknya suatu norma hukum, hukum adat pidana yang diatur dalam Undang-undang Nan XX juga mempunyai sanksi yang menurut alam pikiran tradisional masyarakat hukum adat adalah tepat jika hukuman itu diberikan kepada pelanggarnya. Alam pikiran tradisional ini sesuai dengan sifat magis-religius dari hukum adat itu sendiri. Oleh sebab itu akan kita temui pada pelanggaran adat pidana yang merupakan kesalahan yang besar diselesaikan dengan sanksi yang ringan, dan begitu juga sebaliknya, kesalahan yang kecil diselesaikan dengan sanksi yang berat. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya hukum adat pidana Minangkabau tidak mengenal perbedaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Kalau dalam KUHP Indonesia setiap perbuatan yang dilarang dinyatakan hukum dan jumlah sanksi yang akan diterima si pelaku, dalam Hukum Adat Pidana tidak demikian. Semuanya didasarkan kepada suatu prinsip yang dikenal dalam “Mamang Adat” atau adegium adat yaitu *lamak diawak, lamak pulo diurang* (enak di kita, enak pula di orang). Dengan demikian, dalam membuat keputusan yang akan diberikan berdasarkan hal-hal berikut:

1. *Ditimbang jo budi baso* artinya hendaklah dipertimbangkan dengan adil, sesuai dengan harkat seorang manusia yang beradab;
2. *Ditimbang jo harato bando* artinya difikirkan secara matang tentang penderitaan atau hukuman yang akan dijatuhkan;
3. *Ditimbang jo nyawo badan* artinya dalam memberikan pertimbangan jangan sampai lupa bahwa keputusan yang diambil nantinya di Hari Kemudian akan dipertanggungjawabkan;

Jadi dalam hal ini sanksi diberikan semata-mata hanya untuk menciptakan kembali keadaan yang telah terganggu keseimbangannya menjadi tenang kembali. Disamping itu, Lesquillier didalam disertasinya "*Het Adat Delictenrecht in de magische wereldbeshouwing*", mengemukakan bahwa reaksi adat ini merupakan tindakan yang bermaksud mengembalikan ketenteraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat ²⁵⁾.

Pandecten van het Adatrecht, bagian X yang mengumpulkan bahan-bahan mengenai hukum adat delik (*adatsrafrecht*) dan yang diterbitkan pada tahun 1936, memuat daftar nama delik adat dan menyebut berjenis-jenis reaksi adat terhadap delik-delik itu di berbagai-bagai lingkaran hukum adat di Indonesia. Tindakan-tindakan sebagai reaksi atau koreksi terhadap pelanggaran hukum adat di berbagai lingkaran hukum tersebut, adalah misalnya:

- a. Pengganti kerugian *immaterieel* dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan.

25) I Made Widnyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993, Halaman 8

- b. Bayaran *uang adat* kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rokhani.
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf.
- e. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati.
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum²⁶⁾.

Reaksi adat/sanksi adat tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan sanksi adat yang pernah berlaku di daerah Minangkabau.

Berbeda halnya dengan hukum pidana Barat, pada hukum adat pidana Minangkabau bentuk sanksi tidaklah ditentukan untuk masing-masing jenis kejahatan. Hanya dalam pepatah adat dikatakan, kaki teracung inai padahannya, mulut terlanjur emas padahannya artinya sesuatu kesalahan ada hukumannya, ada sanksinya²⁷⁾.

Datoek Batoeah Sango atau Datoek Toeah melukiskan jenis-jenis sanksi adat terhadap para pelanggar aturan delik adat²⁸⁾.

"Bagi pelaku tikam bunuh, hukumannya adalah salah bunuh memberi bangun (denda). Apabila hukuman bangun ini tidak bisa dibayar oleh familinya, diminta tolong kepada sepesukuannya dan lalu kepada kampungnya kalau tidak bisa barulah hukuman talio dijalankan.

Apabila hukum talio dijalankan, karena denda tidak terbayar oleh yang bersalah atau familinya, maka orang yang bersalah itu boleh dibunuh menurut aturan adat.

Pembunuhan ini dilakukan diujung negeri di muka orang banyak, dihadapan kepala-kepala adat. Pesakitan diikat pada sebuah tonggak dan yang mesti membunuh, ialah famili laki-laki yang teraniaya tadi. Akan tetapi tidak boleh langsung ditikam, tetapi sambil menari dengan menggunakan pedang menggores tubuh pelaku yang mengakibatkan luka berbahaya, lalu boleh terus menusukkan pedang sedapatnya sedapatnya tentang hati atau leher supaya lekas mati.

26) Soepomo, **Bab-bab Tentang Hukum Adat**, Cet. XIV, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, Halaman 113

27) Hamka, **Islam dan Adat Minangkabau**, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985, Halaman 90.

28) H. Datoek Toeah, *Op.cit.*, Halaman 175-183

Di bahagian Jambi pelaku pembunuhan dikenakan denda f480, sekiranya raja yang dibunuh, tidak pelaku saja yang dibunuh, tetapi juga segala sanak saudara dan kaum familinya ikut dibunuh.

Di Air Bangis, selain membayar harga darah juga diminta salah seorang famili dari orang yang membunuh untuk pengganti yang mati itu menurut pepatahnya:

"silih nan mati, ganti nan hilang"

Setelah penjajah Belanda berkuasa di Minangkabau hukuman adat seperti yang dikemukakan di atas tidak boleh dilaksanakan; semua pelanggaran akan dihukum menurut undang-undang Pemerintah Hindia Belanda. Rusli Amran menceritakan sebagai berikut ²⁹⁾:

"Bahwa jika terjadi pembunuhan, yang bersalah harus menjalani hukuman badan. Yang dirugikan karena pembunuhan itu, boleh meminta ganti rugi pada hakim walau melebihi jumlah 800 gulden dan itu tetap disebut bangun".

Hukuman bagi pelaku yang menggunakan upas racun, Datoek Toeah menggambarkan sebagai berikut:

"Hukumannya sama dengan hukuman tikam-bunuh atau dibayar denda 20 emas. Di Muara Sungai Lulu, barang siapa yang memberi racun, sisanya dia pula mesti memakan".

"Hukuman bagi orang yang melakukan dago-dagi ialah didenda satu ekor kerbau dan ada pula yang dibuang dan ada pula yang dijadikan budak ke rumah raja (*mahandam ka rumah gadang*), apabila denda tidak terbayar olehnya". Disamping itu ada lagi hukuman yang lain yaitu sesuai dengan kata adat, salah kepada Allah minta tobat, salah kepada manusia minta

29) Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Harapan, 1985, Halaman 237.

maaf, dimana dilakukan dalam suatu perjamuan makan, dihadiri ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai serta para pemuda, yang diadakan oleh pihak yang bersalah.

“Bagi pelaku maling curi tergantung kepada nilai barang yang dicuri, ada yang dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi ada pula jika pencuri tertangkap basah ia boleh dibunuh”.

“Jikalau kedatangan seorang bersetubuh dengan perempuan yang tidak bersuami berlain suku, jikalau perempuan ini mendatangkan hamil berbagai-bagailah hukumannya. Sewaktu masih beraja dahulu perempuan itu dikirim ke istana raja tinggal disana sampai dia melahirkan. Anak yang dilahirkan itu tinggal bersama raja, menjadi budak raja. Ibu si anak dapat ditebus kembali. Tetapi di Minangkabau sesudah raja tidak ada lagi di Pagaruyung, penghulu-penghulu melaksanakan hukuman yaitu dipakaikan baju kerisik (daun pisang yang telah kering) atau baju goni dan diberi berkalung terung kemudian diarak masuk kampung orang yang tertangkap berzina tadi, serta diarak dengan gendang tempurung”.

Jenis sanksi adat seperti yang telah dikemukakan di atas sesudah tahun 1950 tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Azmi Djamin dan Yardi Gond dari hasil penelitian yang mereka lakukan³⁰⁾.

“Bahwa sanksi berupa dipertontonkan sepanjang nagari pada masa dahulunya pernah ditemui di seluruh nagari pada penelitian ini, tetapi setelah tahun 1950-an sanksi tersebut tidak ada lagi. Penjelasan diperdapat, bahwa sanksi yang demikian terlalu merendahkan hak azasi manusia”.

30) Azmi Djamin dan Yardi Gond, Op. cit. Halaman 41.

Di Kanagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang, apabila diketahui seorang wanita telah hamil diluar nikah dan diketahui juga laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki tersebut dipaksa untuk mengawini wanita tersebut. Kemudian kepada keluarga/orang tua kedua belah pihak dituntut uang bangun atau denda sebagai pembersih kampung yang gunanya untuk pembangunan kampung. Jika laki-laki tersebut tidak diketahui, maka anak yang lahir itu disebut anak haram jadah. Perempuan itu bersama anaknya diusir dari Nagari dan keluarga/orang tuanya dibuang sepanjang adat, sampai dia membayar uang denda. Sekiranya laki-laki itu diketahui, tetapi sudah menghilang, maka kepada keluarga/orang tuanya dituntut untuk mengganti kerugian biaya persalinan dan membesarkan anak tersebut. Namun kepada keluarga/orang tua wanita tetap dituntut uang bangun atau denda.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau dikenal dua bentuk sanksi/hukuman yaitu hukuman fisik/hukuman badan dan sanksi non fisik (sanksi moral).

Hukuman fisik/hukuman badan terdiri dari: (1) hukuman mati; (2) dirajam; (3) dijadikan andam atau budak di rumah raja. Hukuman mati/badan ini hampir tidak pernah dilakukan karena dapat dialternatifkan dengan hukuman denda. Sedangkan sanksi non fisik terdiri dari:

(1) hukuman utang, antara lain: (a). minta maaf dan diberi nasehat saja; (b) *barabu dijantiak* (berdebu dijentik); dan (c) *kumuah disasah* (kotor dicuci). Kesemuanya ini harus dengan mengadakan selamatan (mengisi adat), yaitu dengan mengadakan jamuan makan, memotong kerbau. Untuk tiap-tiap Nagari di Minangkabau istilah ini berbeda-beda yang dipergunakan, begitu pula caranya juga berbeda-beda.

- (2) *Bangkak didamak, luko ditaweh* (bengkak dikompres panas, luka diobati), artinya mengganti kerugian.
- (3) Hukuman bangun atau denda.
- (4) Dipermalukan di depan orang banyak.
- (5) Dibuang (pembuangan ini bisa dalam konteks teritorial maupun sosiologis).

Pada umumnya hukuman buang dibagi dalam beberapa tingkatan:

Buang sirih, apabila seseorang yang telah melakukan kesalahan, maka orang itu tidak dibawa lagi sehilir semudik oleh warga masyarakatnya sampai orang itu sanggup membayar denda semisal selajur sirih.

Buang hutang bilah, seorang yang telah melakukan kesalahan maka orang itu diibaratkan sebagai bilah, dimana apabila bilah itu telah dibakar, kemudian menjadi abu, maka abu itu boleh dipakai, maksudnya apabila orang itu telah merobah kelakuannya, kemudian membayar denda atau hutang maka ia boleh dibawa sehilir semudik kembali, tetapi selama belum ada perubahan dan belum membayar denda, maka ia dibuang dari kaumnya dan masyarakat (dibuang sepanjang adat).

Buang tingkarang, yaitu seseorang yang telah membuat kesalahan begitu besar sehingga tidak dapat dimaafkan lagi, maka orang itu tidak dapat dipakai lagi dan tidak boleh dibawa lagi seadat sepusaka dalam kaumnya berarti orang itu sudah dibuang habis. Apabila ini terjadi pada seorang penghulu, maka penghulu itu akan dicabut kerisnya oleh dubalang di muka rapat, dan dibuka pusakanya/diberhentikan dari tugas kepenghuluannya ³¹⁾.

31) Yansalz Isatry, **Pemberhentian Sementara atau Selamanya dari Tugas Kepenghuluan/Meruntuh Penghulu di Minangkabau**, Skripsi, FHUK UNAND Padang, 1982, Halaman 16-17.

Di Kanagarian Padang Lawas, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal jenis hukuman buang: dengan nama "*jatuah basapiah*". "Hukuman *jatuah basapiah* yaitu hukuman yang dibebankan kepada seorang ibu beserta anak-anaknya, yaitu diusir dari nagari, dipandang telah melakukan pelanggaran aturan delik adat"³²⁾.

Dari kesemua sanksi / reaksi adat tersebut di atas sekarang ini telah banyak terjadi pergeseran bahkan ada yang tidak dijalankan lagi. Seperti hukuman mati, hukuman badan dan mempermalukan dihadapan orang ramai.

Perubahan/pergeseran itu disebabkan oleh perubahan waktu, sehingga alam fikiran tradisional Minangkabau berangsur menentukan bentuk pidana yang pantas diberikan kepada pelanggarnya. Hal ini terlihat pada keputusan kerapatan Ninik Mamak Nan 50 Dikato tanggal 31 Juli 1980. Jenis-jenis sanksi adat dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Minta maaf, artinya setelah *dusua jo pareso* (diusul dan diperiksa), terbukti si tersangka melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, maka dianya diberi sanksi menurut adat *barubah basapo* (berubah ditegur), *batuka baasak* (bertukar dikembalikan kepada semula), tersangka harus bersedia minta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya untuk kedua kalinya.
2. *Baabu bajantiak* (berabu dijentik), artinya setelah diperiksa terbukti si tersangka melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, maka dianya harus melakukan *kumuah basasah* (kotor dicuci) menurut sepanjang adat, kok adat diisi, limbago dituang.

32) Narullah, Op. cit., Halaman 66)

3. Dibuang sepanjang adat, artinya setelah diusul dan diperiksa terbukti telah melanggar adat, *lah bajajak bak bakiak, lah babarih bak sipasin* yang menyebabkan tumbuh hino malu pada orang lain ataupun pada kaum si tersangka, maka si tersangka dibuang sepanjang adat. Dapat diterima kembali menurut adat, setelah si tersangka dapat memenuhi keputusan rapat ninik mamak Nan 50 Dikato.
4. Dibuang di nagari menurut sepanjang adat, artinya setelah diusul dan diperiksa terbukti tersangka telah melakukan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang atau cacadnya seseorang, hilang/rusaknya kehormatan seseorang, maka tersangka dibuang di nagari menurut sepanjang adat. Tumbuh adat berdiri di nagari atau tumbuh adat bersuku atau kok tumbuh adat nan sapayuang si tersangka tidak dapat dibawa sehilir semudik, tidak dapat tanah tempat tumbuh, tidak dapat batang tempat bersandar, dibuang ke bukit tak berangin, dibuang ke lurah tak berair. Si tersangka dapat diterima kembali di nagari menurut sepanjang adat, setelah dapat memenuhi keputusan ninik mamak Nan 50 Dikato³³⁾.

Berdasarkan penelitian penulis secara garis besar dalam adat Minangkabau jenis hukuman yang sering diberikan untuk kesalahan yang dinilai cukup berat seperti delik kesusilaan (sumbang salah) adalah hukuman buang sepanjang adat, baik berupa buang dalam artian psikis dan sosiologis, maupun buang dalam konteks teritorial.

33) Azmi Djamarin dan Yardi Gond, Op. cit. Halaman 46-47)

Dalam pelaksanaan hukuman buang itu dapat dialternatifkan dengan hukuman denda. Hukuman denda ini juga dapat dikenakan terhadap keluarga atau kaumnya. Apabila hukuman pengganti itu telah dipenuhi, maka hukuman buang batal dengan sendirinya.

Adakalanya dalam penjatuhan hukuman itu dilakukan secara kumulatif. Misalnya hukuman denda ditambah dengan hukuman permintaan maaf atau *maisi adat* / memenuhi kewajiban adat ditambah dengan hukuman permintaan maaf.

Pada umumnya di Minangkabau hukuman yang dijatuhkan ditujukan kepada jiwa atau moril seseorang bukan kepada fisik. Seperti dalam kasus pembunuhan, dihukum dengan hukuman bangun, artinya yang membunuh menyerahkan diri kepada orang tua yang dibunuh dalam rangka utang nyawa dibayar nyawa, tetapi dalam hal itu ada pula keringanannya yaitu penebusan dengan denda, bisa dengan emas.

Dalam perkembangannya dapat dikatakan bahwa di dalam hukum adat pidana Minangkabau sanksi moral seperti permintaan maaf dan buang lebih diupayakan dibanding sanksi yang bersifat fisik. Menurut beberapa pakar adat Minangkabau diantaranya Idrus Hakimy mengatakan bahwa setiap masyarakat Minangkabau terikat dengan sukunya. Didalam diri mereka ada ikatan batin dengan sukunya. Ikatan batin itu sangat kuat sekali sehingga mereka akan merasa malu jika dikucilkan dari suku atau masyarakatnya.

Dalam budaya hukum Minangkabau sebesar/sekecil apapun kesalahan dan juga telah dijatuhi hukuman tidak akan memenuhi rasa keadilan dan rasa perdamaian, jika pihak yang bersalah belum meminta maaf kepada korban/keluarga, dan terutama kepada masyarakat yang telah terganggu ketentramannya akibat peristiwa tersebut.

Selanjutnya Idrus berpendapat sanksi moral lebih ampuh di Minangkabau jika dibanding dengan sanksi fisik. Hal ini disebabkan karena adanya budaya malu yang dimiliki oleh masyarakat adat Minangkabau. "Malu" adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Menurut alam pikiran masyarakat adat Minangkabau, malu seorang adalah malu bersama, bahkan malu itu berlaku untuk tujuh keturunan.

Apabila seorang individu melakukan perbuatan tercela, maka keluarga, anggota kerabat yang lain ikut bertanggung jawab ³⁴⁾. Hal ini sering diungkapkan dengan pepatah petiti:

"Kok tanah sabingkah alah bamiliak, kok rumput sahalai alah bapunyo, malu nan alun babagi".

Artinya: Jika tanah sebungkah telah bermilik, jika rumput sehelai telah mempunyai, malu yang tidak dapat dibagi ³⁵⁾.

Konsekuensi logis dari budaya malu ini adalah setiap orang atau keluarga atau kerabat dengan berbagai usaha senantiasa menjaga dirinya dan keluarga agar tidak melakukan kejahatan/pelanggaran. Dari segi positifnya budaya malu merupakan alat penghalang yang kuat bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang akan mencemarkan diri dan nama baik keluarga dan keturunannya.

Bila diperhatikan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pihak yang telah terbukti melakukan kesalahan, terlihat bahwa bentuk sanksi itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Keseluruhan sanksi tersebut

34) H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 1998 di Padang.

35) A. A. Navis, *Op. cit.*, Halaman 66.

lebih banyak bersifat sanksi moral yang mendatangkan kerugian bagi harga diri seseorang, yang kadang dirasakan sangat berat oleh yang terkena hukuman tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum adat lebih banyak bersifat preventif ketimbang memberikan suatu nestapa kepada pelaku kejahatan (represif).

3. Asas-asas yang terkandung dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau

Sebenarnya banyak asas-asas hukum yang dapat ditarik dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau akan tetapi penulis tidak akan mengemukakan secara keseluruhan melainkan hanya beberapa saja, yang menurut hemat penulis menonjol antara lain:

a. Asas Legalitas

Sebagaimana sudah diuraikan diatas bahwa sebagian besar norma Hukum Adat Pidana Minangkabau terungkap dalam Undang-undang Nan Duo Puluah. Semua aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang tersebut sudah diketahui bahkan sudah melekat dalam benak setiap warga masyarakat Minangkabau. Sehingga apa bila norma-norma tersebut dilanggar akan mendapat reaksi dari masyarakat adat yang dilaksanakan oleh pemuka-pemuka adat.

b. Asas Kesalahan

Kata delik sering diucapkan oleh orang Minangkabau dengan kata "salah" pada kesalahan identik dengan perbuatan yang dilarang, bila melakukan pelanggaran berarti ada kesalahan begitu sebaliknya. Hukum Adat Pidana Minangkabau tidak membedakan kesalahan dalam kesengajaan atau kealpaan.

Menurut Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, salah menurut adat dapat dibagi atas empat bagian ³⁶⁾.

Pertama : Salah di'adat namanya.

Kedua : Salah diundang-undang namanya.

Ketiga : Salah dicupak namanya.

Keempat: Salah diagama hukum syara' namanya.

Salah di'adat diantaranya adalah:

Salah jual = sengaja menjual barang yang bukan haknya.

Salah menjual = tidak sengaja menjual

Salah beli = sengaja membeli barang yang tidak patut dibeli.

Salah membeli = tidak sengaja membeli barang yang tidak patut dibeli.

Salah bawa = sengaja membawa barang yang tidak patut dibawa.

Salah membawa = tidak sengaja membawa.

Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tergantung kepada berat ringannya kesalahan, salah pada tingkat pertama lebih berat dari salah tingkat kedua.

Salah diundang-undang, yaitu melanggar aturan delik yang terkandung dalam Undang-undang Nan Duo Puluah. Salah dicupak, artinya tidak mau mematuhi aturan tingkah laku dalam hidup bermasyarakat, misalnya tidak mau membayar hutang, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau bekerjasama dalam pergaulan hidup.

Salah diagama, yaitu tidak mau melakukan perbuatan yang disuruh oleh agama, dan tidak mau menghentikan perbuatan yang dilarang oleh agama.

36) Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Op. Cit., Halaman 21-25.

c. Azas Pertanggungjawaban Individual

Dalam Hukum Adat Minangkabau segala perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan, sebagaimana terkandung dalam pepatah “tangan mencencang bahu memikul” artinya siapa yang berbuat salah dia harus menanggung akibat dari perbuatannya tersebut.

d. Azas Pertanggungjawaban Kolektif

Dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau di samping pertanggungjawaban individu juga dikenal pertanggungjawaban kolektif artinya tidak hanya si pelanggar saja yang bertanggungjawab atas perbuatannya, tetapi juga keluarga, kadang-kadang mamak, bahkan kaum si pelanggar juga ikut bertanggung jawab. Sekarang ini bentuk dari tanggung jawab keluarga adalah berupa bangun/denda, diibuang sepanjang adat atau *maisi adaik/manatiang jamba/manatiang kasalahan*.

e. Azas Keseimbangan

Dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan *Undang-undang Nan Duo Puluah*, berarti telah terjadi gangguan terhadap keseimbangan didalam masyarakat. Hal ini terutama pelanggaran terhadap aturan “Sumbang-salah” dan Dago-dagi”, untuk itu harus dilakukan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Biasanya dilakukan dalam suatu upacara adat yang disebut dengan *maisi adait/manatiang jamba*. Untuk masing-masing daerah berbeda istilah yang dipakai, caranya juga berbeda-beda. Di Kanagarian Paninggahan disebut *manatiang kasalahan*. Di Daerah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, apabila seseorang menghina penghulu maka keluarga/kaumnya harus mengadakan upacara adat dengan

jamuan makan untuk penghulu-penghulu, ninik mamak, alim ulama dan pemuda-pemuda beserta orang kampung, dengan memotong seekor kerbau dan kepalanya ditambah dengan cerano berisi sirih diserahkan untuk menebus kesalahan dan saat itu lengkap kaum yang bersalah mengajukan permohonan maaf kepada Penghulu/kaum yang dihina tersebut dengan disaksikan oleh orang banyak.

f. Azas Penyelesaian Konflik

Pada umumnya pelanggaran delik adat di Minangkabau diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, sesuai dengan pepatah *indak ada kusuik nan indak ka salasai, indak ado karuah nan indak ka janiah* (tidak ada kusut yang tidak akan selesai, tidak ada keruh yang tidak akan jernih). *Lamak di awak ka tuju pulo di urang* (enak di kita suka pula di orang), caranya diajarkan pepatah *bak maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih, tapuang indak taserak* (seperti menghela rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak terserak), maksudnya hati-hati dan penuh tenggang rasa dan kesabaran.

Apapun kemudian putusan yang diambil selalu diupayakan secara damai, maka sanksi permohonan maaf ini sangat memegang peranan sekali di Minangkabau.

g. Azas Sanksi Kumulatif

Dengan Hukum Adat Pidana Minangkabau sering terjadi penjatuhannya sanksi secara kumulatif adakkalanya disamping membayar bangun/denda juga membayar ganti rugi kepada korban atau disamping melakukan upacara adat/*maisi adait* harus pula memohon maaf dihadapan orang banyak, dan lain-lain.

h. Azas Sanksi Alternatif

Dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau juga dikenal sanksi alternatif. Seseorang yang bersalah misalnya diberi sanksi dibuang sepanjang adat, maka sanksi ini bisa diganti dengan uang bangun/denda. Apabila denda sudah dibayar, maka hukuman buang hapus dengan sendirinya. Contoh lain, seseorang yang dibuang ke luar Nagari bisa diterima kembali apabila melakukan upacara adat/*maisi adait* atau dengan kata lain melakukan *kumuah basasah* (kotor dicuci).

i. Azas Dihadapan Umum

Pelaksanaan penjatuan hukuman dilakukan oleh pimpinan adat yang dihadiri oleh masyarakat. Biasanya juga dilakukan upacara adat guna mengembalikan keseimbangan magis yang juga diikuti oleh masyarakat, sehingga segala bentuk keputusan diketahui/disaksikan oleh warga masyarakat dan pengembalian keseimbangan yang dilakukan dalam upacara adat menyebutkan kesalahan pelanggar atau delik apa yang dilanggar secara terbuka.

Asas ini terdapat juga pada Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam melaksanakan upacara adat untuk mengembalikan keseimbangan magis dilakukan oleh penghulu (Ketua Kerapatan Adat Nagari) dan pelanggar serta diikuti oleh masyarakat se-kenagarian, demikian juga dalam sidang-sidang perkara boleh dihadiri oleh masyarakat.

j. Azas Santun di Muka Umum

Setiap warga masyarakat Minangkabau harus bersikap santun dimuka umum, terlebih perilaku seseorang terhadap orang lain di muka umum. Tidak dibenarkan merusak tata susila adat. Dalam adat Minangkabau ini disebut *adat bajokok-badukalo* yaitu adat yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari yang

senantiasa mencerminkan budi pekerti yang mulia, saling hormat-menghormati, lebih-lebih terhadap ibu-bapak dan orang yang tua dari kita.

Hal ini sebagaimana ajaran adat dalam papatah-petitih adat berikut ini:

Syariat palu-memalu, (Syariat palu-memalu)

Dunia baleh-mambaleh, (dunia balas-membalas)

Imbau biaso basauti, (himbau senantiasa disahuti)

Hawo nan pantang karandahan, (hawa yang pantang kerendahan)

Napasu nan pantang kakurangan, (nafsu yang pantang kekurangan)

Kok jauh cinto-mancintoi, (kalau jauh cinta-mencintai)

Dakek jalang-manjalang, (kalau dekat jelang-menjelang)

Sakik basilau mati bajanguak, (sakit perlu dilihat, mati selalu berjenguk)

Alek bapanggih mati bajirambau, (elat berpanggil, mati berhimpunan)

Nan elok bahimbauan, (yang elok dihimbauan)

Nan buruak bahambauan, (yang buruk berhamburan)

Nan tuo dihormati, (yang tua dihormati)

Nan ketek dikasihi, (yang kecil dikasihi)

Samo gadang baok bakawan, (sama besar bawa berkawan).

Setiap anggota masyarakat hendaklah melaksanakan tolong-menolong, bantu-membantu, hormat-menghormati sesamanya, dan senantiasa merasakan yang sakit oleh kita juga sakit oleh orang lain, dan seterusnya.

k. Azas Perlindungan Terhadap Korban

Pelanggaran delik adat ada kalanya mendatangkan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau korban pelanggaran delik sangat diperhatikan, sehingga korban tidak menderita (kesusahan) hidupnya, dicemooh masyarakat, menanggung rasa

malu dalam masyarakat. Seperti kata pepatah "*luko ditaweh, bangkak didamak*" artinya luka diobati (ganti kerugian).

l. Azas Perlindungan Terhadap Wanita

Wanita di Minangkabau mendapat tempat yang terhormat dan dimuliakan. Wanita diibaratkan sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang, ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito* (Limpapeh Rumah Nan Gadang, mau pergi tempat bertanya, mau pulang tempat berberita). Melakukan kesalahan terhadap wanita merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan berat hukumannya.

m. Azas Kekerabatan

Perkawinan tidak boleh dilaksanakan dalam garis keturunan menurut garis ibu (kawin sesuku), karena dapat merusak kekerabatan dalam suatu suku. Sebab keturunan ditarik dari garis ibu/matrilinial.

n. Azas Perlindungan Hukum atau Pengayoman

Merampas hak orang lain atau menguasai harta seseorang dengan cara melawan hukum sama sekali tidak dibenarkan dalam hukum adat Minangkabau, berbunyi dalam Undang-undang Nan Salapan yang disebut dengan perbuatan *rabuit-rampeh*. Perbuatan ini terang-terangan bertentangan dengan hak azasi manusia, maka hak seseorang dilindungi dengan undang-undang.

o. Azas Musyawarah

Dalam menyelesaikan kasus-kasus melawan hukum, ninik mamak menyelesaikannya dengan musyawarah yang dilandasi oleh pepatah adat *lamak dek awak katuju dek urang* artinya senang bagi kita disukai pula oleh orang. Musyawarah dilakukan mulai dari tingkat terendah (kaum) sampai

dengan tingkat yang tertinggi (Kerapatan Adat Nagari), seperti bunyi pepatah *bajanjang naik batanggo turun*.

p. Azas Kedudukan Terhadap Penghulu

Sanksi yang diberikan kepada penghulu sebagai pelanggar yang melanggar kehormatan atau kesusilaan, lebih tinggi dari masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran. Begitu pula jika kehormatan penghulu yang dilanggar akan lebih tinggi sanksinya dibanding pelanggaran terhadap kehormatan masyarakat biasa. Sesuai dengan kata pepatah penghulu adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting (yang menjadi pemimpin dalam Nagari).

4. Penyelesaian delik adat dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau

Kalau terjadi delik Adat maka penyelesaiannya dilakukan oleh suatu lembaga peradilan Adat. Lembaga peradilan Adat dikenal bertingkat mulai dari apa yang disebut Kerapatan Adat Sepayung (satu perut), kemudian Kerapatan Adat Sekampung, dan terakhir Kerapatan Adat Nagari. Anggotanya terdiri dari orang ampek jinih (empat jenis) yaitu: penghulu, cerdik pandai, alim ulama dan parit pagar (manti, hulubalang, panglima, pendekar atau pemuda-pemuda yang dinilai telah matang dewasa lagi arif).

Pada prinsipnya penyelesaian perkara haruslah berdasarkan ketentuan berjenjang naik bertanggung turun, artinya mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa setiap perkara terlebih dahulu diselesaikan oleh penghulu satu perut (sepayung) dalam pesukuan kedua belah pihak. Cara penyelesaiannya dengan memegang prinsip "kusut diselesaikan, keruh diperjernih".

Bila antara kedua belah pihak tidak mau berdamai atau merasa kurang puas, kemudian perkaranya dibawa ke Kerapatan Adat Sekampung, jika tidak juga selesai terakhir akan diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari. Namun demikian Hukum Adat Pidana Minangkabau senantiasa selalu terbuka menerima perkembangan dalam artian kriminalisasi dan dekriminalisasi yang disesuaikan dengan pertimbangan *alua jo patuik*, sesuai dengan pepatah:

Usang-usang dipabaharui (usang-usang diperbaharui),

Nan buruak dibuang jo etongan (yang buruk dibuang dengan hitungan),

Nan elok dipakai jo mufakait (yang baik dipakai dengan mufakat),

Kok singkek diuleh (jika pendek disambung),

Panjang dikarek (panjang dipotong),

Nan umpang disisik (yang bolong disisip).

Penyelesaian delik adat dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau diperlukan beberapa unsur yang ada hubungannya dengan perkara yang akan diselesaikan. Biasanya unsur tersebut berupa beberapa pribadi dari yang bersangkutan dengan kasus tersebut, yakni antara lain:

- a. Hakim yang berupa majelis, yang terdiri dari penghulu-penghulu, cerdik pandai, alim ulama, pemuka masyarakat.
- b. Tersangka, baik seorang ataupun lebih, tergantung dari perkara yang diselesaikan.
- c. Korban yang terkena, baik seorang ataupun lebih.
- d. Saksi (saksi-saksi) yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Pada perkara adat pidana dibenarkan memakai pengacara (pokrol/kapalo koto atau apapun nama lainnya), yang akan membantu si tersangka dalam persidangan tersebut.

Tempat persidangan untuk penyelesaian perkara yang dominan digunakan adalah di Kantor Wali Nagari atau Desa, di Balai Adat atau tempat lainnya yang berhubungan dengan adat, seperti surau, kantor KAN dan Balai Pertemuan Nagari. Juga dapat dilakukan di tempat lain sesuai permintaan yang berperkara. Jadi tempat persidangan itu pada umumnya berada di dekat tempat para pelaku itu sendiri.

Dalam menyelesaikan perkara kejahatan tentu diperlukan pembiayaan, begitu juga dalam persidangan terhadap perkara di atas. Tetapi pada kenyataannya lebih banyak yang tidak memungut bayaran. Apabila delik adat itu terjadi dalam suku atau kaum yang sama, yang memutus perkara itu adalah fungsionaris dari suku atau kaum bersangkutan baik itu berupa ninik mamak dalam kaum atau suku yang bersangkutan maupun penghulu atau dan mamak kepala warisnya. Tetapi kalau Kerapatan Adat Nagari yang memutuskan tentu saja dibutuhkan pembiayaan yang ditanggung oleh para pihak yang berperkara. Dalam pembayaran jumlah dan caranya bervariasi. Ada yang tegas menentukan jumlahnya lebih kurang Rp. 25.000,- tetapi ada pula yang tidak ditentukan. Di samping itu apa pula yang dalam sidang pertama dibayar oleh si pengadu, sedangkan sidang-sidang selanjutnya dibagi dua antara si pengadu dengan yang diadukan³⁷⁾.

Apabila diperhatikan jumlah anggota sidang peradilan pidana adat berkisar antara satu sampai dengan tujuh orang. Tetapi ada pula yang sampai 60 orang bahkan berjumlah 103 orang. Atau dengan kata lain tergantung kepada kualitas dari perkaranya. Pada perkara yang disidang oleh majelis yang demikian besar,

37) Tasjirif Aliumar, **Kekuatan Penguasa Adat dalam Perkara Pidana Adat di Sumatera Barat**, Kumpulan Hasil Penelitian dalam Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau, Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1988, Halaman 66.

secara teoritis akan susah ditemukan kesepakatan untuk membuat putusan. Dalam kenyataannya tidak demikian, sistem musyawarah untuk mufakat yang dilandasi nilai "*lamak dek awak, katuju dek urang*" atau enak bagi kita disukai oleh pihak lain keputusan akan bisa diambil secara musyawarah.

Para hakim dalam mengadili tiap kesalahan yang diajukan adalah berdasarkan pendapat para hakim yang mengacu kepada salah satu dari Undang-undang Nan Salapan (yang merupakan bagian dari Undang-undang Nan Duo Puluah). Dalam hal ini para hakim akan bermusyawarah tentang kesalahan tersebut terlebih dahulu, apakah kasus tersebut benar melanggar Undang-undang Nan Salapan. Setelah ini disepakati kemudian barulah para hakim membahas sanksi adat apa yang biasanya dipergunakan dan yang menurut majelis paling tepat dan adil untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus tersebut, seperti bunyi pepatah *tibo di paruit indak dikampihkan, tibo di mato indak dipicingkan* (tiba di perut tidak dikempiskan, tiba di mata tidak dipicingkan).

Untuk memastikan bersalah atau tidaknya si tersangka adalah dengan melakukan tanya jawab dalam persidangan tersebut antara tersangka, saksi dan juga dengan korban sendiri. Dengan adanya tanya jawab diharapkan akan diperoleh cara penyelesaian yang memuaskan, sehingga diharapkan masyarakat akan dapat aman kembali. Jadi disini diperlukan kelihaian dari para hakim adat untuk dapat membuat terang sesuatu perkara yang disidangkannya. Disini diperlukan sudi dan siasat yang jitu, hingga keterangan yang semula yang bersifat *cemo* (sangka yang didasarkan perasaan saja) dapat menjadi tuduhan yang konkrit. Atau dengan perkataan lain menurut kata-kata adat: *dari basuriah bak sipasan, dari bajajak bak bakiak, manjadi siang bak hari, tarang bak bulan, sahinggo*

batali buliah diirik, batampuak buliah dijinjiang, kok diimbau inyo datang, kok dipanggia inyo manyahuik.

Setelah melalui sudi dan siasat di atas, maka “teranglah” suatu perkara. Kalau perkara sudah terang dapatlah hakim menjatuhkan putusannya terhadap tersangka. Dalam menjatuhkan keputusan berupa bersalah atau tidak tersangka, diperlukan pembuktian sebagai landasan dalam pemberian vonis. Pembuktian yang diajukan biasanya dapat berupa benda yang menjadi objek perkara, alat-alat yang dipakai dalam peristiwa delik adat, pengakuan dari si pelaku, keterangan saksi dan bekas yang ditemui pada diri si korban.

Amar dari putusan penguasa adat dalam mengadili delik adat pada umumnya lebih banyak bersifat perdamaian, walau ada juga yang memberikan sanksi yang berupa penghukuman, di samping mungkin dengan pemberian nasehat kepada para pelaku.

Tujuan putusan sekarang lebih diutamakan hanya dari segi moral saja, tidak ditujukan untuk menyakiti fisik pelaku. Walau dulunya dikenal ada yang sampai dibunuh ataupun dijadikan budak yang dapat ditebus dengan membayar sejumlah uang. Bentuk putusan yang menyakiti fisik tersebut sekarang sudah tidak ditemui lagi. Sekarang putusan yang diberikan kepada kasus delik adat adalah berupa perdamaian, penghukuman dan nasehat. Mengenai perdamaian yang dimaksud adalah berupa ganti kerugian kepada korban berupa uang atau pengobatan, bisa juga dalam bentuk mengganti barang yang telah diambil (*luko ditaweh bangkak didamak*). Kasus yang diputuskan dengan perdamaian ini adalah delik adat berupa pembakaran, penganiayaan, pencurian, perkelahian dan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan putusan yang berupa penghukuman adalah berupa buang sepanjang adat, pemberian denda dan mengisi adat.

Putusan berupa pemberian nasehat adalah kasus sumbang, disini pelakunya diberi petuah oleh majelis bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan baik dilihat dari segi adat maupun segi agama. Disamping bentuk vonis di atas, biasanya disertai dengan suatu surat perjanjian bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulang perbuatan yang telah dilakukannya itu.

5. Perbandingan sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dengan sistem hukum pidana menurut WvS/KUHP

Dalam membahas tentang perbandingan sistem Hukum Adat Pidana Minangkabau dengan sistem hukum pidana menurut WvS/KUHP penulis akan menggunakan kerangka yang mengacu kepada unsur-unsur pokok dari sistem hukum adat pidana menurut Hilman Hadikusuma³⁸⁾, yaitu: (1) Sistem terbuka; (2) Perbuatan salah; (3) Pertanggungjawaban kesalahan; (4) Menghakimi sendiri; (5) Membantu atau mencoba berbuat salah; (6) Kesalahan residif; (7) Berat ringan hukuman; (8) Hak mendapat perlindungan; dan (9) Kesalahan didalam hukum adat.

1. Sistem terbuka

Sistem pelanggaran yang dianut Hukum Adat Pidana Minangkabau adalah sistem terbuka. Menurut Hukum Adat Pidana Minangkabau hal-hal yang dilarang atau dibolehkan akan selalu diukur dengan mata rantai kehidupan masyarakat.

38) Hilman Hadikusuma, **Hukum Pidana Adat**, Bandung: Alumni, 1989, Halaman 21-29

Segala sesuatu yang terjadi dapat saja merupakan pelanggaran apabila kejadian itu tidak sesuai, bertentangan atau mengganggu kehidupan warga masyarakat adat Minangkabau. Apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan, maka para ninik mamak dan penghulu akan berusaha mengembalikan keseimbangan itu dengan mencari jalan penyelesaian. Keinginan untuk menyelesaikan pelanggaran dalam masyarakat adat Minangkabau seringkali bukan saja timbul dari ninik mamak dan penghulu adat, tetapi juga dari pihak yang merasa berbuat merugikan atau dari pihak keluarganya. Kesadaran semacam ini sangat tinggi terasa di wilayah atau nagari yang masih kuat memegang adat Minangkabau. Jika kesepakatan untuk diselesaikan tercapai barulah kemudian dilihat norma-norma dan sanksi-sanksi Hukum Adat Pidana Minangkabau yang berlaku selama ini atau menentukan hukum yang baru untuk penyelesaian kasus tersebut.

Sedangkan hukum pidana barat (contoh: WvS) atau KUHP menganut sistem tertutup yang terikat pada suatu ketentuan sebagaimana makna Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan".

2. Perbuatan salah

Menurut sistem hukum pidana barat atau KUHP perbuatan yang salah yang berakibat dapat dijatuhi hukuman ditujukan pada orang yang berbuat kesalahan, dan kesalahan itu dilihat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Hukum Adat Pidana Minangkabau tidak memakai sistem demikian, ia tidak melihat apakah

perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, tetapi melihat pada akibatnya, apakah karena akibat itu diperlukan adanya koreksi dan reaksi yang berat atau yang ringan, apakah hanya cukup dibebankan kepada yang berbuat saja atautah, perlu juga dibebankan kepada keluarga, suku atau keseluruhan masyarakat nagari, atau boleh jadi juga dibebankan kepada kedua pihak baik yang berbuat salah atau juga yang terkena akibatnya.

Menurut sistem hukum pidana barat setiap delik berarti bertentangan dengan kepentingan negara (umum), oleh karenanya perbuatan salah harus dapat dibuktikan saalahnya, jika tidak terbukti maka yang dituduh bersalah tidak dapat dihukum. Sedangkan Hukum Adat Pidana Minangkabau hanya mengenal delik yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang. Begitu pula ada delik adat yang memerlukan pembuktian, tetapi ada pula yang tidak memerlukan pembuktian sama sekali dikarenakan sudah dianggap umum mengetahuinya atau dikarenakan umum sudah terkena akibat perbuatannya.

3. Pertanggungjawaban kesalahan

Menurut hukum pidana barat seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan salah adalah orang yang berfikiran waras, sehingga terhadap orang gila yang melakukan perbuatan salah, tidak dapat dihukum. Hukum Adat Pidana Minangkabau tidak membedakan orang waras atau tidak waras, yang dilihat adalah akibatnya, oleh karena pihak yang dirugikan dapat saja menuntut ganti kerugian atau penyelesaian terhadap akibat perbuatan orang gila pada pihak keluarga/kerabat orang gila yang bersalah, walaupun cara penyelesaian dan ganti ruginya dapat berlaku lebih ringan dari pada perbuatan salah orang yang waras.

4. Menghakimi sendiri

Menurut Hukum Adat Pidana Minangkabau, perorangan, keluarga, suku yang menderita kerugian sebagai akibat kesalahan seseorang, dapat bertindak sendiri menyelesaikan dan menentukan hukuman ganti kerugian dan lain-lain terhadap pelaku yang telah berbuat salah, tanpa menunggu penyelesaian oleh Kerapatan Adat Nagari setempat, jika mampu menyelesaikan dengan baik. Di Minangkabau berlaku *adait tarikh* dimana pihak penderita berhak menahan atau mengambil barang sipelaku atau barang-barang keluarganya sebagai jaminan agar pihak pelaku membayar ganti kerugian atau denda adat.

Selain hak menghakimi sendiri oleh pihak penderita, menurut Hukum Adat Pidana Minangkabau, apabila perbuatan salah itu mengenai kebendaan, maka pihak yang terkena berhak menuntut nilai ganti kerugian berdasarkan ukuran nilai bendanya. Barang-barang biasa akan lebih ringan nilai tuntutan ganti ruginya dari barang-barang yang bersifat magis-religieus, seperti alat perlengkapan adat, pusaka warisan, dan lain-lain.

5. Membantu atau mencoba berbuat salah

Menurut Hukum Adat Pidana Minangkabau tidak dikenal perbuatan yang bersifat "membantu berbuat" (*medeplichtigheid*), atau "membujuk berbuat" (*uitlokking*) atau "ikut berbuat" (*mededaderschap*) oleh karena semua perbuatan itu merupakan rangkaian yang menyeluruh dan siapa saja, bagaimanapun bentuk dan sifat perbuatan itu, segala sesuatunya dianggap sebagai suatu kesalahan yang harus diselesaikan apakah dengan hukuman ataukah dengan ampunan, jika dihukum kesemuanya dihukum, jika diampuni

kesemuanya diampuni, tidak boleh dipisah-pisahkan masalahnya, oleh karena jika demikian berarti tidak selesai.

Menurut hukum pidana barat sebagaimana terdapat dalam KUHP ada yang disebut "*strafbare poging*" atau usaha percobaan yang dapat dihukum. Hukum Adat Pidana Minangkabau tidak mengenal sistem demikian, dengan kata lain apapun bentuk dan sifat percobaan yang telah dilakukan untuk berbuat salah tidak dapat dihukum, kecuali usaha percobaan itu mengganggu keseimbangan hidup masyarakat.

6. Kesalahan residif

Menurut hukum pidana barat seseorang yang telah berkali-kali melakukan perbuatan salah hanya dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan salahnya yang terakhir. Menurut Hukum Adat Pidana Minangkabau kesemua perbuatan salah yang telah dilakukan diperhitungkan dan dinilai keseluruhannya, untuk dapat mempertimbangkan apakah si pelaku masih dapat dimaafkan dan diampuni perbuatannya ataukah ia perlu diambil tindakan lebih jauh. Penyelesaian oleh ninik mamak dan penghulu dapat saja diserahkan kepada keluarga atau kerabat bersangkutan untuk diambil tindakan seperlunya atau jika kerabat bersangkutan menyerahkan saja kepada Kerapatan Adat Nagari, maka pelaku residif itu disingkirkan sama sekali dari pergaulan masyarakat, misalnya seperti disebut dalam istilah Minangkabau di "buang tingkarang", artinya dibuang untuk selama-lamanya dari persekutuan hukum adat (Nagari). Dengan dijatuhi hukuman buang tingkarang ini maka si pelaku yang bersalah tidak dibenarkan lagi untuk kembali ke kampungnya dan bergaul dengan kaum kerabatnya.

Kesalahan residif adat yang berakibat dibuang untuk selama-lamanya dari lingkungan masyarakat, dilakukan terhadap seseorang yang telah berulang-ulang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga golongan masyarakat dan kerabat yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi memperbaikinya. Tetapi jika kaum kerabat si bersalah itu masih sanggup memperbaikinya maka si bersalah dapat hanya diselesaikan dengan hukuman “buang sirih” yaitu dibuang untuk beberapa tahun dari lingkungan kerabat. Misalnya dikarenakan perbuatan zina yang dilakukan oleh muda-mudi, maka keduanya dikawinkan kemudian disuruh meninggalkan kampung halaman untuk sementara waktu. Begitu pula terhadap seseorang yang berulang-ulang suka berhutang dan tidak membayar, sehingga kerabat ikut serta menanggung hutang itu. Terhadap seseorang yang bersalah suka berhutang tidak membayar ini dapat dihukum “buang hutang” oleh kerabatnya, ia disuruh pergi dari kaum kerabatnya sampai ia dapat bertobat dan dapat hidup baik tidak mengganggu keseimbangan kerabatnya.

7. Berat ringan hukuman

Dalam KUHP, Buku I Bab III terdapat aturan tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana (Pasal 44-52). Dengan aturan-aturan tersebut maka Hakim tidak boleh membuat-buat alasan lain untuk melenyapkan, mengurangi dan menambahkan hukuman selain dari aturan yang sudah ada.

Didalam peradilan Adat Pidana Minangkabau yang pelaksanaannya selalu didasarkan pada azas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan dan rasa keadilan, maka para ninik mamak dan penghulu bebas menyelesaikan sesuatu

kasus pidana adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat. Ada kalanya yang menurut Hukum Adat Pidana Minangkabau merupakan kesalahan besar diselesaikan dengan hukuman yang ringan, tetapi juga ada kalanya yang merupakan kesalahan kecil diselesaikan dengan hukuman yang berat.

Perbuatan mencuri pada umumnya merupakan perbuatan yang mengganggu keseimbangan umum, tetapi jika seorang kedapatan mencuri beras sedikit untuk makan karena sudah beberapa hari keluarganya tidak makan nasi, atau mencuri buah-buahan karena disuruh dukun untuk keperluan pengobatan orang yang sedang menderita sakit, maka Hukum Adat Pidana Minangkabau dapat memaafkan perbuatan demikian, dimana si bersalah tidak dihukum. Tetapi sebaliknya walaupun perbuatan mencuri itu hanya dilakukan terhadap sesuatu barang yang kurang berharga, katakanlah mengambil buah kelapa orang lain, jika yang melakukan pencurian itu seorang penghulu (bergelar Datuk), maka perbuatan tersebut merupakan kesalahan besar. Di Minangkabau seorang "Penghulu Andiko" yang membuat malu kaum kerabatnya tidak akan dapat dipertahankan sebagai kepala kerabat dan ia harus diganti kedudukannya dengan orang lain.

8. Hak mendapat perlindungan

Menurut hukum adat yang berlaku di beberapa daerah terdapat ketentuan bahwa seorang yang bersalah dapat dilindungi dari ancaman hukuman dari suatu pihak, apabila ia datang meminta perlindungan kepada kepala adat, penghulu agama atau raja. Hukum Adat Pidana Minangkabau juga demikian, contohnya seorang yang sudah ternyata bersalah kemudian

mendapat hukuman yaitu dikungkung lehernya dan dijemur di tengah padang. Tetapi kalau ia dapat melepaskan diri, atau sengaja keluarganya melepaskannya, si bersalah boleh melarikan diri ke istana raja. Disana ia tak diapa-apakan lagi. Ia sudah lepas dari tuntutan eksekusi dan tidak diserahkan kembali kepada hakim. Tetapi bukan berarti ia sudah lepas dari hukuman. Dalam istana itulah dia mesti bekerja menurut besar kecil hukumannya atau seumur hidupnya. Inilah yang dinamakan “handam” atau “handam dirumah gedang”.

9. Kesalahan didalam hukum adat.

Hukum Adat Pidana Minangkabau tidak mengenal perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran” sebagaimana diatur dalam KUHP Buku II dan Buku III. Baik kejahatan ataupun pelanggaran kesemuanya adalah “kesalahan” dan barangsiapa melakukan kesalahan yang menyebabkan kegancilan dan terganggunya keseimbangan masyarakat, maka kesalahan itu harus diselesaikan, diperbaiki atau dihukum. Begitu pula didalam Hukum Adat Pidana Minangkabau tidak ditekankan perbuatan kesalahan itu pada adanya unsur kesengajaan atau karena kurang hati-hati, melainkan yang penting bahwa kesalahan itu sudah terjadi.

C. Eksistensi Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat dan Praktek Penegakan Hukum

Dalam pembahasan eksistensi Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam kehidupan masyarakat dan praktek penegakan hukum ini, penulis akan mengkajinya dari aspek substansi, aspek

Berdasarkan beberapa literatur dan wawancara penulis diketahui bahwa Minangkabau sudah mengenal dan mempraktekkan Undang-undangnya sendiri yang bernama *Undang-undang Nan Duo Puluah* sebagaimana sudah penulis uraikan pada bagian terdahulu.

Namun demikian kedatangan Belanda mulai merobah dan menggeser sistem Hukum Adat Minangkabau pada umumnya serta Hukum Adat Pidana Minangkabau khususnya, terutama setelah diberlakukannya WvS oleh Belanda. Dan reaksi-reaksi adat telah diganti dengan sanksi yang diatur oleh WvS. Sebenarnya kehadiran Belanda di Ranah Minangkabau tidak disambut dengan senang hati oleh penduduk setempat. Sebaliknya kedatangan penjajah itu selalu ditolak mulai dengan cara yang halus sampai kepada tindakan kekerasan. Hal ini terbukti dengan perlawanan Tuanku Imam Bonjol terhadap Belanda dan lain-sebagainya. Tetapi dengan segala macam cara, bangsa asing itu langkah demi langkah akhirnya dapat mencekamkan kakinya di daerah ini. Mereka menyadari bahwa kehadirannya disini tidak disukai oleh penduduk setempat. Pendatang baru ini menggunakan akalnya untuk melakukan pendekatan kepada penduduk asli.

Cara yang dilakukan adalah dengan memproklamirkan suatu pernyataan secara sepihak, yang menggambarkan bahwa maksud kedatangan mereka ke daerah ini adalah sebagai sahabat bukan sebagai musuh. Mereka berjanji bahwa mereka tidak akan ikut campur tangan dengan urusan penduduk asli.

Pernyataan sepihak dari Belanda tersebut dikenal dengan nama "Plakat Panjang" yang diumumkan di Padang, pada tanggal 23 Oktober 1833. Sebahagian dari isi Plakat Panjang tersebut adalah sebagai berikut ³⁸⁾:

38) Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981, Halaman 17

“Residen atau pejabat pemerintah lainnya di daerah pantai ini, sama sekali tidak boleh ikut campur dalam pemerintahan Nagari. Begitu pula mencampuri hak kekuasaan para kepala terpenting anda dan para penghulu. Pemilihan para kepala anda akan dijalankan oleh anda sendiri menurut hukum dan adat anda. Semua persoalan disebabkan utang-piutang, pelanggaran, perkawinan, perceraian, harta pusaka dan sebagainya, akan diputuskan oleh anda sendiri menurut hukum dan adat, juga orang-orang lain tidak boleh ikut campur dengan sistem peradilan anda atau cara-cara anda mengadili tindak pidana, tetapi semuanya melalui para penghulu selaras dengan hukum dan adat. Kecuali tindak pidana yang ditujukan terhadap Pemerintah seperti pemberontakan, perlawanan, membunuh atau menganiaya pegawai Pemerintah atau tentara, merampas atau merusak harta Pemerintah. Barang siapa melakukan kejahatan demikian akan diadili oleh Pengadilan Negeri Padang”.

Plakat Panjang yang diproklamirkan oleh Belanda itu hanya merupakan perbuatan pura-pura dari Belanda untuk melunakkan perlawanan rakyat pada waktu itu. Perbuatan licik dari Belanda ini kemudian terbukti ketika Belanda pada tanggal 6 April 1865 mengundang seluruh kepala-kepala adat yang diangkat oleh Belanda yang mereka sebut Engku “Lareh” beserta penghulu-penghulu kepala di seluruh Sumatera Barat untuk berkumpul di Kota Bukittinggi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Van den Bosch dan Komisaris Pemerintah Der Kinderen beserta rombongan dari Batavia. Baik Van den Bosch maupun Der Kinderen mengajukan usul untuk mengubah tata hukum peradilan, dan mereka mengharapkan agar usul ini tidak ditolak oleh rakyat. Diantara usul yang diajukan adalah sebagai berikut ³⁹⁾:

39) Ibid, halaman 233.

1. Dasar-dasar baru bagi hukum pidana; penghapusan sistem solidaritas (keluarga atau suku dipertanggungjawabkan atas kejahatan salah seorang anggotanya).
2. Kepada para kepala suku tidak diberikan kekuasaan hukum. Tetapi mereka bisa saja mengeluarkan pendapat sebagai penengah dalam soal perdata yang diajukan kepada mereka.
3. Mengumumkan dalam buku Undang-undang mengenai Peraturan-peraturan baru tersebut di bidang Pengadilan.

Hasil pertemuan tanggal 6 April 1865 itu kemudian dijadikan Undang-undang diumumkan dan diberlakukan pada tanggal 1 November 1865. Undang-undang baru tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ⁴⁰⁾:

1. Bahwa semua pelanggaran akan dituntut, tidak lagi seperti dahulu tergantung kepada rapat di pihak yang terhina atau dirugikan.
2. Bahwa semua pelanggaran akan dihukum menurut Undang-undang Pemerintah Hindia Belanda. Yang akan dihukum hanya mereka yang melakukan kejahatan, walaupun itu tidak berarti bahwa pihak yang dirugikan tidak mendapat ganti rugi berupa uang untuk semua yang dideritanya.
4. Bahwa untuk masa-masa mendatang tidak semua seorangpun boleh dipaksa membayar utang orang lain, kecuali kalau ada sebelumnya telah berjanji membayarnya dengan sukarela.
5. Bahwa jika terjadi pembunuhan, yang bersalah harus menjalani hukuman badan. Yang dirugikan karena pembunuhan itu boleh meminta ganti rugi pada Hakim walau melebihi jumlah 800 Gulden dan itu tetap disebut bangun.

40) Ibid, halaman 236-237

Mulai tanggal 1 November 1875, yakni semenjak Undang-undang baru mulai diumumkan dan diberlakukan oleh Belanda kepada rakyat Minangkabau, maka rapat-rapat kepala adat untuk menangani pelaksanaan aturan delik adat yang terkandung dalam Undang-undang Nan Salapan dan membuktikannya melalui Undang-undang Nan Dua Belas hanya tinggal nama, karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelanggaran aturan delik adat penanganannya langsung dilakukan oleh Belanda.

Semenjak itu rakyat semakin benci kepada penjajah Belanda, karena tindakannya telah menghapus delik adat itu. Dalam percakapan sehari-hari selalu dilontarkan kata-kata sinis yang diungkapkan dengan peribahasa "*dahulu rabab nan batangkai, kini telong nan babungo, dahulu adat nan bapakai kini rodi nan paguno*". Maksudnya sebelum penjajah Belanda berkuasa di daerah ini adat yang dipakai, tetapi sekarang hukum Belanda yang harus ditaati.

Berhasilkah Belanda melaksanakan niatnya untuk menghapus Hukum Adat Minangkabau melalui undang-undang yang dipaksakan berlakunya itu? Bagaimanapun liciknya akal Belanda mendesak hukum adat, namun usaha tersebut sia-sia belaka, karena rakyat bersama kepala-kepala adatnya mempunyai cara lain untuk mengenyampingkan aturan Belanda tersebut.

Kepala-kepala adat melakukan perbuatan pura-pura pula terhadap Belanda, di hadapan penjajah itu mereka mengakui bahwa mereka mematuhi aturan-aturan yang dibuat Belanda, tetapi sebaliknya apabila kepala-kepala adat itu berhadapan kembali dengan rakyat, mereka tetap mempertahankan hukum adat dengan kata lain Undang-undang Nan Dua Puluh masih tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.

Semenjak itu lahirlah istilah “*angguk enggan, geleang amuah, unjuak nan indak panah dibarikan*” (mengangguk tidak mau, menggeleng mau, unjuk yang tidak pernah diberikan). Maksudnya apabila ditanya oleh Belanda apakah kepala-kepala adat telah melaksanakan undang-undang yang dibuat Belanda, mereka mengangguk tanda mengiyakan, tetapi di hadapan rakyat hukum adat masih kokoh dipertahankan.

Kebencian terhadap tindakan penguasa Belanda tersebut bukan saja datang dari rakyat setempat, bahkan kebencian itu juga berasal dari kalangan penjajah sendiri, diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut ⁴¹⁾:

1. Pruys vander Haeven, dia mengemukakan: Sifat bangsa Minangkabau yang terbuka, kebiasaan mereka untuk membicarakan sesuatu secara demokratis, membuka pintu luas bagi pikiran baru yang baik, banyak hukum adat yang dianggap jelek oleh orang luar seperti azas solidaritas mungkin merupakan sistem terbaik bagi masyarakat khas Minangkabau. Dalam masyarakat azas ini mempunyai peranan positif, mungkin lebih baik dari sistem kepolisian sekarang.
2. Jenderal De Brauw, mengemukakan sebagai berikut: Prinsip solidaritas itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari cara kehidupan masyarakat Minangkabau dan menjalankan peranan yang sangat baik. Perampokan tidak ada di sana dan pencurian jarang terjadi. Sistem ini lebih baik dari hukum pidana apapun.

41) Narullah, Op. Cit., Halaman 70.

Setelah Indonesia merdeka dan berlakunya KUHP maka sudah pasti semua wilayah Indonesia, termasuk Minangkabau tunduk kepada aturan-aturan KUHP yang *nota bene* adalah hasil warisan penjajahan Belanda. Apabila ditinjau dari sejarah dan isi dari KUHP tersebut, maka terlihat KUHP ini bukanlah gambaran kehendak rakyat Indonesia, tapi lebih mengutamakan politik penjajahan Belanda untuk melestarikan penjajahannya di Indonesia. Oleh karena itu tidaklah aneh jika ditemui titik-titik lemah dari KUHP tersebut.

Salah satu titik lemah yang ditemukan dalam KUHP adalah yang menyangkut dengan pengertian "*overspel*" yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Kata *overspel* itu diterjemahkan oleh Moeljatno, sebagai "jinah". Pengertian jinah menurut pemahaman masyarakat Indonesia tidak sama dengan pengertian *overspel*.

Baik menurut pandangan Agama Islam maupun menurut pengertian adat yang diartikan jinah ialah hubungan kelamin antara seorang perempuan dengan seorang lelaki di luar pernikahan, tidak ada pembatasan bahwa salah seorang atau kedua-duanya telah terikat tali perkawinan dengan orang lain, seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 284 KUHP.

Apabila diikuti pemahaman yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, maka lelaki dan perempuan yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah dan keduanya belum terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat diajukan ke depan sidang pengadilan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan *overspel* yang kemudian diterjemahkan sebagai perbuatan jinah.

Kalau diperhatikan sebagian besar dari Hukum Adat Pidana Minangkabau yang ada dalam Undang-undang *Nan Duo Puluah* sudah tercakup atau sudah ada bandingannya dalam KUHP. Namun demikian ada sebagian kecil yang tidak

terakomodasi secara pas sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri, misalnya:

1. Ada di antara perbuatan yang tidak tercakup di dalam KUHP yang menurut anggapan masyarakat adat Minangkabau melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Contohnya, pengertian zina dalam KUHP berbeda dengan pengertian zina dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau, kumpul kebo tidak ada pengaturannya dalam KUHP, sedangkan dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau termasuk ke dalam delik "sumbang salah". Delik "*dago-dagi*" tidak ada bandingannya dalam KUHP, begitu juga perbuatan-perbuatan sumbang salah lainnya.
2. Adanya sanksi yang dijatuhkan oleh Negara berdasarkan KUHP tidak cukup dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat Minangkabau. Contohnya, walaupun Pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara selama beberapa tahun terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan ataupun perkosaan, belumlah dirasakan sebagai suatu keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan perdamaian di antara kedua belah pihak ataupun masyarakat, sebelum keluarga pelaku meminta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.
3. Azas yang terkandung didalam Hukum Adat Pidana Minangkabau sebahagian tidak tercakup didalam KUHP. Contohnya, Hukum Adat Pidana Minangkabau mengenal azas pertanggungjawaban kolektif atau azas solidaritas, azas penyelesaian konflik, dan azas keseimbangan.

Berdasarkan kenyataan di atas mau tidak mau Hukum Adat Pidana Minangkabau dirasakan sebagai suatu kebutuhan di dalam masyarakat, sehingga

secara implisit Hukum Adat Pidana Minangkabau tetap eksis di dalam masyarakatnya, walaupun sudah melemah.

Dari hasil penelitian Azmi Jamarin dan Yardi Gond⁴²⁾, diketahui bahwa diantara Undang-undang *Nan Salapan* yang masih mendapat perhatian oleh penguasa adat dan masyarakat adalah mengenai “sumbang salah” dan “*dago-dagi*”. Terhadap jenis-jenis delik adat yang lain seperti tikam bunuh, maling curi, siar bakar, upas racun, samun sakar dan umbuk umbai sudah ada pengaturannya dalam KUHP, dan hanya Negaralah yang berhak memberi sanksi pidana.

Namun demikian dari penelitian Narullah⁴³⁾ terdapat juga sanksi adat yang tetap dibebankan bagi para pelanggar delik adat sesuai aturan Undang-undang *Nan Salapan*, sedangkan yang menyangkut dengan hukuman badan atau sanksi lain yang diatur dalam KUHP bukanlah wewenang penguasa adat.

Dalam hal ini bahwa para pemuka adat dan masyarakat sudah memisahkan pengertian sanksi menurut adat dan sanksi yang dijatuhkan oleh Negara. Hasil temuan Narullah yaitu berupa Keputusan Kerapatan Adat Nagari Ladang Lawas Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 12 Maret 1984, disebutkan bahwa KAN Ladang Lawas telah menjatuhkan sanksi adat terhadap seorang perempuan (Ramadhan beserta anak-anaknya) yang dikenal dengan istilah *jatuah basapih*. Dalam hal ini Ramadhan beserta anak-anaknya dibuang sepanjang adat, disebabkan salah seorang anaknya berinisial Al telah membunuh seorang anak perempuan yang masih berumur 9 tahun di Nagari Ladang Lawas, walaupun kasus Al sudah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan hukuman penjara, namun kepada keluarga Al tetap dijatuhkan reaksi adat tersebut diatas⁴⁴⁾.

42) Azmi Jamarin dan Yardi Gond, Op. Cit., Halaman 30-31

43) Narullah, Op. Cit., Halaman 63

44) Ibid, Halaman 92

Hal yang menarik dalam penelitian penulis di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yaitu tampaknya telah muncul inisiatif dari ninik mamak suatu pesukuan disana untuk lebih mengeksistensikan Hukum Adat Minangkabau dewasa ini di wilayahnya atau ini dapat disebut semacam *mambangkit batang tarandam* (membangkit batang terendam), dalam bentuk mengeluarkan Putusan dan Kesepakatan Bersama Ninik Mamak di Pasukuan Sikumbang pada tanggal 26 Maret 2000, yang isi keputusan atau kesepakatan tersebut sebagaimana penulis kutipkan berikut ini (dengan menambah keterangan sedikit dalam bahasa Indonesia):

1. Bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran baik itu ajaran Islam maupun adat maka berdasarkan kesepakatan bersama, *saruweh nan busuak mako saruweh pulo nan dibuang* (satu ruas yang busuk maka satu ruas pula yang dibuang). Dan dia itu dibuang sepanjang adat untuk selamanya dan dia tidak lagi menjadi anak kemenakan *Datuak Nan Balimo* (lima pimpinan adat di Pasukuan Sikumbang), juga tidak boleh berdiam di Kampung Sikumbang ini.
2. Terhadap kedua orang tua yang melakukan pelanggaran seperti di atas, maka terhadap mereka sanksi berupa membelikan batu kerekel sebanyak 5 (lima) mobil $\frac{3}{4}$ yang dipergunakan untuk kepentingan jalan umum, sebelum diberikan maka *ka bukit indak samo mandaki, ka lurah samo indak manurun* (ke bukit tidak sama mendaki, ke jurang sama tidak menurun, artinya tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan).
3. Bagi keluarga atau kedua orang tua yang anaknya melakukan pelanggaran kedua kalinya atau disebut *duo kali pisang babuah* (dua kali pisang berbuah) di keluarga tersebut, maka terhadap mereka *ka bukit indak samo mandaki, ka lurah samo indak manurun*.
4. Bagi yang laki-laki anak kemenakan *Datuak Nan Balimo* yang melakukan pelanggaran di atas juga diperlakukan putusan atau kesepakatan bersama ini.
5. Harus patuh kepada *datuak* atau penghulu masing-masing untuk diajak kepada kebaikan.
6. Mengenai masalah tanah, bagi anak kemenakan hanya mempunyai hak pakai bukan hak milik, dan bagi siapa saja boleh membuat rumah di atas tanah tersebut.
7. Bagi perempuan khususnya gadis-gadis Sikumbang dilarang keluar rumah pada malam hari, dan dilarang menerima tamu laki-laki lewat pukul 21.00 Wib.

Di akhir keputusan ini juga disebutkan bahwa putusan dan kesepakatan ini berlaku semenjak ditetapkan yaitu hari Minggu tanggal 26 Maret 2000 dan berlaku selamanya, juga berlaku umum bagi siapa saja.

Inisiatif-inisiatif semacam ini di beberapa daerah mulai muncul dengan berbagai bentuknya, yang prinsip yaitu mengeksistensikan kembali nilai-nilai adat beserta sanksi-sanksi yang melekat sesuai dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai ataupun norma-norma adat tersebut.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tasyrif 1986⁴⁵⁾ di 5 (lima) Kabupaten di Sumatera Barat yaitu Tanah Datar di Pariangan, Pesisir Selatan di Koto Barapak, Sawahlunto di Silungkang, Lima Puluh Kota di Situjuh Batur dan Pasaman di Ganggo Hilir, terungkap bahwa delik adat yang diatur dalam Undang-undang *Nan Duo Puluah* masih banyak yang diselesaikan oleh para fungsionaris adat seperti pencurian kecil-kecilan, sumbang salah dan perkelahian. Namun ada juga kasus yang relatif berat kualitasnya yang diputus seperti pembakaran, percobaan pembunuhan, tapi itu relatif sedikit. Tetapi juga ada masalah pelanggaran lalu lintas yang pada umumnya menjadi urusan polisi diselesaikan oleh Peradilan Adat. Hasil penelitian Tasyrif tersebut menunjukkan eksistensi dari lembaga Peradilan Adat di Minangkabau, disamping lembaga Peradilan Negara.

Selanjutnya keberadaan lembaga peradilan adat yang diselenggarakan oleh para penguasa adat mulai dari tingkat yang rendah (suku) sampai kepada tingkat yang tinggi (KAN) tampaknya secara diam-diam diterima oleh para penegak hukum dengan alasan antara lain:

- a. Putusan yang diberikan adalah lebih dirasakan cocok oleh para pihak yang terlibat.

45) Tasyrif, Op. Cit. Halaman 19-20.

- b. Kasus yang diselesaikan oleh penguasa adat adalah perkara-perkara yang relatif ringan, sehingga membantu dalam menghindarkan menumpuknya perkara pada lembaga peradilan umum.
- c. Adanya efisien materi dan waktu.

Khusus untuk lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang pada zaman Belanda telah dikebiri, tapi secara diam-diam masyarakat dan kepala adat masih mempertahankannya. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa kembali melemahkan lembaga KAN, karena Nagari tidak diakui lagi sebagai pelaksana pemerintahan. Namun demikian melalui Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI, lembaga KAN kembali diakui. Pada konsideran dari Perda Nomor 13 Tahun 1983 tersebut dirumuskan sebagai berikut:

“bahwa Nagari di Daerah Sumatera Barat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Daerah Sumatera Barat, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan tuntutan pembangunan Nasional.”

Pengakuan terhadap Kerapatan Adat Nagari atau KAN melalui Perda Nomor 13 Tahun 1983 telah membawa angin baru dalam rangka melestarikan adat istiadat di Sumatera Barat, dan ninik mamak telah memperoleh kembali fungsinya semula.

Akhir-akhir ini kesadaran untuk lebih mengeksistensikan Adat Minangkabau ini tampaknya disambut juga di semua kalangan di Sumatera Barat, hal ini terlihat dengan Program Kembali ke Nagari yang dicanangkan di semua

Kabupaten pada tahun 2001 ini menyusul keluarnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari.

Kemudian juga diberitakan bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) tanggal 14 November 2000 juga telah mengajukan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) kepada Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat. Pembuatan draft Ranperda ini merupakan inisiatif pengurus LKAAM setelah mencermati kondisi semakin maraknya pekat di Sumbar. Sebagai organisasi payung adat, LKAAM tidak ingin Ranah Minang tercoreng oleh perbuatan-perbuatan yang merusak seperti prostitusi, judi, miras dan perbuatan yang merusak moral masyarakat. Untuk menjaga falsafah adat Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, LKAAM berkewajiban mengantisipasi terjadinya kemerosotan akhlak bagi anak-kemenakannya. Pembuatan draft Ranperda ini sebagai salah satu bukti keprihatinan LKAAM. Dalam draft yang disusun tersebut, LKAAM memberikan alternatif sanksi *dibuang sepanjang adat* terhadap masyarakat yang melanggar Perda Pekat ⁴⁶⁾.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan penulis sekarang ini kasus-kasus delik adat lebih cenderung penyelesaiannya di tingkat yang lebih rendah (kaum), kemudian ke tingkat kampung, dan jarang sekali sampai ke tingkat KAN. Sedangkan untuk kasus pidana ringan yang seyogyanya menjadi wewenang peradilan umum/agama, sering diselesaikan oleh KAN. Perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sudah mulai kurang mempercayai lembaga Peradilan Pemerintah.

46) Harian Umum Mimbar Minang, **Pelaku Maksiat Dibuang Sepanjang Adat**, Padang, Rabu, 15 November 2000.

Dari wawancara dengan responden diperoleh jawaban bahwa mereka masih dapat menerima pengadilan menangani perkara-perkara yang berat sifatnya, tetapi terhadap perkara yang ringan, mereka enggan ditangani oleh penegak hukum. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perkara delik adat, mayoritas mereka puas dengan keputusan yang dijatuhkan oleh fungsionaris adat/lembaga peradilan adat, karena dapat memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak dan rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau masih menganggap Hukum Adat Pidana efektif dan dihormati, walaupun ada juga sebagian anggota masyarakat yang kurang mengakui wibawanya.

Kalau diperhatikan kehidupan kekerabatan masyarakat Minangkabau terutama yang mendiami daerah pedesaan, mereka masih kokoh mempertahankan adat istiadat. Nilai-nilai asing dapat dikatakan masih lemah pengaruhnya terhadap nilai-nilai adat dan agama. Salah satu penyebab masih utuhnya adat istiadat dipertahankan adalah karena antara adat dan agama saling menopang dan saling mendukung. Dalam fatwa adat disebut bahwa antar adat dan agama *sanda manyanda* (sandar menyandar) artinya saling kuat menguatkan.

Dalam konteks tersebut diatas berarti budaya hukum masyarakat Minangkabau masih cukup kondusif dalam rangka menegakkan nilai-nilai/norma-norma hukum adat pidana Minangkabau. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa masyarakat adat Minangkabau masih patuh dan taat kepada ketentuan-ketentuan ataupun keputusan-keputusan adat khususnya Hukum Adat Pidana.

Berikutnya eksistensi Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam masyarakat dan praktek penegakan hukum dapat dilihat dari kasus-kasus yang

ditemukan di beberapa daerah Sumatera Barat, baik oleh penulis sendiri maupun yang ditemuan oleh peneliti sebelumnya, mulai tahun 1982 sampai tahun 2000.

1. Kasus sumbang salah/kesusilaan (hamil diluar nikah) yang tidak diketahui siapa yang menghamilinya. Perbuatan yang terang atau jelas telah mencoreng arang dan membuat malu di Payung Panji Datuak Palindih khususnya, Pasukuan Sikumbang umumnya, yang dilakukan seorang gadis bernama Epi anak dari Nilam dan Zainal (nama-nama bukan sebenarnya) anak kemenakan Payung Panji Datuak Palindih Suku Sikumbang di Desa Koto Malintang, yang pada tanggal 29 Pebruari 2000 diputuskan hukuman oleh Datuk Nan Balimo Pasukuan Sikumbang yang bunyinya sebagai berikut:
 - a. Bagi si Epi yang telah melakukan pelanggaran yaitu berbuat maksiat maka terhadapnya ditolak dari daerah ini, tidak boleh diam di daerah ini selamanya.
 - b. Bagi kedua orang tuanya yang telah membiarkan anaknya itu membuat pelanggaran dengan arti kata tidak bisa mendidik, mengatur dan menjaga anaknya dari berbuat maksiat ataupun membukakan jalan untuk berbuat maksiat bagi anaknya itu, maka terhadap mereka berdua *ka bukik indak samo dibawo mandaki ka lurah indak samo dibawo menurun* (ke bukik tidak sama dibawa mendaki ke jurang tidak sama dibawa menurun) dengan arti kata apa yang terjadi pada diri mereka berdua akan dibiarkan saja, apakah itu acara baik maupun acara buruk.
 - c. Bagi anak kemenakan Datuak Palindih yang datang ke rumah mereka, *ka ateh indak bapucuak ka bawah indak baurek ditangah-tangah digiriak kumbang sansaro di dunia sansaro di akhirat* (ini artinya disumpahi ibarat tanaman yaitu ke atas tidak berpucuk ke bawah tidak berakar di tengah

dikorek kumbang sengsara di dunia sengsara di akhirat). Bagi anak kemenakan datuak yang ada di Sikumbang jika datang ke rumah mereka, maka kami akan menuntut kepada datuak-nya.

- d. Hukuman tersebut akan berakhir apabila keluarga membayar uang denda guna untuk membangun mesjid dan jalan kampung. Dendanya adalah sebanyak 20 zak semen.

2. Kasus sumbang salah/kesusilaan bersama-sama yang terjadi di Dusun Kacuali, Desa V Suku Ateh, Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam. Kasus ini dapat disebut unik dan mengherankan karena para pelakunya terdiri dari ibu dan beberapa orang anaknya yang kesemuanya wanita dan terlibat dalam kasus yang sama yaitu sumbang salah/kesusilaan. Pelaku-pelaku tersebut adalah (1) Rasyidah, 65 tahun, kasusnya melakukan pernikahan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang tidak sah menurut Hukum Islam maupun menurut adat dan kebiasaan bernagari; (2) Yurdi, 40 tahun, kasusnya melakukan kawin-cerai beberapa kali tanpa jelas status hukum menurut Agama Islam; (3) Erni, 38 tahun, kasusnya melakukan perkawinan kedua sebelum adanya thalaq dari suami pertama; (4) Ar, 35 tahun, kasusnya melakukan perkawinan kedua sebelum adanya thalaq dari suami pertama; (5) Nini, 18 tahun, kasusnya melakukan perkawinan dengan ayah tiri (suami kedua Rasyidah yang status hukumnya belum jelas). Lebih lanjut kasus-kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada perkawinan Rasyidah (65 tahun) yang dilakukannya dengan seorang laki-laki yang berasal dari desa lain hanya dihadiri oleh wali maupun saksi-saksi yang sama sekali tidak sah, baik secara Hukum Islam maupun Hukum Adat dan

kebiasaan setempat. Lebih dikuatkan lagi oleh belum jelasnya status perkawinan Rasyidah sebelumnya (yang sekarang telah menjadi suami anak bungsunya yaitu Nini, 18 tahun).

Perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh Yurdi (40 tahun) sama sekali tidak mengindahkan aturan Hukum Islam dan adat istiadat. Pada sebuah kejadian, Yurdi bahkan mempunyai dua suami dalam waktu yang bersamaan. Suami yang satu ke luar daerah dan Yurdi melakukan perkawinan lagi dengan lelaki lain, dimana status perkawinan inipun sangat tidak jelas.

Perkawinan Erni yang juga dilakukan dengan laki-laki lain desa, di sebuah tempat yang tidak jelas, secara nyata telah melanggar aturan Islam dan adat. Status Erni saat masih sebagai istri yang sah dari suami sebelumnya. Dalam hal ini Erni memalsukan surat perceraian dengan suami pertama, sekaligus telah memalsukan surat perkawinan dengan suami yang sekarang.

Kemudian kasus yang terjadi pada Ar (35 tahun) sama halnya dengan kasus yang terjadi pada kakak kandungnya. Perkawinan dengan suaminya yang sekarang dilaksanakan tidak sah karena ia masih terikat kawin dengan suami sebelumnya.

Sedangkan kasus Nini (18 tahun) adalah kasus yang paling unik. Nini telah melakukan perkawinan dengan ayah tirinya dengan ibunya belum mempunyai kejelasan hukum. Lebih unik lagi, semuanya tinggal dalam satu rumah.

Jika dianalisis lebih jauh maka dapat dikatakan bahwa keluarga tersebut benar-benar telah keluar dari nilai-nilai Islam dan telah menghalalkan pola suami-istri yang bebas dan tidak terkendali. Bahkan mereka telah melecehkan adat dan kebiasaan serta tak lagi menghormati masyarakat sebagai lingkungan komunal mereka.

Kasus ini kemudian diselesaikan oleh para pemuka adat dusun dengan alim ulama dusun. Setelah melewati beberapa kali persidangan, kasus ini kemudian dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yakni desa. Dalam peradilan desa dengan anggota-anggotanya para pemuka adat dan alim ulama desa, kemudian diambil keputusan-keputusan atas kasus ini pada tanggal 8 Oktober 1998. Namun pada dasarnya keputusan yang diambil adalah penetapan atas putusan yang telah diambil oleh peradilan dusun/kampung. Bunyi keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga tersebut harus *mangarumahkan urang kampung* (mengundang ke rumah orang kampung) dengan istilah lain *tajamba*. *Tajamba* artinya mengadakan jamuan makan untuk *ninieki mamak*, alim ulama dan masyarakat setempat. *Jamba* yang disediakan adalah sebagaimana lazimnya hidangan pesta yang dilakukan (bentuk hukuman, *abu dijantiak, kumuah disasah*).
- b. Keluarga tersebut harus *maisi adait* yaitu memberikan 20 sak semen untuk pembangunan mushalla (bentuk hukuman bangun/denda).
- c. Menyelesaikan masalah-masalah status perkawinan masing-masing.

Jika seandainya pihak tersebut di atas tidak memenuhi dan/atau menolak seluruh keputusan itu dan/atau sebelum memenuhi segala putusan itu, maka kepadanya dikenakan sanksi adat yang berlaku. Yaitu *kok ka hilie ndak saranguah galah, ka mudiak ndak saranguah dayuang*, putusan ini berarti dibuang sepanjang adat, yaitu:

- a. Keluarga tersebut tidak dibawa serta dalam setiap kegiatan kampung, apakah itu pesta atau kenduri-kenduri dalam bentuk apapun maupun keramaian yang diadakan oleh dusun khususnya dan desa umumnya.

- b. Jika keluarga tersebut mengadakan pesta atau kenduri apapun masyarakat tidak boleh menghadirinya.
 - c. Jika sekiranya ada kegiatan gotong royong (sebagaimana biasanya masyarakat mengantarkan makanan dan minuman) maka hantaran keluarga tersebut tidak boleh disentuh oleh masyarakat.
 - d. Jika ada kematian dalam keluarga tersebut, masyarakat tidak boleh *manjanguak* (melayat) kecuali menyelenggarakan jenazah dalam batas-batas yang telah digariskan oleh Islam.
 - e. Dan bentuk-bentuk lainnya yang serupa itu.
3. Kasus perzinahan sekitar bulan November 1996 yang terjadi di Desa Tigo Sapilin, Kenagarian Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman ini juga telah diselesaikan berdasarkan hukum adat oleh ninik mamak, para pemuka adat dan alim ulama setempat. Kasus tersebut dilakukan oleh: (1) Amrizal (bukan nama sebenarnya), 38 tahun, beristri sah, kasusnya melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bukan istrinya; (2) Syamsinar (bukan nama sebenarnya), 36 tahun, bersuami sah, kasusnya melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- Pada kasus ini Amrizal dan Syamsinar telah melakukan hubungan badan secara tidak sah dalam hukum Islam maupun dalam pandangan adat dan istiadat. Karena masing-masing pihak selamat dari perceraian pada keluarga masing-masing, maka putusan untuk mengawinkan keduanya tidak dapat dilakukan. Untuk itu sanksi yang dijatuhkan masing-masing pada Amrizal dan Syamsinar adalah sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan sanksi *takambang* pada masing-masingnya, yakni mengadakan jamuan dengan menyembelih satu ekor kambing dengan mengundang *urang siak* (alim ulama), para ninik mamak, dan para penghulu di desa beserta *urang mudo* (pemuda).
 - b. Khusus untuk laki-laki selain dikenai sanksi *takambang* juga diwajibkan memberikan 20 sak semen untuk surau (mesjid).
 - c. Jika sekiranya terjadi perceraian pada pihak perempuan (Syamsinar dithalaq suaminya), laki-laki (Amrizal) harus mengawininya. Jika kewajiban ini digantikan oleh laki-laki lain maka Amrizal harus menyerahkan *uang hilang* pada laki-laki tersebut, yang jumlahnya sesuai kesepakatan mereka berdua.
 - d. Jika mereka tidak atau belum melaksanakan putusan ini, maka dikenakan hukuman sepanjang adat atau hukuman *buang sirieh* kepada keluarga dan dirinya.
4. Kasus kawin lari yang dilakukan seorang penghulu (bergelar Datuk). Kasus kawin lari yang terjadi di Desa Gantiang, Kenagarian Paninggahan, Kecamatan Singkarak Kabupaten Solok ini terjadi pada bulan Agustus 1998. Pasangan yang melakukan kawin lari ini adalah (1) A. Dt. Batuah (bukan nama sebenarnya), 28 tahun, lajang; dan (2) Elly (bukan nama sebenarnya), 18 tahun, gadis. Kedua orang tersebut telah melakukan kawin lari dan termasuk ke dalam kejahatan adat yakni mencoreng nama baik dan martabat, baik suku/kaum maupun nagari secara umum. Apalagi pihak laki-laki adalah penghulu atau pemimpin adat yang notabene terhormat dan dihormati.

Menurut informasi mereka telah melaksanakan pernikahan di Muaro Bungo Propinsi Jambi.

Pengertian kawin lari di kenagarian tersebut dijelaskan sebagai *manggungguang mambao tabang* (menggungguang membawa terbang) tanpa melalui peraturan adat yang berlaku di nagari. Kasus ini juga diselesaikan berdasarkan pada hukum adat dan kebiasaan setempat, kepada kedua belah pihak dijatuhkan sanksi berupa *manatiang kasalahan* (menating kesalahan) yakni:

- a. Mengadakan jamuan untuk para penghulu adat.
- b. Menyerahkan setengah kodi atap seng baru untuk perbaikan salah satu rumah gadang.
- c. Menyerahkan satu buah *saluak* (destar kebesaran yang dikenakan para penghulu) kepada penghulu kaum yang bersangkutan.

Kasus kawin lari ini menjadi buah bibir masyarakat karena pernikahan yang mereka lakukan di sana tidaklah pasti dan tidak mempunyai kejelasan yang nyata. Sebab jika pernikahan itu nyata dan sah maka mereka akan disebut dengan kawin di rantau atau dalam adat setempat diistilahkan dengan: *Dima aie disauak, di sinan rantiang dipatah* (dimana air disauk, di sana ranting dipatah). Artinya jika pasangan yang menikah di rantau tersebut pulang ke kampung halamannya maka bagi mereka diharuskan melaksanakan kebiasaan secara adat dan istiadat yang berlaku di kampung.

5. Kasus bantah kalahi yang terjadi di Nagari Jambak Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman antara Amran (bukan nama sebenarnya) anak kemanakan Datuk Bandaro Alam dengan Syahrir (juga bukan nama sebenarnya) anak

kemanakan Datuk Palimo Garang, yang berawal dengan perebutan air untuk mengalir sawah masing-masing yang menyebabkan Amran luka-luka. Kasus ini langsung ditangani oleh polisi. Penghulu kedua belah pihak mengajukan permohonan supaya kasus ini diselesaikan oleh KAN bukan oleh polisi. Akhirnya Kerapatan Adat Nagari Jambak memutuskan:

1. Syahrir membayar ganti rugi berupa biaya selama pengobatan Amran
(*bangkak didamak luko ditaweh*)
 2. Minta maaf dengan mengadakan jamuan makan yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan beberapa ninik mamak.
6. Kasus pencurian di Desa Pincuran Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, si Asman (bukan nama sebenarnya) mencuri sepeda Bachtiar, maka kasus ini diselesaikan oleh ninik mamak Nan Sapuluah keputusannya antara lain:
1. Asman/keluarganya harus mengembalikan sepeda tersebut, karena sudah dijual harus dibeli gantinya.
 2. Asman/keluarga harus minta maaf kepada Bachtiar dihadapan ninik mamak Nan Sapuluah.
 3. Asman berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, seandainya diulangi, maka Asman akan dibuang di Nagari sepanjang adat.
7. Kasus melarikan istri orang yang dilakukan oleh Penghulu yang bernama Y Dt. Sinaro Nan Balang yang terjadi di Koto Nan Gadang Payakumbuh, kasus ini diselesaikan oleh KAN Koto Nan Gadang dengan anggota 50 orang ninik mamak dari 4 suku, dengan putusan sebagai berikut:

1. Y. Dt. Nan Balang dibuang sepanjang adat.
2. Mencabut kepenghuluannya sehingga dia tidak lagi bergelar Datuk Sinaro Nan Balang.

Pada penelitian ini penulis juga menemukan dua kasus Hukum Adat Pidana yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yaitu:

1. Pengadilan Negeri Padang melalui keputusannya, tanggal 22 Oktober 1981, Pidana No. 420/D 1981 PDG, (S) telah mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada dua orang terdakwa, Zulkifli Yunus, terdakwa I, dan Nelly Mayol, terdakwa II. Terdakwa I berstatus kawin dan telah mempunyai dua orang anak, terdakwa II belum pernah nikah dengan lelaki lain.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan tuntutan bahwa baik terdakwa I dan terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana adat zinah, melanggar Pasal 5 ayat 3 huruf b dari Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 jo. Pasal 284 ayat (1) ke 1e dan 2e jo. Pasal 64 KUHP.

Pengadilan Negeri Padang kemudian dalam putusannya menghukum terdakwa I dipersalahkan telah melakukan kejahatan perbuatan cabul dan melakukan tindak pidana adat zinah dan menghukum terdakwa II karena telah melakukan kejahatan tindak pidana adat zinah, karena melanggar Pasal 5 ayat (3) huruf b dari Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Menghukum terdakwa I dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dipotong selama berada dalam tahanan sementara, dipersalahkan telah melakukan kesalahan, perbuatan cabul dan melakukan tindak pidana adat zinah dan menghukum terdakwa II dengan hukuman penjara selama 4 (empat)

bulan dipotong selama berada dalam tahanan sementara, dipersalahkan melakukan kejahatan tindak pidana adat zinah.

2. Pengadilan Negeri Solok telah menyidangkan kasus Hukum Adat Pidana Penghinaan, yaitu seorang perempuan bernama Eti telah mengadukan bahwa Rabain Radin (Datuk Rajo di Hilia) mengatakan kepada orang-orang kampung kalau si Eti "*lah dulu bajak dari jawi*" artinya Rabain menuduh Eti telah berzina sehingga tidak perawan lagi. Dalam memeriksa perkara Hakim mendatangkan saksi ahli yaitu beberapa pemuka adat diantaranya Ketua KAN. Keterangan saksi ahli mengatakan bahwa kasus ini adalah termasuk Hukum Adat Pidana Penghinaan berat yaitu telah membuat malu Eti beserta keluarganya. Akhirnya Pengadilan Negeri Solok melalui keputusannya, tanggal 2 Juli 1997, Pidana No. 201/D 1997 SLK, (S) menjatuhkan hukuman kepada Rabain 3 (tiga) bulan penjara berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

D. Eksistensi dan Relevansi Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Masyarakat Minangkabau merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia, sehingga sangat relevan dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia para penyusun konsep memperhatikan nilai-nilai dan azas-azas Hukum Adat Pidana Minangkabau.

Penulis mencermati bahwa Konsep KUHP yang telah disusun sebenarnya secara eksplisit telah memberi ruang kepada Hukum Adat Pidana Minangkabau atau hukum-hukum adat lainnya di Indonesia untuk tetap eksis, sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu. Artinya secara umum para penyusun Konsep KUHP telah memperhatikan, memahami dan "memasukkan" nilai-nilai dan azas-azas

yang terkandung didalam hukum-hukum adat pidana di Indonesia ke dalam Konsep KUHP. Namun pada sub bab ini penulis akan mencoba secara spesifik mengungkapkan eksistensi dan relevansi Hukum Adat Pidana Minangkabau dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Kajian ini dalam rangka melihat kemungkinan-kemungkinan sumbangan atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari eksistensi (keberadaan) Hukum Adat Pidana Minangkabau ini terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Untuk lebih konkritnya pembahasan ini penulis akan membatasi bahwa "hal-hal yang terkandung didalam suatu Hukum Adat Pidana", itu artinya adalah meninjau azas-azas dari Hukum Adat Pidana tersebut yang relevan dikemukakan untuk mengingatkan, memberi masukan ataupun untuk memberi dukungan kepada para penyusun konsep pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya.

Selanjutnya penulis akan mengkaji satu-persatu asas-asas Hukum Adat Pidana Minangkabau dimaksud sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Semua aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang Nan Duo Puluah sudah diketahui bahkan sudah melekat dalam benak setiap warga masyarakat Minangkabau, sehingga apa bila norma-norma tersebut dilanggar akan mendapat reaksi dari masyarakat adat yang dilaksanakan oleh pemuka-pemuka adat.

Hendaknya azas legalitas seperti pada Hukum Adat Pidana Minangkabau inipun dapat diupayakan pada setiap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jadi tidak cukup hanya disepakati di DPR, kemudian

disahkan dan diundangkan, sudah disebut mempunyai makna legalitas. Menurut penulis, itu baru memiliki legalitas, sedangkan yang diharapkan adalah pembaharuan Hukum Pidana tersebut dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat, artinya diterima oleh masyarakat, sosialisasinya harus dilakukan dengan cukup, sehingga diharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menegakkannya (Hukum Pidana tersebut).

2. Azas Pertanggungjawaban Kolektif

Dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau di samping pertanggungjawaban individu juga dikenal pertanggungjawaban kolektif artinya tidak hanya si pelanggar saja yang bertanggungjawab atas perbuatannya, tetapi juga keluarga, kadang-kadang mamak, bahkan kaum si pelanggar juga ikut bertanggung jawab. Sekarang ini bentuk dari tanggung jawab keluarga adalah berupa bangun/denda, dibuang sepanjang adat atau *maisi adait/manatiang jamba/manatiang kasalahan*.

Untuk pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, hal ini juga perlu dipertimbangkan untuk direspon. Tentu saja penulis menyarankan tidak untuk setiap delik harus memiliki ketentuan pertanggungjawaban kolektif ini. Misalnya untuk delik-delik yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah tanggung jawab orang tua (belum kawin), hendaknya orang tuanya juga diancam dengan semacam hukuman denda, disamping ancaman utama kepada si anak yang melakukan tindakan kriminal.

Konsekuensi logis dengan adanya ketentuan semacam ini, pastilah para orang tua akan secara lebih sungguh-sungguh dan bertanggung jawab mendidik anak-anaknya di masa yang akan datang. Hal ini sangat cocok

dengan model hubungan keluarga kita orang timur, dimana masih tinggi rasa/hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya.

Pembaharuan hukum pidana ini, sekaligus dapat dijadikan semacam alat untuk kembali mendorong terciptanya hubungan keluarga yang semakin erat dan harmonis. Jika hal ini sudah menjadi keputusan Nasional, niscaya setiap orang tua akan selalu menasehati anak-anaknya agar tidak melakukan tindak pidana, karena mereka sebagai orang tua juga akan terseret dan diancam semacam denda yang lumayan memberatkan, disamping memberi perasaan malu kepada mereka selaku orang tua.

3. Azas Keseimbangan

Dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan *Undang-undang Nan Duo Puluah*, berarti telah terjadi gangguan terhadap keseimbangan didalam masyarakat. Hal ini terutama pelanggaran terhadap aturan "Sumbang-salah" dan Dago-dagi", untuk itu harus dilakukan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Biasanya dilakukan dalam suatu upacara adat yang disebut dengan *maisi adait/manatiang jamba*.

Pelajaran yang dapat ditarik dari Azas Keseimbangan ini yang relevan dalam rangka pembaharuan hukum pidana adalah tentang ketentuan pengucapan atau permintaan maaf di hadapan orang banyak. Barangkali tidak relevan diatur dalam bentuk harus ada jamuan makan, tapi cukup pengucapan maaf di ruang pengadilan sesudah vonis dijatuhkan Hakim. Ini juga untuk mendidik masyarakat menjunjung tinggi budaya sopan santun kita yang tinggi.

4. Azas Penyelesaian Konflik

Pada umumnya pelanggaran delik adat di Minangkabau diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, sesuai dengan pepatah *indak ado kusuik nan indak ka salasai, indak ado karuah nan indak ka janiah* (tidak ada kusut yang tidak akan selesai, tidak ada keruh yang tidak akan jernih). *Lamak di awak ka tuju pulo di urang* (enak di kita suka pula di orang), caranya diajarkan pepatah *bak muelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih, tapuang indak taserak* (seperti menghela rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak terserak), maksudnya hati-hati dan penuh tenggang rasa dan kesabaran.

Apapun kemudian putusan yang diambil selalu diupayakan secara damai, maka sanksi permohonan maaf ini sangat memegang peranan sekali di Minangkabau.

Melalui azas penyelesaian konflik dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau ini, hal yang dapat ditarik sebagai bahan ada dua hal. Pertama, jika memungkinkan dicantumkan aturan yang jelas tentang penyelesaian secara damai suatu perkara yang melibatkan dua pihak dan kedua pihak juga menginginkan diselesaikan secara damai, sebelum dibawa ke sidang pengadilan.

Kedua, adalah tentang perlunya permintaan maaf dari si pelaku kejahatan terhadap korban atau keluarganya, walaupun dia telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Dalam pembaharuan Hukum Pidana ini, tidak ada salahnya ketentuan ini dicantumkan, sehingga menjadi keharusan perihal permintaan maaf ini. Untuk kasus-kasus tertentu tidak perlu dikuatirkan, bahwa permintaan maaf tersebut hanya dilakukan pelaku secara terpaksa atau

sebagai basa-basi, yang penting bagi yang menerima ada perasaan puas, dan diharapkan akan mengurangi penderitaannya sebagai korban kejahatan. Apalagi jika dapat diatur semacam keharusan meminta maaf dihadapan orang banyak, sebagaimana yang dapat kita tarik dari Azas Sanksi Kumulatif berikut ini.

5. Azas Sanksi Kumulatif

Dengan Hukum Adat Pidana Minangkabau sering terjadi penjatuhan sanksi secara kumulatif adakalanya disamping membayar bangun/denda juga membayar ganti rugi kepada korban atau disamping melakukan upacara adat/*maisi adait* harus pula memohon maaf dihadapan orang banyak, dan lain-lain.

6. Azas Sanksi Alternatif

Dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau juga dikenal sanksi alternatif. Seseorang yang bersalah misalnya diberi sanksi dibuang sepanjang adat, maka sanksi ini bisa diganti dengan uang bangun/denda. Apabila denda sudah dibayar, maka hukuman buang hapus dengan sendirinya. Contoh lain, seseorang yang dibuang ke luar Nagari bisa diterima kembali apabila melakukan upacara adat/*maisi adait* atau dengan kata lain melakukan *kumuah basasah* (kotor dicuci).

Dalam pembaharuan Hukum Pidana ini hendaknya dilakukan terobosan yang berarti, khususnya berkaitan dengan azas sanksi alternatif ini. Karena juga tidak bermanfaat, jika setiap orang yang melakukan kejahatan dimasukkan ke penjara, barangkali sanksi denda sebagai alternatif hukuman

kurungan harus tetap dicantumkan dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

7. Azas Perlindungan Terhadap Korban

Pelanggaran delik adat ada kalanya mendatangkan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Hukum Adat Pidana Minangkabau korban pelanggaran delik sangat diperhatikan, sehingga korban tidak menderita (kesusahan) hidupnya, dicemooh masyarakat, menanggung rasa malu dalam masyarakat. Seperti kata pepatah "*luko ditaweh, bangkak didamak*" artinya luka diobati (ganti kerugian).

Hal ini juga telah diakomodasikan dalam pembaharuan Hukum Pidana, dan tetap hendaknya dipertahankan konsep ini.

8. Azas Perlindungan Terhadap Wanita

Wanita di Minangkabau mendapat tempat yang terhormat dan dimuliakan. Wanita diibaratkan sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang, ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito* (Limpapeh Rumah Nan Gadang, mau pergi tempat bertanya, mau pulang tempat berberita). Melakukan kesalahan terhadap wanita merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan berat hukumannya.

Jika didalam Hukum Adat Pidana Minangkabau dapat dibedakan sanksi kejahatan terhadap wanita, tentu saja perlu menjadi masukkan pula dalam pembaharuan hukum Pidana. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengada-ada, dalam rangka perlindungan dan memberikan rasa aman kepada wanita sebagai ibu yang harus kita hormati dan junjung tinggi martabatnya.

9. Azas Perlindungan Hukum atau Pengayoman

Merampas hak orang lain atau menguasai harta seseorang dengan cara melawan hukum sama sekali tidak dibenarkan dalam hukum adat Minangkabau, berbunyi dalam Undang-undang Nan Salapan yang disebut dengan perbuatan *rabuit-rampeh*. Perbuatan ini terang-terangan bertentangan dengan hak azasi manusia, maka hak seseorang dilindungi dengan undang-undang.

Ini sudah merupakan hal yang universal, penulis yakin tanpa diberi masukanpun hal ini akan tetap diatur dengan baik dalam pembaharuan hukum.

10. Azas Musyawarah

Dalam menyelesaikan kasus-kasus melawan hukum, ninik mamak menyelesaikannya dengan musyawarah yang dilandasi oleh pepatah adat *lamak dek awak katuju dek urang* artinya senang bagi kita disukai pula oleh orang. Musyawarah dilakukan mulai dari tingkat terendah (kaum) sampai dengan tingkat yang tertinggi (Kerapatan Adat Nagari), seperti bunyi pepatah *bajanjang naik batanggo turun*.

Masalah penyelesaian kasus-kasus dalam pembaharuan hukum sudah mengatur cara-cara musyawarah para Hakim dalam memutus perkara. Harapan hanya ditompangkan, bagaimana agar dalam pelaksanaannya tidak terasa terlalu otoriter pimpinan hakim (Ketua Majelis Hakim) dalam memutus perkara.

11. Azas Kedudukan Terhadap Penghulu

Sanksi yang diberikan kepada penghulu sebagai pelanggar yang melanggar kehormatan atau kesusilaan, lebih tinggi dari masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran. Begitu pula jika kehormatan penghulu yang dilanggar akan lebih tinggi sanksinya dibanding pelanggaran terhadap kehormatan masyarakat biasa. Sesuai dengan kata pepatah penghulu adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting (yang menjadi pemimpin dalam Nagari).

Pada pembaharuan hukum dan situasi mental bangsa kita, azas ini perlu dikedepankan. Bagaimana kalau para pejabat atau para pimpinan Negeri ini jika melakukan kejahatan diberikan hukuman yang lebih berat dari aturan standar untuk rakyat. Barangkali hal ini perlu diatur lebih tegas dalam ketentuan-ketentuan yang memberatkan terdakwa, lengkap dengan kriteria-kriteria penentuan tingkatan status pejabat/petinggi Negeri.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan pemahaman penulis diakhir tulisan ini sebagai penutup dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan Umum

Dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana dan upaya pembaharuan hukum nasional perlu adanya usaha penggalian dan pengkajian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (hukum tidak tertulis/hukum adat) khususnya hukum adat pidana, yang akan membentuk dan membangun serta mewujudkan suatu sistem hukum nasional, termasuk sistem hukum pidana nasional, sehingga sistem hukum nasional yang dibangun betul-betul berasal dari karakteristik nilai yang bersumber dan berakar pada aspirasi yang hidup di dalam masyarakat.

Upaya penggalian dan pengkajian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat merupakan kebutuhan mendesak dan sekaligus merupakan konsekuensi logis untuk dapat melakukan pembaharuan dan penciptaan hukum nasional. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama. Oleh sebab itu upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan amanat Nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan Nasional.

beban dan amanat Nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan Nasional.

Tujuan penelitian hukum adat setempat bukanlah untuk langsung dalam penerapannya mengesampingkan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional atau secara langsung memberlakukan peraturan hukum adat setempat, akan tetapi penelitian itu diperlukan untuk mencari unsur-unsur mana yang penting dan dapat kita gunakan untuk “dipilin” atau “dianyam” ke dalam hukum nasional kita. Dengan demikian hukum adat kita tidak hilang, akan tetapi lahir kembali dalam bentuk yang lebih modern, untuk hidup terus sebagai hukum nasional kita. Kiranya harmonisasi hukum adat seperti ini ke dalam hukum Indonesia modern adalah sesuai dengan petatah-petitih Minangkabau yang berbunyi : *“sakali aia gadang sakali tapian baranjak; sakali aia dalam sakali kasiak barubuh; ulat dipakai baru baju dipakai usang; usang-usang dipahami lapuak-lapuak dikajangi; nan elok dipakai nan buruak dibuang; kok singkek diuleh panjang bakarek nan umpang disisik; alam takambang jadi guru”*.

Keinginan dan usaha untuk melakukan penggalian dan pengkajian terhadap hukum tidak tertulis (Hukum Adat/Hukum Adat Pidana) telah cukup banyak dikemukakan di Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan terhadap eksistensi Hukum Adat/Hukum Adat Pidana dalam pengembangan hukum Nasional, seperti jelas terlihat pada: (1) Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke-I Tahun 1963; (2) Laporan Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979 (3) Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980; (4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor

14/1970), (5) Undang-undang Nomor 1/Drt/1951 Pasal 5 ayat (3) Sub b, (6) Seminar Hukum Nasional VI Tahun 1994. Konsep KUHP baru juga telah berupaya memberi tempat kepada eksistensi hukum adat/adat pidana.

B. Kesimpulan Khusus

1. Masyarakat Minangkabau mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan suku lain di Indonesia, yaitu sistem turunan menurut garis ibu yang disebut juga sistem Matrilineal. Walaupun menganut sistem Matrilineal tetapi teguh menganut agama Islam yang sistem hukumnya bersifat Patrilineal. Oleh sebab itu masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang dinamis dalam kehidupan beradat dan beragama. Dua doktrin yang berbeda itu dapat dirumuskan dalam satu rumusan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", dengan pengertian, agama Islam menjadi sendi pokok dari bangunan adat Minangkabau.
2. Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuak Perpatieh Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Ajaran-ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan, yang didasarkan kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia sesama manusia dan alam lingkungannya.
3. Adat Minangkabau bersumber dari ajaran-ajaran yang mengambil iktibar kepada ketentuan-ketentuan alam semesta, "*alam takambang jadi guru, satitiak jadikan lautan, sakapa jadikan gunuang*" (alam berkembang jadi

guru, setitik jadikan lautan, sekepal jadikan gunung). Adat Minangkabau sebagai aturan hidup tidaklah bersifat kaku, bahkan sebahagian ketentuan-ketentuan adat itu mempunyai daya lentur yang sangat tinggi, sesuai dengan pepatah, "*adat babuhua sintak, syarak babuhua mati*". Adat Minangkabau dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) tingkat, sebagai berikut: (1) *Adat nan sabana adat*; (2) *Adat nan diadatkan*; (3) *Adat nan teradat*; dan (4) *Adat istiadat*.

4. Hukum Adat Minangkabau / Hukum Adat Pidana Minangkabau merupakan suatu sistem hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur suatu sistem hukum yaitu memiliki susunan tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut pola, hasil pemikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
5. Hukum adat Minangkabau berdasarkan kepada *Limbago Nan Sapuluah* yang merupakan kumpulan pokok dari sebuah aturan adat yang ada di Minangkabau. Diantara *Limbago Nan Sapuluah* terdapat *Undang-undang Nan Duo Puluah* yang merupakan hukum adat pidana Minangkabau.
6. *Undang-undang Nan Duo Puluah* terdiri dari 2 kelompok, yaitu: (1) *Undang-undang Nan Salapan* (Undang-undang yang Delapan) merupakan undang-undang hukum adat pidana materil; dan (2) *Undang-undang Nan Duo Baleh* (Undang-undang yang Dua Belas) merupakan undang-undang hukum adat pidana formil (istilah undang-undang disini bukan dalam arti undang-undang tertulis, tapi hukum yang tidak tertulis).
7. Pada Hukum Adat Pidana Minangkabau dikenal dua bentuk sanksi/hukuman yaitu hukuman fisik/hukuman badan dan sanksi non fisik

(sanksi moral). Hukuman fisik/hukuman badan terdiri dari: (1) hukuman mati; (2) dirajam; (3) dijadikan andam atau budak di rumah raja. Hukuman mati/badan ini hampir tidak pernah dilakukan karena dapat dia/ternatiskan dengan hukuman denda. Sedangkan sanksi non fisik terdiri dari: (1) hukuman utang, terdiri dari: (a) minta maaf dan diberi nasehat saja; (b) *harabu dijantiak* (berdebu dijentik); dan (c) *kumuah disasah* (kotor dicuci), kesemuanya ini harus dengan mengadakan selamatan (mengisi adat), yaitu dengan mengadakan jamuan makan, memotong kerbau/kambing/ayam; (2) *Bangkak didamak, luko ditaweh* (bengkak dikompres panas, luka diobati) artinya mengganti kerugian; (3) Hukuman bangun atau denda; (4) Dipermalukan di depan orang banyak; dan (5) Dibuang (pembuangan ini bisa dalam konteks teritorial maupun sosiologis).

8. Sanksi moral lebih efektif di Minangkabau jika dibanding dengan sanksi fisik. Hal ini disebabkan karena adanya budaya malu yang dimiliki oleh masyarakat adat Minangkabau. "Malu" adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Menurut alam pikiran masyarakat adat Minangkabau, malu seorang adalah malu bersama, bahkan malu itu berlaku untuk tujuh keturunan. Apabila seorang individu melakukan perbuatan tercela, maka keluarga, anggota kerabat yang lain ikut bertanggung jawab.
9. Pelanggaran delik adat di Minangkabau pada prinsipnya diselesaikan berdasarkan ketentuan berjenjang naik bertangga turun, mulai dari tingkat yang paling bawah (kaum) sampai yang tertinggi (KAN), dengan secara kekeluargaan, sesuai dengan pepatah *indak ada kusuik nan indak ka salasai, indak ado karuah nan indak ka jantah* (tidak ada kusut yang tidak

akan selesai, tidak ada keruh yang tidak akan jernih). *Lamak di awak ka tuju pulo di urang* (enak di kita suka pula di orang), caranya diajarkan pepatah *bak maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih, tapuang indak taserak* (seperti menghela rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak terserak), maksudnya hati-hati dan penuh tenggang rasa dan kesabaran. Apapun kemudian putusan yang diambil selalu diupayakan secara damai, maka sanksi permohonan maaf sangat memegang peranan sekali di Minangkabau.

10. Sebahagian besar Hukum Adat Pidana Minangkabau yang ada dalam Undang-undang Nan Duo Puluah sudah tercakup atau sudah ada bandingannya dalam KUHP. Namun demikian ada sebagian kecil yang tidak terakomodasi secara pas sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri, misalnya: (a) ada diantara perbuatan yang tidak tercakup didalam KUHP yang menurut anggapan masyarakat adat Minangkabau melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat; (b) adanya sanksi yang dijatuhkan oleh Negara berdasarkan KUHP tidak cukup dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat Minangkabau; (3) azas yang terkandung didalam Hukum Adat Pidana Minangkabau sebahagian tidak tercakup didalam KUHP. Oleh karena itu Hukum Adat Pidana Minangkabau sampai saat ini masih dirasakan sebagai suatu kebutuhan di dalam masyarakat dan secara implisit masih tetap eksis di dalam masyarakatnya.
11. Beberapa azas Hukum Adat Pidana Minangkabau yang perlu mendapat perhatian dan relevan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah:

(1) Asas Legalitas; (2) Asas Pertanggungjawaban Kolektif; (3) Asas Keseimbangan; (4) Asas Penyelesaian Konflik; (5) Asas Sanksi Kumulatif; (6) Asas Sanksi Alternatif; (7) Asas Perlindungan Terhadap Korban; (8) Asas Perlindungan Terhadap Wanita; (9) Asas Perlindungan Hukum atau Pengayoman; (10) Asas Kedudukan Terhadap Penghulu.

C. Saran

1. Hendaknya pembahasan Konsep KUHP diupayakan menjadi agenda prioritas Nasional dan sesegera mungkin disahkan, karena sudah merupakan kebutuhan yang mendesak bagi bangsa Indonesia.
2. Hendaknya dalam penyempurnaan Konsep KUHP yang menurut penulis sudah bagus, dalam pengertian relatif sudah memperhatikan nilai-nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia sendiri, namun perlu juga secara lebih luas diseminarkan atau didiskusikan sampai ke daerah-daerah, disamping dalam rangka menerima masukan untuk penyempurnaan, juga berfungsi sebagai sosialisasi sebelum disahkan untuk melihat reaksi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, **Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional**, Bandung: Alumni, 1978.
- Anwar, Chairul, **Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau**, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ali, Chidir, **Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia, Cet. II**, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Amirin, Tatang M., **Menyusun Rencana Penelitian**, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Amran, Rusli, **Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang**, Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Asshiddiqie, Jimly, **Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**, Bandung: Angkasa, 1995.
- Batuah, Ahmad Dt. dan Madjoindo, A. Dt., **Tambo Minangkabau**, Jakarta: Balai Pustaka, 1956.
- Darmodiharjo, Darji, **Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Datoek Toeah, **Tambo Alam Minangkabau**, Cetakan XIII, Diedit kembali oleh A. Dahoeri, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1976.
- Datuk Sangguno Dirajo, **Curaian Adat Alam Minangkabau**, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1987.
- Esten, Mursal, **Minangkabau: Tradisi dan Perubahan**, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Haar, Ter. BZN. B., **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Hadikusumo, Hilman, **Hukum Pidana Adat**, Bandung: Alumni, 1979.
- , **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hakimy, Idrus, Dt. Rajo Penghulu, **Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau**, Cetakan Keenam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- , **Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau**, Cetakan Keempat, Bandung: Rosdakarya, 1994.
- , **Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau**, Cetakan Keempat, Bandung: Rosdakarya, 1994.

- , **1000 Pepatah-Petitih Mamang-Bidal Pantun-Gurindam**, Cetakan Ketiga, Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Hamzah, Andi, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- , dan Siti Rahayu, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- , **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Edisi Revisi, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- Harahap, Yahya, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Harsono, C.I, Hs., **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hartono, Sunarjati, **Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat**, Bandung: Alumni, 1979.
- , **Pengembangan Hukum Kebiasaan**, Seminar Hukum Nasional Buku I, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1994.
- Hasan, Firman, **Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau**, Padang: Pusat Penelitian Unand, 1988.
- Hazairin, **Tujuh Serangkai Tentang Hukum**, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Idris, A. Samad, **Payung Berkembang**, Kuala Lumpur: Pustaka Budiman, 1990.
- Koesnoen, **Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia**, Bandung: Sumur Bandung, 1964.
- Koeswadji, Hermin Hadiati, **Aspek Budaya dalam Pemidanaan Delik Adat**, Makalah dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, Denpasar, 17 - 19 Maret 1975.
- Lamintang, PAF, **Hukum Penitensier Indonesia**, Bandung: Amrico, 1984.
- Mahmoed, Sutan dan Penghulu, A. Manan Rajo, **Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah**, tanpa penerbit, tanpa tahun.
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muhammad, Bushar, **Pokok-pokok Hukum Adat**, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- , **Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)**, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Bandung: Alumni, 1985.

-----, **Jenis-jenis Pidana Pokok Dalam KUHP Baru, Masalah-masalah Hukum (Edisi Khusus)**, Semarang: FH UNDIP, 1987.

-----, **Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia**, Makalah Seminar Pengembangan Ilmu Hukum Yang Berkualitas Indonesia, FH UNDIP, Semarang, 1988.

-----, **Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia Dimasa Datang**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, FHUK UNDIP Semarang, 1990.

-----, **Beberapa Catatan Tentang Pembaharuan KUHP Nasional**, Makalah, Seminar Ilmu Hukum, FH UNS, 1991.

-----, **Pola Penjatuhan Pidana Menurut Konsep Rancangan KUHP**, Makalah, Seminar BPHN Dept. Kehakiman, Jakarta, 1992.

-----, dan Nawawi Arief, Barda, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Bandung: Alumni, 1992.

-----, dan Nawawi Arief, Barda, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Bandung: Alumni, 1992.

Naim, Mochtar, **Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau**, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984.

Nasroen, M., **Dasar Falsafah Adat Minangkabau**, Cetakan Kedua, Djakarta: Bulan Bintang, 1971.

Nawawi Arief, Barda, **Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I**, Semarang: BPBK, FH UNDIP, 1984.

-----, **Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan**, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1986.

-----, **Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam KUHP Baru, Masalah-masalah Hukum (Edisi Khusus)**, Semarang: FH UNDIP, 1987.

-----, **Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen**, Makalah Penataran Kriminologi, Semarang: FH UNDIP, 1988.

-----, **Beberapa Masalah Hukum Pidana Ditinjau dari Berbagai KUHP Asing**, Semarang: BPBK, FH UNDIP, 1990.

-----, **Sistem Pemidanaan Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya**, Bahan Penataran, Bandung: Universitas Parahyangan, 1990.

-----, **Perbandingan Hukum Pidana**, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

- , **Beberapa Pokok Pemikiran Hukum Pidana Yang Akan Datang**, Makalah Seminar LBH, Jogyakarta, 1991.
- , **Kebijakan Hukum Pidana**, Bahan Penataran, Bandung: FH Universitas Parahyangan, 1991.
- , **Kebijakan Kriminal**, Bahan Penataran, Bandung: FH Universitas Parahyangan, 1991.
- , **Beberapa Aspek 'Baru' Dalam Konsep KUHP Baru**, Makalah Seminar Hukum Pidana, Solo, FH UNS, 1991.
- , **Upaya Nonpenal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Makalah Seminar Kriminologi, Semarang: FH UNDIP, 1991.
- , **Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP**, Bahan Penataran Hukum dan Kriminologi, Semarang: FH UNDIP, 1993.
- , **Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, FHUK UNDIP Semarang, 1994.
- , **Permasalahan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia**, Bahan Ceramah pada Forum Komunikasi Penelitian Bidang Hukum, FHUK UNDIP, 5-9 Desember 1994 di Hotel Kencana Bandungan.
- , **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- , **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- , **Kebijakan Hukum Pidana (Pehal Policy)**, tanpa penerbit, tanpa tahun penerbitan.
- , **Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Poernomo, Bambang, **Asas-asas Hukum Pidana**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- , **Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan**, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung: PT Eresco, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Bandung: Alumni, 1979.
- , **Hukum dan Masyarakat**, Bandung: Angkasa, 1980.

- , **Pembangunan Hukum Yang Diarahkan kepada Tujuan Nasional, Masalah-masalah Hukum**, Semarang: FH UNDIP, 1982.
- , **Beberapa Pemikiran Tentang Ancang Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum**, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- , **Asas-asas Hukum Nasional**, Seminar Asas-asas Hukum Nasional, Januari 1989.
- Reksodiputro, Mardjono, **Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.
- Samin, Yahya, Dkk, **Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini**, Padang: BP3 Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat, 1996.
- Saleh, Roeslan, **Beberapa Asas-asas Hukum Pidana Dalam Perspektif**, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- , **Stelsel Pidana Indonesia**, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- , **Perbuatan Pidana dan Pertanggung-jawab Pidana**, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- , **Segi Lain Hukum Pidana**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- , **Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana**, Diktat, tanpa tahun.
- Sarikat Putra Jaya, Nyoman, **Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**, Thesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 1988.
- Seno Adji, Oemar, **Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospektif**, Jakarta: Erlangga, 1981.
- , **Hukum Pidana Pengembangan**, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Soebekti, **Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang**, Jakarta: BPHN Bina Cipta, 1981.
- Soekanto, **Meninjau Hukum Adat Indonesia**, Cetakan Ketiga, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Soekanto, Soerjono, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1976.
- , dan Soekanto, **Pokok-pokok Hukum Adat**, Bandung: Alumni, 1981.

- , dan Mustafa Abdullah, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- , dan Mamudji, Sri, **Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- , dan B. Taneko, Soleman, **Hukum Adat Indonesia**, Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, **Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat**, Bandung: Alumni, 1984.
- , **Studi Hukum dan Masyarakat**, Bandung: Alumni, 1985.
- , **Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soepomo, **Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat**, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- , **Bab-bab Tentang Hukum Adat**, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1989.
- Soleman B. Taneko, **Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang**, Bandung: Eresco, 1987.
- Sudarto, **Hukum Pidana Jilid I A**, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1975.
- , **Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia**, Cet. II, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FHUK UNDIP Semarang, 1976.
- , **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung: Alumni, 1977.
- , **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)**, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudiyat, Iman, **Hukum Adat Suatu Pengantar (Sketsa Asas)**, Bandung: Alumni, 1979.
- , **Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar**, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Sutha, I Gusti Ketut, **Bunga Rampai: Beberapa Aspekta Hukum Adat**, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- , **Peranan Hukum Adat Sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Pembangunan Masyarakat**, dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung: Eresco, 1995.

Syamsudin, M., Dkk., **Hukum Adat dan Modernisasi Hukum**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Tresna, R. **Asas-asas Hukum Pidana**, Jakarta: PT Tiara Ltd, 1969.

Widnyana, I Made, **Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan (Kajian Yuridis-Kriminologis)**, Makalah, Semarang: FH UNDIP, 1991.

-----, **Kapita Selekta Hukum Pidana Adat**, Bandung: Eresco, 1993.

-----, dan Kawan-kawan, **Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia**, Kumpulan Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bandung: Eresco, 1995.

Widnjodipoero, Soerojo, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, Jakarta: Haji Masagung, 1990.

Yakub, Dt. B. Nurdin, **Minangkabau Tanah Pusaka**, Tambo Minangkabau Buku I, II, dan III, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1989.

Zainal Abidin, Andi, **Asas-asas Hukum Pidana, Bagian I**, Bandung: Alumni, Juli 1987.